



**PEMERINTAH DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOTA KEUANGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	4
1.1 Umum.....	4
1.1.1 Latar Belakang.....	4
1.1.2 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2024 dan 2025 .....	5
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan .....	9
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan .....	10
1.4 Sistematika Penulisan Nota Keuangan .....	13
BAB II KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH.....	15
2.1 Kondisi Umum Pendapatan Daerah .....	15
2.2 Permasalahan Utama Pendapatan Daerah.....	15
2.3 Estimasi Pendapatan Daerah.....	16
2.3.1 Pendapatan Asli Daerah.....	16
2.3.2 Pendapatan Transfer .....	18
2.3.3 Lain–Lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....	19
2.4 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah .....	20
BAB III KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH .....	23
3.1 Kondisi Umum Belanja Daerah .....	23
3.1.1 Belanja Operasi .....	24
3.1.2 Belanja Modal.....	24
3.1.3 Belanja Tidak Terduga.....	24
3.1.4 Belanja Transfer .....	24
3.2 Permasalahan Utama Belanja Daerah .....	25

3.3	Kebijakan Umum Belanja Daerah .....	25
3.4	Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah.....	31
BAB IV KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN.....		263
4.1	Kondisi Umum Pembiayaan .....	263
4.1.1	Penerimaan Pembiayaan .....	263
4.1.2	Pengeluaran Pembiayaan .....	263
4.2	Permasalahan Utama Pembiayaan.....	264
4.3	Kebijakan Umum Pembiayaan .....	264
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....		266
BAB VI PENUTUP .....		272

## DAFTAR TABEL

Tabel I-1	Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2024 dan Tahun 2025 .....	6
Tabel I-2	Proyeksi Indikator Ekonomi Makro DIY pada Tahun 2024 .....	9
Tabel II-1	Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2025 .....	19
Tabel III-1	Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah .....	32
Tabel III-2	Plafon Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja .....	73
Tabel III-3	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan.....	74
Tabel IV-1	Alokasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.....	264
Tabel V-1	Penyelarasan Prioritas Daerah Tahun 2025 dengan Sasaran RPJMD DIY Tahun 2022-2027 .....	266
Tabel V-2	Penyelarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah.....	267
Tabel V-3	Penyelarasan Indikator Target Daerah dengan hasil Rakortekrenbang .	270
Tabel V-4	Penetapan Indikator Kinerja Utama DIY .....	271

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Umum**

### **1.1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah Provinsi dengan Pemerintah dan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 pada tanggal 8 Juli 2024, merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2025 mengacu pada RKPD Tahun 2025 dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD dengan kebijakan Pusat dilakukan melalui penyelarasan antara Prioritas Nasional yang tercantum dalam Rancangan RKP Tahun 2025 dengan prioritas pembangunan daerah DIY Tahun 2025 yang tercantum dalam RKPD Tahun 2025. Sedangkan sinkronisasi RKPD dengan KUA dilakukan dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024.

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Tahun 2025 juga disusun dengan mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2022-2027 yang dalam perumusannya mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahap keempat rencana pembangunan jangka panjang, serta isu-isu strategis yang aktual, serta memperhatikan rancangan RKP Tahun 2025.

KUA Tahun Anggaran 2025 yang disepakati dengan Nota Kesepakatan Nomor 3/KSP/VIII/2024 – Nomor 61/K/DPRD/2024 dan PPAS Tahun Anggaran 2025 yang disepakati dengan Nota Kesepakatan Nomor 4/KSP/VIII/2024 – Nomor 62/K/DPRD/2024 menjadi acuan bagi seluruh Instansi di Pemerintah Daerah DIY dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Hal tersebut diatur dan dikuatkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penyusunan RKPD sejalan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD. Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 juga mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan terakhir kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya dokumen RKPD, KUA, dan PPAS menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2025.

### **1.1.2 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2024 dan 2025**

Kondisi perekonomian DIY diperkirakan mengalami ekspansi namun dipengaruhi oleh perkiraan kondisi dunia yang diprediksi berkontraksi karena dampak perang dan kondisi politik dunia. Peningkatan kinerja ekonomi terkait dengan semakin kondusifnya aktivitas perekonomian Indonesia yang konservatif. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, proyeksi kinerja perekonomian DIY tahun 2024 dan 2025 menggunakan asumsi:

1. Kriteria skenario kinerja ekonomi tahun 2022 dan 2023 didasarkan pada perkembangan proses kondisi perekonomian dan perkembangan perekonomian global yang relatif berkontraksi. Permintaan ekspor dan aliran impor menghadapi kendala akibat perang di beberapa negara dan jalur logistik internasional serta menurunnya permintaan global. Sementara itu kondisi politik karena penyelenggaraan pemilihan umum mendorong dinamika perekonomian yang dipengaruhi unsur kehati-hatian;
2. Dari sisi penawaran, kontribusi sektor-sektor yang selama ini mendominasi PDRB tersebut tetap diharapkan akan memberikan kontribusinya yang besar pada total produk daerah; dan

- Dari sisi permintaan, dominasi konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap memberikan kontribusi permintaan total. Peningkatan pengeluaran dunia usaha diperkirakan masih konservatif.

Proyeksi perkembangan beberapa indikator ekonomi makro tahun 2024 dan 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel I-1 Proyeksi Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Tahun 2024 dan Tahun 2025**

No.	Indikator Ekonomi Makro	2024		2025	
		Pesimis	Optimis	Pesimis	Optimis
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,07	5,60	5,3	5,8
2.	Inflasi	4	2	3,8	3,1
3.	ICOR	5,9	5,2	5,7	5,39
4.	TPT	4	3,45	3,51	3,12
5.	Kemiskinan	10,44	10,11	10,50	10,00
6.	Indeks Gini	0,448	0,446	0,447	0,443
7.	Indeks Williamson	0,4910	0,4892	0,4899	0,4888

Sumber: RKPD Tahun 2025

### 1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan lapangan usaha dominan tumbuh kurang dari 5,5%. untuk skenario optimis dan 4,5% untuk skenario pesimis. Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan 1,5% untuk skenario pesimis dan 2,6% untuk skenario optimis. Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor diperkirakan 2% untuk skenario pesimis dan 3,9% untuk skenario optimis. Kunjungan wisatawan ke DIY diperkirakan akan meningkat cukup signifikan yang berpengaruh terhadap kinerja sektor akomodasi dan makan minum dan ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor ini diperkirakan 3% untuk skenario pesimis dan 5,7% skenario optimis. Bangkitnya aktivitas pariwisata dan perdagangan namun terkendala kondisi permintaan global yang relatif menurun menyebabkan perbaikan kinerja sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 2,9% untuk skenario pesimis dan 5,1% untuk optimis. Asumsi-asumsi tersebut mendorong prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 adalah 5,07% sampai 5,60%.

Seiring dengan kondisi politik Indonesia yang diperkirakan stabil setelah pemilihan umum tahun 2024. Kondisi politik internasional pun diperkirakan membaik. Hal tersebut mendorong kondisi perekonomian 2025 bergerak lebih baik dibandingkan

tahun 2023. Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan lapangan usaha dominan tumbuh 6% untuk skenario optimis dan 4,9% untuk skenario pesimis. Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan 2,3% untuk skenario pesimis dan 4,5% untuk skenario optimis. Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor diperkirakan 3,3% untuk skenario pesimis dan 5,1% untuk skenario optimis. Kunjungan wisatawan ke DIY diperkirakan akan meningkat kembali yang mempengaruhi kinerja sektor akomodasi dan makan minum dan ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor ini diperkirakan 5,1% untuk skenario pesimis dan 7,4% skenario optimis. Bangkitnya aktivitas pariwisata dan perdagangan namun terkendala kondisi permintaan global yang sedikit demi sedikit meningkat menyebabkan perbaikan kinerja sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 3,6% untuk skenario pesimis dan 6,5% untuk optimis. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor diperkirakan 4,6% untuk skenario pesimis dan 5,95% untuk skenario optimis. Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan 5,1% untuk skenario pesimis dan 7,3% untuk skenario optimis. Membaiknya kondisi sektor pariwisata dan perdagangan menyebabkan peningkatan kinerja sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 8,1% untuk skenario pesimis dan 8,85% untuk skenario optimis. Asumsi-asumsi tersebut mendorong prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 adalah 5,3% sampai 5,8%.

## **2. Inflasi**

Tingkat inflasi di DIY menunjukkan dinamika selama empat tahun terakhir ini. Meskipun demikian kinerja pengendalian inflasi telah menunjukkan capaian yang bagus di tahun 2023 dengan menurunkan inflasi dari 6,49% (2022) menjadi 3,17% (2023). Hal ini menunjukkan efektifitas kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam melakukan monitoring dan pengendalian harga barang-barang terutama barang kebutuhan masyarakat. Kinerja tersebut diperkirakan akan tetap di tahun 2024 dan 2025. Daya beli masyarakat maupun kemampuan fiskal pemerintah yang meningkat namun moderat mendorong kenaikan permintaan barang dan jasa. Sedangkan di sisi lain, penawaran pada beberapa komoditas berpotensi meningkat terutama disebabkan oleh sudah lancarnya mobilitas bahan baku dan meningkatnya kinerja sektor transportasi. Akumulasi dampak sisi permintaan dan penawaran dan efektifitas TPID masih mendorong tingkat inflasi DIY masih berkisar antara 2% sampai 4% di tahun 2024 dan antara 3,1% sampai 3,8% di tahun 2025.

## **3. ICOR**



Selama dua tahun terakhir pasca pandemi, terjadi peningkatan efisiensi proses produksi di DIY dipengaruhi antara lain oleh membaiknya kinerja sektor transportasi dengan lebih tersedianya suplai bahan baku yang mendorong peningkatan efisiensi kinerja perekonomian secara umum. Prediksi tingkat ICOR tahun 2024 berkisar antara 5,2-5,9 dan tahun 2025 adalah 5,39-5,7.

#### **4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Tingkat pengangguran terbuka mulai tahun 2024 dan 2025 diperkirakan mengalami penurunan secara gradual dari tahun sebelumnya. Hal ini didorong oleh dinamika ekspansif kinerja sektor yang selama ini banyak menyerap tenaga kerja. Sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor selama ini menyerap sekitar 19% dari total angkatan kerja, industri pengolahan 17,05% serta penyediaan akomodasi dan makan minum sekitar 9,53%. Perkiraan TPT selama tahun 2024 adalah berkisar 3,45%-4% dan 2025 adalah 3,12%-3,51%.

#### **5. Kemiskinan**

Tingkat kemiskinan di tahun 2024 dan 2025 akan menurun seiring dengan kenaikan pendapatan per kapita masyarakat yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat serta menurunnya tingkat pengangguran. Penurunan tingkat kemiskinan juga dipengaruhi dengan relatif rendahnya tingkat inflasi. Prediksi tingkat kemiskinan di tahun 2024 akan berkisar 10,11% sampai 10,44 dan pada tahun 2025 berkisar antara 10,00 sampai 10,50%.

#### **6. Indeks Gini**

Ketimpangan pendapatan masyarakat di DIY tahun 2024 dan 2025 diperkirakan menurun. Perbaikan pemerataan pendapatan didukung oleh pertumbuhan industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makan minum maupun perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan motor akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan dampak pengganda bagi usaha kecil. Proyeksi tingkat ketimpangan yang ditunjukkan dengan Indeks Gini Tahun 2024 yaitu antara 0,446 sampai 0,448 dan 2025 adalah 0,443 sampai 0,447.

#### **7. Indeks Williamson**

Berbagai pembangunan fisik di tahun 2024 dan 2025 seiring dengan alokasi anggaran infrastruktur yang meningkat diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi kabupaten di kawasan selatan DIY. Di sisi lain, keberadaan IKM didominasi di tiga wilayah tertinggal di DIY yang meliputi sekitar 68% dari total IKM. Membaiknya kinerja sektor industri pengolahan akan berdampak pada sebagian besar IKM yang notabene berdomisili di daerah yang

selama ini masih tertinggal dan akan berkontribusi pada penurunan ketimpangan antar wilayah. Aktivitas kepariwisataan juga diarahkan pada pengembangan destinasi-destinasi baru di tiga kabupaten yang termasuk kawasan selatan DIY. Dinamika perkembangan pembangunan dan aktivitas perekonomian tersebut mendorong ketimpangan pembangunan wilayah juga menurun. Proyeksi ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson di tahun 2024 yaitu berkisar di antara 0,4892 sampai 0,4910 dan di tahun 2025 berkisar 0,4888 sampai 0,4899.

## 8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan yang secara konsisten dilaksanakan pada sektor perekonomian, kesehatan dan pendidikan akan terus mendorong peningkatan pembangunan manusia. Hal ini mendorong adanya kenaikan IPM yang diproyeksikan di tahun 2024 sebesar 81,38-81,56. Proyeksi IPM dapat dilihat pada Tabel I-2.

**Tabel I-2 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro DIY pada Tahun 2024**

Indikator	Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi	5,1-5,6%
Inflasi	2-4%
ICOR	5,2-5,8
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,80-3,45
Tingkat Kemiskinan	10,16%
Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	0,419
Ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson)	0,441
Indeks Pembangunan Manusia	81,38-81,56

Sumber: RKPD Tahun 2024

### 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan

Penyusunan Nota Keuangan bertujuan memberikan gambaran umum tentang rencana dan kondisi serta kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada KUA serta PPAS Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah secara umum Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 berisi tentang:

1. Rencana Anggaran Pendapatan Daerah;
2. Rencana Anggaran Belanja Daerah, dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah; dan
3. Rencana Anggaran Pembiayaan, diarahkan pada peningkatan manajemen pembiayaan daerah yang berorientasi kepada akurasi, efisiensi, dan efektifitas.

### **1.3 Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan**

Landasan hukum dalam penyusunan Nota Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan terakhir kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);
  25. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);
  26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 33).
  27. Nota Kesepakatan antara Pemerintah DIY dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Nomor 3/KSP/VIII/2024 – Nomor 61/K/DPRD/2024 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  28. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah DIY dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY Nomor 4/KSP/VIII/2024 – Nomor 62/K/DPRD/2024 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025;

#### **1.4 Sistematika Penulisan Nota Keuangan**

Nota Keuangan APBD DIY Tahun Anggaran 2025 ini disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Umum
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan
- 1.4 Sistematika Penulisan Nota Keuangan

##### **BAB II KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH**

- 2.1 Kondisi Umum Pendapatan Daerah
- 2.2 Permasalahan Utama Pendapatan Daerah
- 2.3 Estimasi Pendapatan Daerah
- 2.4 Arah Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

##### **BAB III KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH**

- 3.1 Kondisi Umum Belanja Daerah
- 3.2 Permasalahan Utama Belanja Daerah
- 3.3 Kebijakan Umum Belanja Daerah
- 3.4 Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah

#### BAB IV KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 4.1 Kondisi Umum Pembiayaan
- 4.2 Permasalahan Utama Pembiayaan
- 4.3 Kebijakan Umum Pembiayaan

#### BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan kegiatan dalam APBD

#### BAB VI PENUTUP

## **BAB II KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH**

### **2.1 Kondisi Umum Pendapatan Daerah**

Rencana Pendapatan Daerah yang akan dituangkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok yakni: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Target pendapatan daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar 10,66% bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024.

### **2.2 Permasalahan Utama Pendapatan Daerah**

Dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan terdapat permasalahan utama yang dihadapi yaitu antara lain:

1. Penerapan pertama atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Pemungutan Pajak Kendaraan (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Opsen MBLB, dengan tarif dan mekanisme yang baru.
2. Regulasi pengelolaan barang milik daerah memberikan batasan waktu periodisasi pemanfaatan khususnya mekanisme sewa dan mekanisme pembayaran di muka yang dianggap tidak menguntungkan bagi pelaku usaha yang akan menyewa.
3. Hasil penilaian nilai wajar pemanfaatan barang milik daerah masih dianggap terlalu tinggi, sehingga menyebabkan pelaku usaha berpikir ulang untuk menyewa aset yang dikelola Pemda DIY.
4. Belum semua aset-aset *idle* Pemda DIY dilakukan penilaian untuk menentukan nilai wajar pemanfaatan (tarif pemanfaatan).
5. Beberapa obyek pendapatan yang bersumber dari transfer pusat ke daerah, sering mengalami perubahan alokasi sehingga hak-hak yang harus diterima oleh pemerintah daerah menjadi terhambat (belum adanya kepastian informasi mengenai dana transfer).
6. Masih terbatasnya kemampuan sarana dan prasarana, penggunaan teknologi informasi serta jangkauan jaringan pelayanan bagi pengelolaan retribusi daerah;
7. Masih terbatasnya SDM pengelola BLUD.



## **2.3 Estimasi Pendapatan Daerah**

Pada APBD Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp5.839.779.293.114 sedangkan pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp5.217.321.924.896 atau berkurang sebesar Rp622.457.368.218 atau turun sebesar 10,66%. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan berasal dari sumber-sumber berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.680.465.474.265;
- b. Pendapatan Transfer sebesar Rp3.529.250.950.631; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp7.605.500.000.

Uraian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah tersebut adalah sebagai berikut.

### **2.3.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pada Tahun Anggaran 2025 Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp1.680.465.474.265, apabila dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditargetkan sebesar Rp2.289.884.435.884 mengalami penurunan sebesar Rp609.418.961.619 atau berkurang sebesar 26,61%. Pendapatan Asli Daerah kemudian diuraikan menjadi 4 (empat) jenis sebagai berikut:

#### **1) Pajak Daerah**

Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp2.018.352.703.526 sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.436.331.635.370 yaitu mengalami penurunan sebesar Rp582.021.068.156 atau berkurang sebesar 28,84%.

Pendapatan dari Pajak Daerah terdiri dari:

##### **a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

PKB pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp990.600.000.000 sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp589.248.163.000, yaitu mengalami penurunan sebesar Rp401.351.837.000 atau berkurang sebesar 40,52%.

##### **b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

BBNKB pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp419.016.000.000 sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp246.191.000.000, yaitu mengalami penurunan sebesar Rp172.825.000.000 atau berkurang sebesar 41,25%.

##### **c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)**

PBBKB pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp304.981.000.000 sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan

sebesar Rp320.231.000.000, yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp15.250.000.000 atau bertambah sebesar 5,00%.

d) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp547.327.500 sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.038.000.000, yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp490.672.500 atau bertambah sebesar 89,65%.

e) Pajak Rokok

Pajak Rokok pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp303.208.376.026 sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp279.593.472.370, yaitu mengalami penurunan sebesar Rp23.614.903.656 atau berkurang sebesar 7,79%.

f) Pajak Alat Berat

Pajak Alat Berat pada APBD Tahun Anggaran 2024 belum ditargetkan dan pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp30.000.000.

2) Retribusi Daerah

Penerimaan dari Retribusi Daerah APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp64.804.109.600 yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp3.729.001.440 atau naik sebesar 5,75% menjadi sebesar Rp68.533.111.040 pada Tahun Anggaran 2025. Retribusi Daerah tersebut terdiri dari:

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp38.253.141.500 sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp38.643.125.671, yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp389.984.171 atau naik sebesar 1,02%.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp26.114.168.100 sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp29.537.185.369, yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp3.423.017.269 atau naik sebesar 13,11%.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp436.800.000 sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp352.800.000 yaitu mengalami penurunan sebesar Rp84.000.000 atau berkurang sebesar 19,23%.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp116.050.620.958 sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp123.993.797.426 yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp7.943.176.468 atau bertambah sebesar 6,84%. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tersebut berasal dari dividen atas penyertaan modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida, PT. Bank BPD DIY, Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), PT. Anindya Mitra Internasional, dan PD. Taru Martani.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pos pendapatan dari penerimaan pendapatan asli daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp90.677.001.800 sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp51.606.930.429 yaitu mengalami penurunan sebesar Rp39.070.071.371 atau berkurang sebesar 43,09%.

### 2.3.2 Pendapatan Transfer

Proyeksi penerimaan Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp3.529.250.950.631 dengan rincian sebagai berikut:

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp3.528.270.024.000, terdiri atas:

1) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pencatatan tersebut berupa dana transfer umum-dana bagi hasil, dana transfer umum-dana alokasi umum, dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik, dan dana transfer khusus-dana alokasi khusus nonfisik. Pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 proyeksi Dana Perimbangan baru memproyeksikan pada dana transfer umum-dana bagi hasil, dana transfer umum-dana alokasi umum, dan dana transfer khusus-dana alokasi khusus nonfisik, dengan rincian sebagai berikut:

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp87.303.416.000 sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp83.460.722.000, yaitu mengalami penurunan sebesar Rp3.842.694.000 atau berkurang sebesar 4,40%.

- b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)  
 DAU pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.337.180.068.000 sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.320.675.068.000, yaitu mengalami penurunan sebesar Rp16.505.000.000 atau naik sebesar 1,23%.
- c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik  
 DAK Non Fisik pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp527.471.861.000 sedangkan Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp511.952.798.000 yaitu mengalami penurunan sebesar Rp15.519.063.000 atau berkurang sebesar 2,94%.

2) Dana Keistimewaan

Dana Keistimewaan pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp1.420.000.000.000 sedangkan Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.612.181.436.000 yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp192.181.436.000 atau bertambah sebesar 13,53%.

- b) Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berasal dari Bantuan Keuangan, pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp983.805.230 sedangkan Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp980.926.631 yaitu mengalami penurunan sebesar Rp2.878.599 atau berkurang sebesar 0,29%.

### 2.3.3 Lain–Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain–Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp7.605.500.000 dan diproyeksikan sama pada Tahun Anggaran 2025.

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel II-1 Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2025**

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)
<b>4</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>5.217.321.924.896</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1.680.465.474.265</b>
4.1.01	Pajak Daerah	1.436.331.635.370
4.1.02	Retribusi Daerah	68.533.111.040
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	123.993.797.426
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	51.606.930.429
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>3.529.250.950.631</b>

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.528.270.024.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	980.926.631
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>7.605.500.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.605.500.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>5.217.321.924.896</b>

## **2.4 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Transparansi pengelolaan pendapatan daerah harus dilaksanakan sejak dari proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran. Selain itu, diperlukan pula akuntabilitas dalam pertanggung jawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan daerah yang benar-benar efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab diharapkan dapat dihasilkan.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan pendapatan tahun 2025 akan menerapkan opsen pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai pengganti belanja bagi hasil bagi pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang ada DIY, serta Opsi Pajak MBLB

Penerapan opsen tersebut akan berpengaruh signifikan pada penerimaan pendapatan daerah khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Sehingga diperlukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, peningkatan kualitas

pelayanan publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan peningkatan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait.

Kebijakan penguatan pajak dan retribusi daerah akan terus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga stabilitas pendapatan daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dimana dalam undang-undang tersebut terdapat penyesuaian pada jenis pajak dan retribusi daerah.

Kebijakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah DIY adalah sebagai berikut:

## **1. Dana Perimbangan**

### **a. Dana Transfer Umum**

Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

#### **1) Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Terdapat alokasi DBH yang ditentukan penggunaannya yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pendanaan DBHCHT meliputi program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah.

#### **2) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Alokasi DAU terdiri dari DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. Sedangkan DAU yang ditentukan penggunaannya dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu DAU Dukungan Penggajian Formasi PPPK, DAU Dukungan Bidang Pendidikan, DAU Dukungan Bidang Kesehatan, dan DAU Dukungan Bidang Pekerjaan Umum.

### **b. Dana Transfer Khusus**

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik

maupun nonfisik, yang merupakan urusan daerah. DTK dibagi menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonFisik.

Fokus Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 adalah untuk:

- a) mencapai prioritas nasional;
- b) mempercepat pembangunan Daerah;
- c) mengurangi kesenjangan layanan publik;
- d) mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau
- e) mendukung operasionalisasi layanan publik.

### **1) Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Fisik**

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan DTK yang bertujuan membantu daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, pencapaian prioritas nasional, dan percepatan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

### **2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik**

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik merupakan bagian dari Dana Transfer Khusus yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang bersifat operasional, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang merupakan urusan daerah sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, serta selaras dengan prioritas nasional. Dasar kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

## **2. Dana Keistimewaan**

Dalam rangka mendukung implementasi urusan keistimewaan, Pemerintah Daerah DIY mendapatkan alokasi dana keistimewaan dari Pemerintah pusat.

Dana Keistimewaan digunakan untuk mendanai kewenangan dalam urusan keistimewaan, yang meliputi:

- a. tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
- c. kebudayaan;
- d. pertanahan; dan
- e. tata ruang.

Penggunaan Dana Keistimewaan diprioritaskan untuk mendanai kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan dan/atau pemajuan kebudayaan.

## **BAB III KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA DAERAH**

### **3.1 Kondisi Umum Belanja Daerah**

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam struktur penganggaran, belanja daerah diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

- a. belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- b. belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- d. belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah. Berpedoman pada regulasi yang ada, belanja daerah bisa dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi daerah, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek.

Rencana Belanja Daerah dalam RAPBD Tahun Anggaran 2025 digunakan untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang ada di dalam program/kegiatan/subkegiatan yang dijabarkan dalam urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan di masing-masing SKPD sesuai prioritas pembangunan.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp5.407.279.924.896 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.994.788.028.081 terdapat penurunan sebesar Rp587.508.103.185 atau berkurang 9,80%. Belanja Daerah DIY Tahun Anggaran 2025 dialokasikan pada 4 (empat) kelompok Belanja Daerah sebagai berikut.



### **3.1.1 Belanja Operasi**

Pada APBD Tahun Anggaran 2024 Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp3.825.024.526.164 sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp3.767.767.249.148 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp57.257.277.016 atau berkurang sebesar 1,50%.

Belanja Operasi tersebut direncanakan untuk:

- 1) belanja pegawai sebesar Rp1.825.440.128.573;
- 2) belanja barang dan jasa sebesar Rp1.341.509.061.922;
- 3) belanja subsidi sebesar Rp96.029.746.301;
- 4) belanja hibah sebesar Rp466.845.206.352; dan
- 5) belanja bantuan sosial sebesar Rp37.943.106.000.

### **3.1.2 Belanja Modal**

Pada APBD Tahun Anggaran 2024 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp733.205.022.556 sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp610.302.450.642 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp122.902.571.914 atau berkurang sebesar 16,76%.

Belanja Modal tersebut direncanakan untuk:

- 1) belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp149.704.327.496;
- 2) belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp266.318.760.622;
- 3) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp184.943.634.766; dan
- 4) belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp9.235.727.758; dan
- 5) belanja modal aset lainnya sebesar Rp100.000.000.

### **3.1.3 Belanja Tidak Terduga**

Pada APBD Tahun Anggaran 2024 Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp15.607.995.743 sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp15.000.000.000 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp607.995.743 atau berkurang sebesar 3,90%.

### **3.1.4 Belanja Transfer**

Pada APBD Tahun Anggaran 2024 Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp1.420.950.483.618 sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.014.210.225.106 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp406.740.258.512 atau naik sebesar 28,62%. Belanja Transfer tersebut direncanakan untuk:

- 1) belanja bagi hasil sebesar Rp420.396.130.660; dan
- 2) belanja bantuan keuangan sebesar Rp593.814.094.446.

### **3.2 Permasalahan Utama Belanja Daerah**

Permasalahan utama Belanja Daerah tahun 2025 dapat diinventarisasi sebagai berikut:

- a. Antisipasi yang kurang akurat terhadap permasalahan masyarakat sebagai akibat dari penafsiran kewenangan dan produk-produk hukum yang belum mantap.
- b. Tuntutan kesebandingan antara kebutuhan riil masyarakat dan kewenangan yang dilimpahkan dengan target yang dicapai oleh Kabupaten/Kota.
- c. Orientasi sebagian program dan kegiatan masih jangka pendek sehingga kurang memperhatikan keberlanjutan dan dampak yang dapat ditimbulkan.
- d. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD, antara SKPD dengan instansi sektoral maupun antara SKPD Provinsi dengan SKPD Kabupaten/Kota dikaitkan dengan kewenangan masing-masing.

### **3.3 Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, serta Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan, maupun subkegiatan.

Kebijakan umum belanja daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Struktur belanja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

- a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, dan pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
- c. Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi tahun 2025 diarahkan untuk subsidi bagi operasional Bus Trans Jogja dan operasional lintas kabupaten/kota bagi Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama DIY.
- d. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah DIY dicantumkan dalam RKPD DIY Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah. Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- e. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali

dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah DIY dicantumkan dalam RKPD DIY Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial. Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

2. Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam pergub, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
  - a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
  - b. Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
    - (1) belanja modal tanah;
    - (2) belanja modal peralatan dan mesin;
    - (3) belanja modal bangunan dan gedung;
    - (4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
    - (5) belanja modal aset tetap lainnya; dan
    - (6) belanja aset lainnya.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan antara lain:

a. keadaan darurat meliputi:

- (1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- (2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- (3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

b. keperluan mendesak meliputi:

- (1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- (3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- (4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD. Belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. belanja bagi hasil, belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota; dan
- b. belanja bantuan keuangan, merupakan bantuan yang diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum di atas, belanja daerah dialokasikan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (mandatory spending), meliputi:

1. anggaran fungsi pendidikan

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas

dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan.

2. anggaran kesehatan

Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan.

3. anggaran infrastruktur

Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik sampai dengan TA 2027. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

Sedangkan kebijakan belanja yang bersumber dari dana transfer pusat terdiri atas:

1. Arah kebijakan penggunaan DBH

- a. mengarahkan penggunaan DBH untuk mendorong upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim.
- b. meningkatkan kualitas pengelolaan DBH earmarked melalui fokus penggunaan untuk sektor-sektor prioritas dan penguatan sinergi penggunaan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- c. meningkatkan sinergi pendanaan DBH dengan sumber pendanaan lainnya; dan
- d. mengelola DBH secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan.

2. Arah kebijakan penggunaan DAU

- a. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD, di antaranya kebijakan hold harmless sampai dengan 2027.

- b. Memperkuat penggunaan earmarking DAU pada sektor prioritas untuk mendorong pencapaian SPM dan pemenuhan mandatory spending.
  - c. Meningkatkan kualitas tata kelola DAU yang ditentukan penggunaannya.
  - d. Melanjutkan kebijakan penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya dan peningkatan kualitas penyelenggaraan APBD berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah.
3. Arah kebijakan penggunaan DAK Fisik
- a. Mengarahkan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik untuk mendukung penguatan layanan dasar publik dan transformasi sosial ekonomi daerah yang meliputi antara lain bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan perlindungan perempuan dan anak.
  - b. Memperkuat kualitas pelaksanaan DAK Fisik untuk mencapai dampak/outcome yang ditargetkan.
  - c. Menerapkan Matching Program antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dan sumber pendanaan lainnya, sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran.
  - d. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi.
  - e. Mendukung pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan (pemerataan) layanan publik.
4. Arah kebijakan penggunaan DAK Nonfisik
- a. Meningkatkan mutu layanan pada pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun serta mendorong akselerasi penuntasan sertifikasi guru.
  - b. Meningkatkan sinergi pendanaan DAU Nonfisik dengan sumber pendanaan lainnya melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran.
5. Arah kebijakan penggunaan Dana Keistimewaan
- a. Mengarahkan penggunaan Dana Keistimewaan DIY yang mengacu kepada rencana induk keistimewaan dan difokuskan dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas UMKM, serta peningkatan penyediaan layanan dasar publik.
  - b. Meningkatkan tata kelola pemanfaatan Dana Keistimewaan DIY yang inovatif, partisipatif, dan transparan melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi secara berkelanjutan.
  - c. Meningkatkan sinergi pendanaan Dana Keistimewaan dengan sumber pendanaan lainnya melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran.

- d. Mengelola Dana Keistimewaan secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan.

### 3.4 Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah

Rumusan tema pembangunan dalam RKPD Tahun 2025 disusun dengan memedomani tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2022-2027 yang dalam perumusannya mengacu pada visi, misi, dan sasaran pokok tahap keempat rencana pembangunan jangka panjang, memperhatikan Rancangan RKP Tahun 2025, serta isu-isu strategis yang aktual. Maka tema pembangunan DIY tahun 2025 ditetapkan: **“Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**.

Tema tersebut mengandung pernyataan kunci sebagai berikut:

1. Sektor Unggulan

Sektor unggulan dimaksudkan bahwa pengembangan aktivitas ekonomi pada sektor pariwisata, pertanian, dan koperasi UMKM didorong untuk mendongkrak dari pertumbuhan ekonomi utamanya pada kawasan selatan.

2. Kreatif dan inovatif

Kemampuan berpikir didorong untuk mencetuskan solusi, ide, gagasan, cara, produk sebagai solusi atas permasalahan yang ada serta mampu memberikan nilai tambah dengan cara yang baru ataupun berbeda.

3. Ekonomi Inklusif

Peningkatan kesejahteraan dari pembangunan diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan penurunan ketimpangan dan pengangguran.

Tema RKPD kemudian dijadikan dasar dalam merumuskan Prioritas Daerah DIY, yaitu:

1. Penurunan tingkat kemiskinan;
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak;
3. Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta;
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah);
5. Penguatan Good-governance pada berbagai tingkatan; dan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram.

Prioritas dan plafon anggaran belanja daerah disajikan pada tabel III-1, Tabel III-2, dan Tabel III-3 berikut.



Tabel III-1 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1		---					
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				
				"Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana "			
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	130.000.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
				Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani			
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	590.796.750,00	
				---			
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	79.669.000,00	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
				Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY			
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	930.429.300,00	
				Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY			
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	930.429.300,00	
				Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY			
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	930.429.300,00	
				---			
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.315.239.950,00	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
				Persentase capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	52.243.000,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN					
				Persentase pelanggaran Perdais dan Perda Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	957.552.000,00		
			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP					
				Persentase capaian kinerja perencanaan lingkungan hidup				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	90.100.000,00		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.287.919.400,00		
				Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.287.919.400,00		
				Persentase pemenuhan data kualitas lingkungan hidup dan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.287.919.400,00		
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
				Persentase capaian kinerja fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	9.190.000,00		
				Persentase fasilitasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota dalam satu provinsi				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	9.190.000,00		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				Persentase kinerja pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	188.133.000,00		
				Persentase terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	188.133.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
				Persentase capaian kinerja pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	81.390.000,00	
				Persentase Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi terkait PPLH yang Meningkatkan Kapasitasnya			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	81.390.000,00	
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
				Persentase capaian kinerja penghargaan lingkungan hidup			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	110.000.050,00	
				Persentase entitas yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	110.000.050,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
				Persentase sampah yang terkelola dan ketersediaan alat berat pengelola sampah yang beroperasi (%)			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	13.273.504.948,00	
				Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	13.273.504.948,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				
				Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo			
					DINAS KEBUDAYAAN	5.823.388.000,00	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta			
					DINAS KEBUDAYAAN	5.823.388.000,00	
				Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman			
					DINAS KEBUDAYAAN	5.823.388.000,00	
				Jumlah budaya benda dan tidak benda yang dikelola dan dilestarikan			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.553.972.100,00		
				Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n				
					DINAS KEBUDAYAAN	5.823.388.000,00		
				Jumlah Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan				
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.930.000.000,00		
				Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis				
					DINAS KEBUDAYAAN	5.823.388.000,00		
				Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan				
					DINAS KEBUDAYAAN	5.823.388.000,00		
				Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	25.231.658.860,00		
				Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah				
					BADAN PENGHUBUNG DAERAH	4.024.128.800,00		
				Persentase Omah Jaga Warga yang aktif				
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	25.231.658.860,00		
				Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni				
					DINAS KEBUDAYAAN	5.823.388.000,00		
				Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kalurahan/ kelurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.553.972.100,00		
				Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan				
					DINAS KEBUDAYAAN	5.823.388.000,00		
				Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY				
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.260.190.000,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				"Persentase kawasan konservasi yang ditetapkan dan dikelola (%) "			
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	19.880.000,00	
				Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan (%)			
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	19.880.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
				Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	6.160.722.927,00	
				Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	6.160.722.927,00	
				Persentase kesesuaian pengelolaan hutan			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	6.160.722.927,00	
				Persentase lahan kritis yang direhabilitasi			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	6.160.722.927,00	
				Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	6.160.722.927,00	
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	613.165.800,00	
				Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	613.165.800,00	
				Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	613.165.800,00	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				
				Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	142.210.000,00	
				Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	142.210.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN				
				Pengendalian Pengusahaan Air Tanah			
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	70.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				
				Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan			
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	70.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN				
				Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan			
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	10.000.000,00	
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				
				Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.867.486.800,00	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				
				Skor Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat dalam aspek Kebebasan IDI			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.230.614.500,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
				Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	198.812.400,00	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Skor Terjaminnya kebebasan berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	626.589.800,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
				Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.698.031.600,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	16.598.856.340,00	
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	53.346.503.252,00	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	53.346.503.252,00	
				---			
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	17.400.000,00	
					DINAS SOSIAL	0,00	
<b>2</b>	<b>Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak</b>						
		---					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				
				Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina			
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.538.397.000,00	
				Jumlah Sentra UKM yang maju di Satuan Ruang Strategis			
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	18.923.630.000,00	
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten (persen)			
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	726.024.000,00	
				Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Urusan Kelautan dan Perikanan (%)			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	726.024.000,00		
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				Persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	434.123.000,00		
				---				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	53.550.000,00		
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				Persentase jumlah layanan yang terselesaikan				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	402.628.800,00		
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					
				Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	704.506.700,00		
				---				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	300.000.000,00		
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	247.149.000,00		
				Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	247.149.000,00		
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					
				Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	91.624.300,00		
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam terhadap jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi				
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	8.000.000,00		
				Kontribusi koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam yang memiliki ijin simpan pinjam terhadap koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi (%)				
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	8.000.000,00		
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					
				"Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (tata kelola, manajemen resiko, kinerja keuangan, permodalan) "				
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	10.000.000,00		
				Presentase koperasi yang meningkat kualitasnya (%)				
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	10.000.000,00		
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					
				Jumlah KSP/USP yang meningkat hasil pemeriksaan kesehatannya				
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	2.500.000,00		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					
				jumlah koperasi modern				
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	22.100.000,00		
				Jumlah koperasi yang memenuhi standar amalgamasi (keinginan untuk bergabung), memiliki off taker, memiliki akses pembiayaan, koperasi multi pihak, digitalisasi dalam pelayanan dan usaha koperasi				
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	22.100.000,00		
			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan aspek SDM dan produksi				
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	85.985.000,00		
				Jumlah Wirausaha Pemula (kumulatif)				
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	85.985.000,00		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				"Jumlah Wirausaha Pemula (tahun n) "			
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	85.985.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
				Jumlah UMKM dibina yang berkembang usahanya			
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	66.000.000,00	
				Persentase Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan SDM, Kelembagaan, Produksi, Keuangan, Pasar dan Digital Marketing			
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	66.000.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
				Jumlah Proyek Siap Jual (IPRO)			
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14.425.000,00	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
				Jumlah Kepeminatan Investasi			
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	29.310.000,00	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	245.235.000,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
				Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM			
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	48.550.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
				Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Diolah, Disajikan, dan Dimanfaatkan Sebagai Bahan Informasi Publik dan Perumusan Kebijakan			
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	66.611.900,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Indeks Kepuasan Masyarakat			
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	74.028.194.843,00	
				Jumlah desa preneur			
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	74.028.194.843,00	
				Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas.			
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	74.028.194.843,00	
				Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang)			
					DINAS PARIWISATA	24.336.000.000,00	
				Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan			
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	20.515.998.256,00	
				Nilai Produksi IKM Industri Kreatif			
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	20.515.998.256,00	
				Persentase desa maritim dalam tahap mandiri			
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.161.047.900,00	
				Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten			
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6.164.563.000,00	
				Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja			
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6.164.563.000,00	
				Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)			
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.161.047.900,00	
				Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan			
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6.164.563.000,00	
				Persentase peserta yang meningkat pemahaman budaya baharinya			
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.161.047.900,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase prasarana pelabuhan dibangun yang berfungsi dengan baik			
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.161.047.900,00	
				Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi			
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.161.047.900,00	
				Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya			
					SEKRETARIAT DAERAH	262.893.500,00	
				---			
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	961.115.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				
				Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)			
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	98.471.000,00	
				Produksi perikanan tangkap (ton)			
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	98.471.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				
				Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)			
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.892.000.000,00	
				produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton)			
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.892.000.000,00	
				Produksi perikanan budidaya (ton)			
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.892.000.000,00	
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				
				Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)			
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	113.968.000,00	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				"Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun) "			
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	226.330.400,00	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				
				Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP)			
					DINAS PARIWISATA	456.468.100,00	
				Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang)			
					DINAS PARIWISATA	456.468.100,00	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
				Jumlah Wisatawan mancanegara tahun ke n			
					DINAS PARIWISATA	273.999.750,00	
				Jumlah Wisatawan nusantara tahun ke n			
					DINAS PARIWISATA	273.999.750,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				
				Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang)			
					DINAS PARIWISATA	226.495.800,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
				Jumlah desa wisata yang naik kelas/jumlah objek yang difasilitasi oleh kemitraan			
					DINAS PARIWISATA	99.999.700,00	
				Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)			
					DINAS PARIWISATA	149.999.700,00	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				
				Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%)			
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	50.023.000,00	
				---			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	137.788.000,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				
				Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)			
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	66.721.900,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				
				Rata-rata persentase rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT dan persentase rasio luas terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI (%)			
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	100.000.000,00	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
				Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)			
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2.487.999.000,00	
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
				Jumlah Perusahaan Ekspor			
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	30.000.000,00	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING				
				Inflasi Pangan Bergejolak			
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	114.000.000,00	
				Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting			
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	114.000.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
				Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru			
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	50.000.000,00	
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
				Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard			
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	210.000.500,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase penanganan sengketa konsumen			
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	210.000.500,00	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				
				Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina			
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	210.000.000,00	
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
				Jumlah tenaga kerja di sektor Industri			
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	309.674.950,00	
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG			
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	309.674.950,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				
				Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin			
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10.000.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
				Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS			
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	11.457.250,00	
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				
				Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan			
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	240.000.000,00	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
				Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2			
					SEKRETARIAT DAERAH	243.350.500,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				
				Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik			

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	200.425.000,00	
				---			
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	114.898.100,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					DINAS PARIWISATA	13.115.601.948,00	
<b>3</b>	<b>Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan</b>						
		---					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				
				---			
					SEKRETARIAT DAERAH	2.490.992.000,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
				Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial			
					DINAS SOSIAL	66.392.000,00	
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				
				Jumlah kabupaten kota yang dibina dalam penyusunan RTK			
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	77.118.500,00	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
				---			
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	30.000.400,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN				
				Persentase capaian bantuan hukum terkait penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan			
					SEKRETARIAT DAERAH	321.518.000,00	
				Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi			



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					SEKRETARIAT DAERAH	295.000.000,00		
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	56.535.200,00		
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL					
				Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	61.315.700,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					
				Persentase akumulasi instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	64.385.900,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					
				Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	50.094.500,00		
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	41.777.750,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.605.289.200,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					
				Indeks Penerapan Audit TIK				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	334.077.100,00		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Indeks Penerapan Manajemen SPBE				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	334.077.100,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
				Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	231.096.250,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					
				Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	837.465.500,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
				Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi				
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	33.616.480.700,00		
				Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	7.864.000.400,00		
				Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.922.751.000,00		
				Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.922.751.000,00		
				Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah				
					BADAN PENGHUBUNG DAERAH	311.200.000,00		
				Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan				
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	5.922.751.000,00		
				---				
					SEKRETARIAT DAERAH	1.818.865.000,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Jumlah Pemanfaatan Arsip sebagai sumber informasi				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	371.399.500,00		
				Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	742.799.000,00		
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					
				Nilai rerata Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00		
				Persentase Jumlah Unit Pelayanan Publik minimal Kategori B				
					SEKRETARIAT DAERAH	0,00		
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					
				Persentase naskah kerjasama dalam negeri yang terealisasi				
					SEKRETARIAT DAERAH	120.024.000,00		
				Persentase naskah kerjasama dalam negeri yang terealisasi				
					SEKRETARIAT DAERAH	204.577.000,00		
				Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah				
					SEKRETARIAT DAERAH	78.820.600,00		
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					
				Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum				
					SEKRETARIAT DAERAH	2.443.780.872,00		
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					
				Peningkatan Skor Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pengadaan Barang dan Jasa				
					SEKRETARIAT DAERAH	93.177.000,00		
				Persentase Kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kategori baik				
					SEKRETARIAT DAERAH	27.587.000,00		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kategori Baik			
					SEKRETARIAT DAERAH	29.987.000,00	
				Persentase pelayanan Pengadaan Barang Jasa			
					SEKRETARIAT DAERAH	150.751.000,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				
				Kematangan Perangkat Daerah			
					SEKRETARIAT DAERAH	1.701.174.000,00	
				Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik			
					DINAS SOSIAL	100.000.000,00	
				Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan			
					SEKRETARIAT DAERAH	463.074.000,00	
				Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal tinggi			
					BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.039.785.000,00	
				Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi			
					PANIRADYA KAISTIMEWAN	16.058.675.000,00	
				Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY			
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	997.828.600,00	
				Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik			
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.728.196.000,00	
				---			
					PANIRADYA KAISTIMEWAN	2.373.902.500,00	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				
				Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY			
					SEKRETARIAT DPRD	64.922.297.752,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	1.225.085.135,00		
				Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	938.891.400,00		
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
				Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	724.311.600,00		
				Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD)				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	724.311.600,00		
				Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD)				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	724.311.600,00		
				Persentase Program Perangkat Daerah yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan				
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	724.311.600,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
				Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	1.032.653.721.406,00		
				---				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	74.766.000,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					
				Pengelolaan barang milik daerah yang sesuai prosedur				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	2.805.994.900,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	3.184.727.350,00		
				Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	1.520.891.350,00		
				Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah				
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	803.242.000,00		
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	2.977.443.700,00		
				Persentase Keterisian Jabatan				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	2.977.443.700,00		
				Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	2.977.443.700,00		
				Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	2.977.443.700,00		
				Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	2.977.443.700,00		
				Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	2.977.443.700,00		
				Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	2.977.443.700,00		
				Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS				
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	2.977.443.700,00		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan			
					BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	8.720.717.750,00	
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
				"Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan daerah "			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	0,00	
				Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	198.982.900,00	
				Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional			
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	198.982.900,00	
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
				Persentase layanan yang diberikan Banhubda DIY			
					BADAN PENGHUBUNG DAERAH	113.985.600,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
				Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawaan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur			
					INSPEKTORAT	5.964.975.500,00	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				
				Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan			
					INSPEKTORAT	326.060.150,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
				Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI			
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	618.159.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Nilai PKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	9.740.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					DINAS KEBUDAYAAN	36.056.965.616,00	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	79.170.000,00	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	6.597.292.600,00	
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.184.722.508,00	
					BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	14.518.982.395,00	
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	107.233.731.222,00	
					BADAN PENGHUBUNG DAERAH	7.470.467.795,00	
					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	19.395.223.511,00	
					DINAS KESEHATAN	110.843.384.523,00	
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	10.160.192.813,00	
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	54.698.431.237,00	
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.568.372.312,00	
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	11.188.137.942,00	
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.058.014.707.807,00	
					DINAS PERHUBUNGAN	41.748.395.446,00	
					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	19.971.182.834,00	
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	97.644.500,00	
					DINAS SOSIAL	57.179.257.183,00	
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.862.029.046,00	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					INSPEKTORAT	18.532.400,00	
					PANIRADYA KAISTIMEWAN	845.124.800,00	
					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	16.741.820.061,00	
					SEKRETARIAT DAERAH	988.117.710.688,00	
					SEKRETARIAT DPRD	263.929.689.877,00	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET	848.024.300,00	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					SEKRETARIAT DAERAH	165.230.274.498,00	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah [deleted]			
					SEKRETARIAT DAERAH	2.628.273.000,00	
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)			
					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	26.070.940.238,00	
				Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					SEKRETARIAT DAERAH	82.401.356.974,00	
				---			
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	15.675.308.701,00	
					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.948.298.115,00	
					DINAS SOSIAL	2.357.263.900,00	
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	30.194.798.197,00	
					PANIRADYA KAISTIMEWAN	8.213.865.547,00	
<b>4</b>	<b>Peningkatan kualitas SDM</b>						
		---					
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB			
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	509.098.952.469,00	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat			
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	509.098.952.469,00	
				Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat			
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	509.098.952.469,00	
				Angka Putus Sekolah SMA/SMK			
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	509.098.952.469,00	
				Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik			
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	509.098.952.469,00	
				Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar			
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	509.098.952.469,00	
				Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta			
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	509.098.952.469,00	
				Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul			
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	512.963.552.469,00	
				Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul			
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	509.098.952.469,00	
				Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo			
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	512.963.552.469,00	
				Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman			
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	512.963.552.469,00	
				Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK			
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	509.098.952.469,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					
				Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	45.133.900,00		
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					
				Jumlah rekomendasi perizinan terhadap satuan pendidikan menengah yang dihasilkan				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	50.000.000,00		
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Persentase BBLR (Bayi berat lahir rendah)				
					DINAS KESEHATAN	41.580.000,00		
				Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)				
					DINAS KESEHATAN	62.486.000,00		
				Persentase fasyankes terakreditasi				
					DINAS KESEHATAN	523.173.100,00		
				Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi malaria				
					DINAS KESEHATAN	62.486.000,00		
				Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria				
					DINAS KESEHATAN	67.139.100,00		
				Persentase keberhasilan pengobatan TBC				
					DINAS KESEHATAN	136.125.100,00		
				Persentase keberhasilan pengobatan TBC				
					DINAS KESEHATAN	4.859.344.000,00		
				Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta				
					DINAS KESEHATAN	6.500.000,00		
				Persentase ODHA minum ARV ( ODHA on ARV)				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS KESEHATAN	136.125.100,00	
					Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV)		
					DINAS KESEHATAN	41.580.000,00	
					Persentase penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur		
					DINAS KESEHATAN	104.066.000,00	
					Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur		
					DINAS KESEHATAN	6.500.000,00	
					Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur		
					DINAS KESEHATAN	67.139.100,00	
					Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar		
					DINAS KESEHATAN	177.705.100,00	
					Persentase remaja putri anemia		
					DINAS KESEHATAN	41.580.000,00	
					Persentase skrining/ deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas		
					DINAS KESEHATAN	41.580.000,00	
					Persentase skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas		
					DINAS KESEHATAN	62.486.000,00	
					Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas		
					DINAS KESEHATAN	73.639.100,00	
					Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara		
					DINAS KESEHATAN	136.125.100,00	
					Persentase wanita usia subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker serviks dan kanker payudara		
					DINAS KESEHATAN	41.580.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Presentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)				
					DINAS KESEHATAN	73.639.100,00		
				Presentase remaja putri anemia				
					DINAS KESEHATAN	136.125.100,00		
				Terlaksananya penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan				
					DINAS KESEHATAN	41.580.000,00		
				---				
					DINAS KESEHATAN	52.674.520.871,00		
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				
					DINAS KESEHATAN	420.997.600,00		
				Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan				
					DINAS KESEHATAN	420.997.600,00		
				Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan				
					DINAS KESEHATAN	209.200.000,00		
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
				Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi				
					DINAS KESEHATAN	17.192.500,00		
				Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi				
					DINAS KESEHATAN	17.192.500,00		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
				Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				
					DINAS KESEHATAN	47.966.000,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional			
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	9.073.352.000,00	
				Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional			
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	9.073.352.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				
				Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional			
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	7.288.733.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				
				Pengurangan luasan genangan			
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	235.600.000,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				
				Peningkatan Layanan RS Jiwa Ghrasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang			
					DINAS KESEHATAN	19.083.809.000,00	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
				Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi			
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	253.985.000,00	
				---			
					DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.183.637.200,00	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
				Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik			
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	291.000.000,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik			
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	717.500.000,00	
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
				Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik			
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	2.500.000,00	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
				Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dengan baik			
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	1.000.000,00	
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				
				Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar			
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	65.228.800,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
				Persentase anak korban kekerasan yang dilayani			
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	2.500.000,00	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				
				PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERPAPAR ISI PESAN PROGRAM KKBPK / BANGGA KENCANA (ADVOKASI dan KIE)			
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	63.436.326,00	
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				
				Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)			
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	4.500.000,00	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif			
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	42.000.000,00	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
				Jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat kapasitas SDMnya			
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	33.300.000,00	
				Persentase peningkatan pemahaman peserta diklat koperasi dan UMKM			
					DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	33.300.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				
				persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha			
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.671.029.300,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				
				Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS			
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	51.711.191.000,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				
				Persentase Fasilitasi Organisasi Kepramukaan			
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.500.000.000,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				
				Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan			
					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	7.013.719.501,00	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo			
					DINAS KEBUDAYAAN	345.656.637.200,00	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta			
					DINAS KEBUDAYAAN	345.656.637.200,00	



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman				
					DINAS KEBUDAYAAN	360.306.837.200,00		
				Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi				
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	5.414.000.000,00		
				Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n				
					DINAS KEBUDAYAAN	345.656.637.200,00		
				Jumlah Diplomasi Kerjasama Luar Negeri yang aktif				
					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.200.000.000,00		
				Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis				
					DINAS KEBUDAYAAN	345.656.637.200,00		
				Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan				
					DINAS KEBUDAYAAN	345.656.637.200,00		
				Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya				
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	39.802.467.700,00		
				Persentase kab/kota memiliki kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional				
					DINAS KESEHATAN	464.450.000,00		
				Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni				
					DINAS KEBUDAYAAN	345.656.637.200,00		
				Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan				
					DINAS KEBUDAYAAN	345.656.637.200,00		
				---				
					DINAS KEBUDAYAAN	38.634.744.994,00		
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					
				Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	603.812.700,00	
				Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All)			
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	603.812.700,00	
				persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan			
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	603.812.700,00	
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				
				Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan			
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	40.089.700,00	
				Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan			
					DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	40.089.700,00	
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				
				Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)			
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	36.000.000,00	
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				
				Jumlah rumusan bahan kebijakan kapasitas sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti			
					SEKRETARIAT DAERAH	409.227.400,00	
				Persentase 4 jenis Fasilitas keagamaan			
					SEKRETARIAT DAERAH	3.102.429.000,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				
				Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik			
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	200.000.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	11.570.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
					DINAS SOSIAL	6.860.000,00		
				---				
					DINAS SOSIAL	36.601.000,00		
<b>5</b>	<b>Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)</b>							
		---						
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	15.165.360.750,00		
				Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	15.165.360.750,00		
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					
				Persentase terlayannya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	8.600.000.000,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				Persentase kemantapan jalan				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	81.256.551.191,00		
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					
				Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	574.992.445,00		
				Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	574.992.445,00		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				
				Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan			
					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	30.671.000,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG				
				1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis [deleted]			
					DINAS PERHUBUNGAN	31.812.940.600,00	
				2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan			
					DINAS PERHUBUNGAN	31.812.940.600,00	
				2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis			
					DINAS PERHUBUNGAN	31.812.940.600,00	
				3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis			
					DINAS PERHUBUNGAN	31.812.940.600,00	
				4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis			
					DINAS PERHUBUNGAN	31.812.940.600,00	
				5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis [deleted]			
					DINAS PERHUBUNGAN	31.812.940.600,00	
				Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan			
					DINAS PARIWISATA	60.000.000.000,00	
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten			
					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	3.807.710.000,00	
				Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten			
					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	3.807.710.000,00	
				Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda			
					SEKRETARIAT DAERAH	100.000.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					
				Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi				
					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	10.312.700,00		
				Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan				
					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	10.312.700,00		
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					
				Jumlah dokumen kinerja reforma agraria				
					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	21.031.500,00		
				Jumlah objek penanganan reforma agraria yang ditindaklanjuti				
					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	21.031.500,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN					
				Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa				
					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	13.068.894.000,00		
				Persentase pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan				
					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	1.825.291.000,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Persentase Ketertiban LLAJ				
					DINAS PERHUBUNGAN	3.045.287.100,00		
				Persentase Ketertiban LLAJ [deleted]				
					DINAS PERHUBUNGAN	91.487.093.773,00		
				Persentase Kualitas layanan (SPM) Trans Jogja				
					DINAS PERHUBUNGAN	802.155.000,00		
				Persentase Kualitas layanan (SPM) Trans Jogja [deleted]				
					DINAS PERHUBUNGAN	10.000.000,00		

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)			
					DINAS PERHUBUNGAN	94.532.380.873,00	
				Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B			
					DINAS PERHUBUNGAN	94.532.380.873,00	
				Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan			
					DINAS PERHUBUNGAN	94.532.380.873,00	
				Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan			
					DINAS PERHUBUNGAN	94.532.380.873,00	
				Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS			
					DINAS PERHUBUNGAN	94.532.380.873,00	
				Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi			
					DINAS PERHUBUNGAN	94.532.380.873,00	
				Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi			
					DINAS PERHUBUNGAN	91.091.636.373,00	
				Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY			
					DINAS PERHUBUNGAN	94.532.380.873,00	
				Presentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan			
					DINAS PERHUBUNGAN	2.628.589.500,00	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				
				Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP			
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	16.800.000.000,00	
				Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda			
					SEKRETARIAT DAERAH	2.000.000.000,00	
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda			
					SEKRETARIAT DAERAH	606.920.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	10.965.974.669,00	
<b>6</b>	<b>Penurunan tingkat kemiskinan</b>						
		---					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/ barang			
					DINAS SOSIAL	1.833.503.550,00	
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				
				Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan psikososial			
					DINAS SOSIAL	8.000.000,00	
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
				Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial			
					DINAS SOSIAL	46.336.133.500,00	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
				Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial			
					DINAS SOSIAL	43.765.000,00	
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
				Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar			
					DINAS SOSIAL	1.287.524.000,00	

No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					
				Persentase penguatan nilai-nilai keberintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat				
					DINAS SOSIAL	371.786.000,00		
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
				Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%)				
					DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	20.000.000,00		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					
				Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat				
					SEKRETARIAT DAERAH	50.000.000,00		
				Pemberdayaan ekonomi masyarakat				
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4.468.212.000,00		
				Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah				
					BADAN PENGHUBUNG DAERAH	1.318.385.000,00		
				Persentase penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya				
					DINAS SOSIAL	4.485.001.700,00		
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					
				Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	45.000.000,00		
				Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan				
					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	45.000.000,00		
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					
				Implementasi kelurahan model Gotong Royong Segoro Amarto				



No	Prioritas Prov/Kab/Kota	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana Program Prioritas	Jumlah (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	246.003.950,00	
				Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan			
					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.840.824.750,00	
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				
				Persentase layanan yang diberikan Banhubda DIY			
					BADAN PENGHUBUNG DAERAH	71.323.000,00	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
				Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
					DINAS SOSIAL	6.000.000,00	

**Tabel III-2 Plafon Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja**

No	Uraian	Plafon Anggaran (Rp)
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>3.767.767.249.148</b>
	a. Belanja Pegawai	1.825.440.128.573
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.341.509.061.922
	c. Belanja Subsidi	96.029.746.301
	d. Belanja Hibah	466.845.206.352
	e. Belanja Bantuan Sosial	37.943.106.000
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>610.302.450.642</b>
	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	149.704.327.496
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	266.318.760.622
	c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	184.943.634.766
	d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.235.727.758
	e. Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000
<b>3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>15.000.000.000</b>
<b>4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>1.014.210.225.106</b>
	a. Belanja Bagi Hasil	420.396.130.660
	b. Belanja Bantuan Keuangan	593.814.094.446
	<b>Total</b>	<b>5.407.279.924.896</b>

Tabel III-3 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
<b>1.01</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>1.561.153.918.976,00</b>	
<b>1.01.2.19.0.00.03.0000</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>	<b>1.366.465.837.544,00</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>341.442.011.350,00</b>	
<b>1.01.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	<b>115.421.942.850,00</b>	
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	10.015.066.200,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.391.128.300,00	
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.392.212.900,00	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	45.762.000,00	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	480.000.000,00	
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	98.526.100.000,00	
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.585.808.000,00	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.100.200,00	
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.752.550,00	
1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	335.814.400,00	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	638.198.300,00	
<b>1.01.02.1.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>173.055.929.750,00</b>	
1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	17.626.876.000,00	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.540.000.000,00	
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	2.513.401.500,00	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	25.600.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	312.812.000,00	
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	148.571.360.000,00	
1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	359.385.000,00	
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	1.100.500,00	
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.752.550,00	
1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	94.642.200,00	
<b>1.01.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	<b>52.964.138.750,00</b>	
1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	11.295.077.600,00	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.215.838.300,00	
1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	2.665.528.900,00	
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	5.600.000,00	
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	2.070.109.450,00	
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	23.260.540.000,00	
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	127.855.000,00	
1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	120.557.550,00	
1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	15.285.000,00	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	10.631.841.950,00	
1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	555.905.000,00	
<b>1.01.04</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>45.133.900,00</b>	
<b>1.01.04.1.01</b>	<b>Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</b>	<b>45.133.900,00</b>	
1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	44.008.900,00	
1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1.125.000,00	
<b>1.01.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	<b>50.000.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>1.01.05.1.01</b>	<b>Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>	<b>50.000.000,00</b>	
1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000,00	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.024.928.692.294,00</b>	
<b>1.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>141.125.000,00</b>	
1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.909.000,00	
1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	79.216.000,00	
1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	
<b>1.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.021.268.249.634,00</b>	
1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.021.108.419.634,00	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.530.000,00	
1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00	
1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	33.300.000,00	
<b>1.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>93.630.000,00</b>	
1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	93.630.000,00	
<b>1.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>73.652.850,00</b>	
1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	58.522.850,00	
1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15.130.000,00	
<b>1.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>261.827.450,00</b>	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.001.000,00	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.306.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.519.450,00	
1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.116.000,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.885.000,00	
<b>1.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>45.420.000,00</b>	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.420.000,00	
<b>1.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.737.880.160,00</b>	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.295.436.160,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.441.944.000,00	
<b>1.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>306.907.200,00</b>	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.887.200,00	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.928.000,00	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.092.000,00	
<b>1.01.2.19.0.00.03.0001</b>	<b>BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK</b>	<b>6.467.282.490,00</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>394.821.140,00</b>	
<b>1.01.02.1.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>394.821.140,00</b>	
1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	394.821.140,00	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>6.072.461.350,00</b>	
<b>1.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.970.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.970.000,00	
<b>1.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>15.900.000,00</b>	
1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.900.000,00	
<b>1.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>158.712.650,00</b>	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.842.500,00	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.545.300,00	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.859.000,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.011.850,00	
1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.954.000,00	
<b>1.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>45.442.000,00</b>	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.442.000,00	
<b>1.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.621.630.300,00</b>	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	287.546.600,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.334.083.700,00	
<b>1.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.869.876.400,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.233.400,00	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.820.643.000,00	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	
<b>1.01.01.1.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>2.351.930.000,00</b>	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.351.930.000,00	
<b>1.01.2.19.0.00.03.0003</b>	<b>BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN</b>	<b>7.599.243.100,00</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>600.347.100,00</b>	
<b>1.01.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	<b>535.319.100,00</b>	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	675.000,00	
1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	324.193.200,00	
1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	102.220.000,00	
1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	108.230.900,00	
<b>1.01.02.1.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>53.300.000,00</b>	
1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	53.300.000,00	
<b>1.01.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	<b>11.728.000,00</b>	
1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	11.728.000,00	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>6.998.896.000,00</b>	
<b>1.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.190.000,00</b>	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.190.000,00	
<b>1.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.650.000,00</b>	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.650.000,00	
<b>1.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>94.280.600,00</b>	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.908.000,00	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.562.600,00	
1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.956.000,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.854.000,00	
<b>1.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>45.266.000,00</b>	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.266.000,00	
<b>1.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.539.769.000,00</b>	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.943.801.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	595.968.000,00	
<b>1.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>303.740.400,00</b>	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.960.400,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.400.000,00	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	152.960.000,00	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.420.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.2.19.0.00.03.0004	BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA	19.166.036.809,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	17.927.419.259,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	14.378.415.159,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	233.892.800,00	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	4.110.000,00	
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	42.098.500,00	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	14.220.000,00	
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12.515.000,00	
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	9.150.000,00	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	14.062.428.859,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	3.549.004.100,00	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	135.067.100,00	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	3.090.000,00	
1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12.900.000,00	
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	12.690.000,00	
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.935.000,00	
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	7.722.000,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	3.366.600.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.238.617.550,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.230.000,00	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.230.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>1.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>115.950.000,00</b>	
1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	115.950.000,00	
<b>1.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>125.262.150,00</b>	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.932.600,00	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.723.200,00	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.662.000,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.848.350,00	
1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.596.000,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.500.000,00	
<b>1.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>44.960.000,00</b>	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.960.000,00	
<b>1.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>837.678.400,00</b>	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	194.346.400,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	643.332.000,00	
<b>1.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>107.537.000,00</b>	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.301.000,00	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	67.120.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.116.000,00	
<b>1.01.2.19.0.00.03.0005</b>	<b>BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL</b>	<b>37.532.891.920,00</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>36.190.480.920,00</b>	
<b>1.01.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	<b>20.028.787.920,00</b>	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	190.200.000,00	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	2.585.000,00	
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	41.370.000,00	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	11.554.000,00	
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.031.000,00	
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	7.857.000,00	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	19.769.190.920,00	
<b>1.01.02.1.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>16.161.693.000,00</b>	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	85.326.500,00	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	2.792.500,00	
1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	12.650.000,00	
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	12.600.000,00	
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6.102.000,00	
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	8.622.000,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	16.033.600.000,00	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.342.411.000,00</b>	
<b>1.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.230.000,00</b>	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.230.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>1.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>146.850.000,00</b>	
1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	146.850.000,00	
<b>1.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>98.419.000,00</b>	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.100.000,00	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.650.000,00	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.900.000,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.005.000,00	
1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.764.000,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55.000.000,00	
<b>1.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>45.440.000,00</b>	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.440.000,00	
<b>1.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>981.721.000,00</b>	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.185.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	859.536.000,00	
<b>1.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>62.751.000,00</b>	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.277.000,00	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.904.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.570.000,00	
<b>1.01.2.19.0.00.03.0006</b>	<b>BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO</b>	<b>16.589.910.100,00</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>15.437.266.100,00</b>	
<b>1.01.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	<b>8.001.275.100,00</b>	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	201.825.600,00	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	1.244.800,00	
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	34.568.700,00	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	14.550.000,00	
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.956.000,00	
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	6.530.000,00	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	7.731.600.000,00	
<b>1.01.02.1.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>7.435.991.000,00</b>	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	93.527.800,00	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1.244.800,00	
1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	5.763.400,00	
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	15.326.000,00	
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10.956.000,00	
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	7.973.000,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	7.301.200.000,00	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.152.644.000,00</b>	
<b>1.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.230.000,00</b>	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.230.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>1.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>126.210.000,00</b>	
1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	126.210.000,00	
<b>1.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>106.349.000,00</b>	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.718.000,00	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.631.000,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	
1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	
<b>1.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>45.207.000,00</b>	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.207.000,00	
<b>1.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>798.028.000,00</b>	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	93.660.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	704.368.000,00	
<b>1.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>69.620.000,00</b>	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.352.000,00	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.400.000,00	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.868.000,00	
<b>1.01.2.19.0.00.03.0007</b>	<b>BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL</b>	<b>21.219.562.050,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>19.907.464.050,00</b>	
<b>1.01.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	<b>9.707.382.150,00</b>	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	300.641.200,00	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	11.959.800,00	
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	70.063.200,00	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	19.172.500,00	
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	19.144.700,00	
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	7.100.750,00	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	9.279.300.000,00	
<b>1.01.02.1.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>10.200.081.900,00</b>	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	128.256.000,00	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	18.002.000,00	
1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20.450.000,00	
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	14.563.600,00	
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	22.569.950,00	
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	8.040.350,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	9.988.200.000,00	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.312.098.000,00</b>	
<b>1.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.230.000,00</b>	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.230.000,00	
<b>1.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>136.290.000,00</b>	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	136.290.000,00	
<b>1.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>110.286.300,00</b>	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.955.600,00	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.594.000,00	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.029.000,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.707.700,00	
1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.500.000,00	
<b>1.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>45.390.000,00</b>	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.390.000,00	
<b>1.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>850.813.700,00</b>	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.128.700,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	701.685.000,00	
<b>1.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>162.088.000,00</b>	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.962.000,00	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000,00	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.126.000,00	
<b>1.01.2.19.0.00.03.0008</b>	<b>BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN</b>	<b>20.413.913.600,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>19.334.742.700,00</b>	
<b>1.01.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	<b>15.076.404.900,00</b>	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	192.744.000,00	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	18.949.300,00	
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	94.823.000,00	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	17.248.500,00	
1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	18.934.600,00	
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	8.505.500,00	
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	14.725.200.000,00	
<b>1.01.02.1.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>4.258.337.800,00</b>	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	104.683.000,00	
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	19.451.000,00	
1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	23.073.000,00	
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	18.269.000,00	
1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	19.431.000,00	
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	9.430.800,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	4.064.000.000,00	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.079.170.900,00</b>	
<b>1.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.230.000,00</b>	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.230.000,00	
<b>1.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>136.770.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	136.770.000,00	
<b>1.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>129.487.600,00</b>	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.178.800,00	
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.253.400,00	
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.071.400,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.720.000,00	
1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.764.000,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.500.000,00	
<b>1.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>45.416.000,00</b>	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.416.000,00	
<b>1.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>704.327.300,00</b>	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.063.300,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	559.264.000,00	
<b>1.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>55.940.000,00</b>	
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.884.000,00	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.952.000,00	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.104.000,00	
<b>1.01.2.19.0.00.03.0009</b>	<b>SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA</b>	<b>3.911.800.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>2.974.600.000,00</b>	
1.01.02.1.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>2.974.600.000,00</b>	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	2.974.600.000,00	
1.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>937.200.000,00</b>	
1.01.01.1.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>937.200.000,00</b>	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	937.200.000,00	
1.01.2.19.0.00.03.0010	<b>SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI</b>	<b>2.614.765.000,00</b>	
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>2.370.000.000,00</b>	
1.01.02.1.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>2.370.000.000,00</b>	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	2.370.000.000,00	
1.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>244.765.000,00</b>	
1.01.01.1.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>244.765.000,00</b>	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	244.765.000,00	
1.01.2.19.0.00.03.0011	<b>SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON</b>	<b>5.124.250.000,00</b>	
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>4.534.000.000,00</b>	
1.01.02.1.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>4.534.000.000,00</b>	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	4.534.000.000,00	
1.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>590.250.000,00</b>	
1.01.01.1.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>590.250.000,00</b>	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	590.250.000,00	
1.01.2.19.0.00.03.0012	<b>SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA</b>	<b>2.845.649.263,00</b>	
1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>2.752.000.000,00</b>	
1.01.02.1.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>2.752.000.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	2.752.000.000,00	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>93.649.263,00</b>	
<b>1.01.01.1.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>93.649.263,00</b>	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	93.649.263,00	
<b>1.01.2.19.0.00.03.0013</b>	<b>SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH</b>	<b>3.981.775.000,00</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>3.864.600.000,00</b>	
<b>1.01.02.1.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>3.864.600.000,00</b>	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	3.864.600.000,00	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>117.175.000,00</b>	
<b>1.01.01.1.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>117.175.000,00</b>	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	117.175.000,00	
<b>1.01.2.19.0.00.03.0014</b>	<b>SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI</b>	<b>3.315.284.000,00</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>3.188.000.000,00</b>	
<b>1.01.02.1.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>3.188.000.000,00</b>	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	3.188.000.000,00	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>127.284.000,00</b>	
<b>1.01.01.1.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>127.284.000,00</b>	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	127.284.000,00	
<b>1.01.2.19.0.00.03.0015</b>	<b>SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK</b>	<b>5.318.500.000,00</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>5.214.000.000,00</b>	
<b>1.01.02.1.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>5.214.000.000,00</b>	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	5.214.000.000,00	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>104.500.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	104.500.000,00	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	104.500.000,00	
1.01.2.19.0.00.03.0016	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI	2.362.659.000,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.314.600.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	2.314.600.000,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	2.314.600.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	48.059.000,00	
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	48.059.000,00	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	48.059.000,00	
1.01.2.19.0.00.03.0017	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA	5.031.289.000,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	4.922.000.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	4.922.000.000,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	4.922.000.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	109.289.000,00	
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	109.289.000,00	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	109.289.000,00	
1.01.2.19.0.00.03.0018	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN	2.473.799.000,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.414.000.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	2.414.000.000,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	2.414.000.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	59.799.000,00	
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	59.799.000,00	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	59.799.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.2.19.0.00.03.0019	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN	2.222.722.000,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2.084.000.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	2.084.000.000,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	2.084.000.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	138.722.000,00	
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	138.722.000,00	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	138.722.000,00	
1.01.2.19.0.00.03.0020	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA	4.055.835.000,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.886.000.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	3.886.000.000,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	3.886.000.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	169.835.000,00	
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	169.835.000,00	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	169.835.000,00	
1.01.2.19.0.00.03.0021	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA	4.095.041.000,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	4.030.000.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	4.030.000.000,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	4.030.000.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	65.041.000,00	
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	65.041.000,00	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	65.041.000,00	
1.01.2.19.0.00.03.0022	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK	2.438.474.900,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.971.999.900,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.971.999.900,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	1.971.999.900,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	466.475.000,00	
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	466.475.000,00	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	466.475.000,00	
1.01.2.19.0.00.03.0023	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG	1.753.385.000,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.680.000.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.680.000.000,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	1.680.000.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	73.385.000,00	
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	73.385.000,00	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	73.385.000,00	
1.01.2.19.0.00.03.0024	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN	983.349.950,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	907.999.950,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	907.999.950,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	907.999.950,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	75.350.000,00	
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	75.350.000,00	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	75.350.000,00	
1.01.2.19.0.00.03.0025	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN	3.434.200.000,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	3.318.000.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	3.318.000.000,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	3.318.000.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	116.200.000,00	
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	116.200.000,00	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	116.200.000,00	
1.01.2.19.0.00.03.0026	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN	1.816.460.000,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.720.600.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.720.600.000,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	1.720.600.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	95.860.000,00	
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	95.860.000,00	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	95.860.000,00	
1.01.2.19.0.00.03.0027	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI	947.190.000,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	930.600.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	930.600.000,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	930.600.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.590.000,00	
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	16.590.000,00	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	16.590.000,00	
1.01.2.19.0.00.03.0028	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN	1.895.064.000,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.720.000.000,00	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.720.000.000,00	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	1.720.000.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	175.064.000,00	
1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	175.064.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	175.064.000,00	
<b>1.01.2.19.0.00.03.0029</b>	<b>SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI</b>	<b>2.838.039.250,00</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>2.794.000.000,00</b>	
<b>1.01.02.1.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>2.794.000.000,00</b>	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	2.794.000.000,00	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>44.039.250,00</b>	
<b>1.01.01.1.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>44.039.250,00</b>	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	44.039.250,00	
<b>1.01.2.19.0.00.03.0030</b>	<b>SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN</b>	<b>2.239.710.000,00</b>	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>2.138.000.000,00</b>	
<b>1.01.02.1.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>2.138.000.000,00</b>	
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	2.138.000.000,00	
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>101.710.000,00</b>	
<b>1.01.01.1.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>101.710.000,00</b>	
1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	101.710.000,00	
<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>219.375.301.704,00</b>	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>41.169.122.131,00</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>2.824.736.971,00</b>	
<b>1.02.02.1.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>62.486.000,00</b>	
1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	61.959.000,00	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	527.000,00	
<b>1.02.02.1.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>2.688.611.871,00</b>	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	513.513.750,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	389.320.000,00	
1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	175.237.500,00	
1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	55.708.000,00	
1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	8.655.000,00	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	28.552.000,00	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	28.000.000,00	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	40.712.000,00	
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	13.161.000,00	
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	7.190.000,00	
1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	46.090.000,00	
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	17.429.000,00	
1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	257.142.150,00	
1.02.02.1.02.0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	4.416.771,00	
<b>1.02.02.1.03</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>6.500.000,00</b>	
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6.500.000,00	
<b>1.02.02.1.04</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>67.139.100,00</b>	
1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20.554.500,00	
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	46.584.600,00	
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>211.797.600,00</b>	
<b>1.02.03.1.01</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b>	<b>22.613.100,00</b>	
1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	16.973.100,00	
1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.640.000,00	
<b>1.02.03.1.02</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>189.184.500,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	13.590.000,00	
<b>1.02.04</b>	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>17.192.500,00</b>	
<b>1.02.04.1.01</b>	<b>Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)</b>	<b>13.471.000,00</b>	
1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	13.471.000,00	
<b>1.02.04.1.02</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)</b>	<b>3.721.500,00</b>	
1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	3.721.500,00	
<b>1.02.05</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>47.966.000,00</b>	
<b>1.02.05.1.01</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>47.966.000,00</b>	
1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	47.966.000,00	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>38.067.429.060,00</b>	
<b>1.02.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>19.093.550,00</b>	
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.093.550,00	
1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.500.000,00	
1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.500.000,00	
<b>1.02.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>34.534.505.960,00</b>	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.515.573.360,00	
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.305.000,00	
1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.887.600,00	
1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.740.000,00	
<b>1.02.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>18.720.000,00</b>	
1.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.720.000,00	
<b>1.02.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2.838.000,00</b>	
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.838.000,00	
<b>1.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>430.960.550,00</b>	
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.050.000,00	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.314.000,00	
1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000,00	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.749.550,00	
1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.556.000,00	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.991.000,00	
1.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	300.000,00	
<b>1.02.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>642.830.000,00</b>	
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.070.000,00	
1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	575.000.000,00	
1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.760.000,00	
<b>1.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.076.982.800,00</b>	
1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.990.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	828.112.000,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.246.880.800,00	
<b>1.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>341.498.200,00</b>	
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.143.000,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	178.327.200,00	
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.693.000,00	
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.335.000,00	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI</b>	<b>9.243.310.300,00</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>345.468.000,00</b>	
<b>1.02.02.1.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>345.468.000,00</b>	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	42.000.000,00	
1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	5.050.000,00	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	298.418.000,00	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>8.897.842.300,00</b>	
<b>1.02.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.145.000,00</b>	
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.145.000,00	
<b>1.02.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>14.165.000,00</b>	
1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.165.000,00	
<b>1.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.723.532.300,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	718.760.300,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.004.772.000,00	
<b>1.02.01.1.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>7.150.000.000,00</b>	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	7.150.000.000,00	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0002</b>	<b>BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL</b>	<b>51.031.414.000,00</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>49.985.909.000,00</b>	
<b>1.02.02.1.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>49.985.909.000,00</b>	
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	49.985.909.000,00	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.045.505.000,00</b>	
<b>1.02.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.470.000,00</b>	
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.470.000,00	
<b>1.02.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>11.660.000,00</b>	
1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.660.000,00	
<b>1.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>96.694.000,00</b>	
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.896.400,00	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.074.600,00	
1.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.435.000,00	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.963.000,00	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.325.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>1.02.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>61.700.000,00</b>	
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.700.000,00	
<b>1.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>710.516.000,00</b>	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.240.000,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	594.276.000,00	
<b>1.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>157.465.000,00</b>	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.404.000,00	
1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.520.000,00	
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.047.000,00	
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.494.000,00	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0003</b>	<b>BALAI PELATIHAN KESEHATAN</b>	<b>5.698.986.300,00</b>	
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>209.200.000,00</b>	
<b>1.02.03.1.02</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>209.200.000,00</b>	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	209.200.000,00	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>5.489.786.300,00</b>	
<b>1.02.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.450.000,00</b>	
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.450.000,00	
<b>1.02.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>11.770.000,00</b>	
1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.770.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>1.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.421.326.500,00</b>	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211.486.500,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.209.840.000,00	
<b>1.02.01.1.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>4.046.239.800,00</b>	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4.046.239.800,00	
<b>1.02.0.00.0.00.01.0005</b>	<b>RUMAH SAKIT PARU RESPIRA</b>	<b>44.367.959.921,00</b>	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>4.859.344.000,00</b>	
<b>1.02.02.1.01</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>4.859.344.000,00</b>	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	3.680.000,00	
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	4.855.514.000,00	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	150.000,00	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>39.508.615.921,00</b>	
<b>1.02.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>23.556.390.921,00</b>	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.536.505.921,00	
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.885.000,00	
<b>1.02.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>22.825.000,00</b>	
1.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.825.000,00	
<b>1.02.01.1.10</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>15.929.400.000,00</b>	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	15.929.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.2.22.1.03.01.0000	DINAS KESEHATAN	41.169.122.131,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.824.736.971,00	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.688.611.871,00	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	22.176.000,00	
1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.081.308.700,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	211.797.600,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	189.184.500,00	
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	175.594.500,00	
1.02.2.22.1.03.01.0004	RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA	67.864.509.052,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	41.580.000,00	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	41.580.000,00	
1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	41.580.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	67.822.929.052,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	47.208.329.052,00	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.208.329.052,00	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	20.614.600.000,00	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	20.614.600.000,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	437.538.670.892,00	
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	19.083.809.000,00	
1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	16.339.123.000,00	
1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	16.339.123.000,00	
1.03.13.5.04	Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	2.744.686.000,00	
1.03.13.5.04.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	2.744.686.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>1.03.1.04.3.29.13.0000</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>	<b>303.656.503.378,00</b>	
<b>1.03.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>15.245.360.750,00</b>	
<b>1.03.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.117.726.500,00</b>	
1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	28.541.800,00	
1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	250.000.000,00	
1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1.124.558.200,00	
1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	2.714.626.500,00	
<b>1.03.02.1.02</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.127.634.250,00</b>	
1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	9.330.634.250,00	
1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	1.524.000.000,00	
1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	193.000.000,00	
1.03.02.1.02.0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi	80.000.000,00	
<b>1.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>9.073.352.000,00</b>	
<b>1.03.03.1.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</b>	<b>9.073.352.000,00</b>	
1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	200.000.000,00	
1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	8.852.807.000,00	
1.03.03.1.01.0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	20.545.000,00	
<b>1.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>250.000.000,00</b>	
<b>1.03.05.1.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional</b>	<b>250.000.000,00</b>	
1.03.05.1.01.0012	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	250.000.000,00	
<b>1.03.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>235.600.000,00</b>	
<b>1.03.06.1.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi</b>	<b>235.600.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.06.1.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	235.600.000,00	
<b>1.03.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>8.600.000.000,00</b>	
<b>1.03.08.1.01</b>	<b>Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</b>	<b>8.600.000.000,00</b>	
1.03.08.1.01.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
1.03.08.1.01.0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	8.500.000.000,00	
<b>1.03.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>81.256.551.191,00</b>	
<b>1.03.10.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Provinsi</b>	<b>81.256.551.191,00</b>	
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	4.461.813.905,00	
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	14.009.702.286,00	
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	26.985.035.000,00	
1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	34.880.000.000,00	
1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	20.000.000,00	
1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	900.000.000,00	
<b>1.03.13</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>	<b>136.390.000.000,00</b>	
<b>1.03.13.5.02</b>	<b>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</b>	<b>136.390.000.000,00</b>	
1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	1.690.000.000,00	
1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	29.700.000.000,00	
1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1.200.000.000,00	
1.03.13.5.02.0005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	1.200.000.000,00	
1.03.13.5.02.0006	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	101.100.000.000,00	
1.03.13.5.02.0018	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	1.500.000.000,00	
<b>1.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>52.605.639.437,00</b>	
<b>1.03.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>348.948.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.560.400,00	
1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	55.679.100,00	
1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	258.708.500,00	
<b>1.03.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>45.127.857.737,00</b>	
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45.005.526.637,00	
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	22.376.600,00	
1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.304.500,00	
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	78.650.000,00	
<b>1.03.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>91.937.000,00</b>	
1.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	500.000,00	
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	91.437.000,00	
<b>1.03.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>693.103.000,00</b>	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.827.000,00	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.426.000,00	
1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.700.000,00	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.600.000,00	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	509.550.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>1.03.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>10.140.000,00</b>	
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.140.000,00	
<b>1.03.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.447.517.100,00</b>	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	973.001.100,00	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.470.516.000,00	
<b>1.03.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.886.136.600,00</b>	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.228.109.600,00	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	258.027.000,00	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000,00	
<b>1.03.1.04.3.29.13.0004</b>	<b>BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>13.705.283.245,00</b>	
<b>1.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>7.038.733.000,00</b>	
<b>1.03.05.1.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional</b>	<b>7.038.733.000,00</b>	
1.03.05.1.01.0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	7.038.733.000,00	
<b>1.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>574.992.445,00</b>	
<b>1.03.11.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi</b>	<b>517.929.945,00</b>	
1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	435.579.945,00	
1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	82.350.000,00	
<b>1.03.11.1.02</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</b>	<b>57.062.500,00</b>	
1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	57.062.500,00	
<b>1.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>6.091.557.800,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>1.03.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.500.000,00</b>	
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.500.000,00	
<b>1.03.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>18.696.000,00</b>	
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.696.000,00	
<b>1.03.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>211.573.250,00</b>	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.168.400,00	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.996.900,00	
1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.690.000,00	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.999.950,00	
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.528.000,00	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.190.000,00	
<b>1.03.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.105.808.700,00</b>	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.998.000,00	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.050.974.200,00	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.049.836.500,00	
<b>1.03.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>744.979.850,00</b>	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	370.455.850,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.524.000,00	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000,00	
<b>1.03.2.10.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b>	<b>14.804.355.669,00</b>	
<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>30.671.000,00</b>	
<b>1.03.12.1.03</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>	<b>30.671.000,00</b>	
1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	30.671.000,00	
<b>1.03.13</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>	<b>3.807.710.000,00</b>	
<b>1.03.13.5.01</b>	<b>Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</b>	<b>2.942.710.000,00</b>	
1.03.13.5.01.0003	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	545.000.000,00	
1.03.13.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	1.755.320.000,00	
1.03.13.5.01.0006	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	642.390.000,00	
<b>1.03.13.5.03</b>	<b>Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis</b>	<b>865.000.000,00</b>	
1.03.13.5.03.0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	865.000.000,00	
<b>1.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>10.965.974.669,00</b>	
<b>1.03.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.747.600,00</b>	
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.200.000,00	
1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.977.600,00	
1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.570.000,00	
<b>1.03.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.805.002.219,00</b>	
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.777.142.419,00	
1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.959.800,00	
1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.042.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.858.000,00	
<b>1.03.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>20.646.000,00</b>	
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.646.000,00	
<b>1.03.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>3.791.850,00</b>	
1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.791.850,00	
<b>1.03.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>107.689.600,00</b>	
1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.987.800,00	
1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.765.350,00	
1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.081.000,00	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.816.450,00	
1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.819.000,00	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.220.000,00	
<b>1.03.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>718.151.000,00</b>	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.900.000,00	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	233.241.000,00	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	482.010.000,00	
<b>1.03.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>294.946.400,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.284.600,00	
1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.960.800,00	
1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.701.000,00	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>31.812.940.600,00</b>	
<b>1.03.13</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>	<b>31.812.940.600,00</b>	
<b>1.03.13.5.02</b>	<b>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</b>	<b>31.812.940.600,00</b>	
1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	19.684.805.600,00	
1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	1.544.700.000,00	
1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1.544.700.000,00	
1.03.13.5.02.0006	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	1.544.700.000,00	
1.03.13.5.02.0007	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	250.000.000,00	
1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	1.544.700.000,00	
1.03.13.5.02.0009	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	250.000.000,00	
1.03.13.5.02.0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	929.965.000,00	
1.03.13.5.02.0012	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	1.544.700.000,00	
1.03.13.5.02.0014	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	250.000.000,00	
1.03.13.5.02.0015	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	929.970.000,00	
1.03.13.5.02.0017	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	1.544.700.000,00	
1.03.13.5.02.0019	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	250.000.000,00	
<b>2.17.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>	<b>18.923.630.000,00</b>	
1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	4.750.000.000,00	
1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	14.173.630.000,00	
<b>3.25.2.22.1.03.01.0000</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>726.024.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.13.5.02.0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	726.024.000,00	
<b>3.26.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	
1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	30.000.000.000,00	
<b>3.27.1.03.2.10.02.0000</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>	<b>696.736.000,00</b>	
1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	522.000.000,00	
1.03.13.5.02.0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	174.736.000,00	
<b>3.31.3.30.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	<b>1.538.397.000,00</b>	
1.03.13.5.02.0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	327.629.000,00	
1.03.13.5.02.0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	1.210.768.000,00	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0007</b>	<b>BIRO UMUM DAN PROTOKOL</b>	<b>2.490.992.000,00</b>	
1.03.13.5.02.0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	2.490.992.000,00	
<b>4.01.1.03.2.22.01.0005</b>	<b>BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>1.03.13.5.03</b>	<b>Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis</b>	<b>100.000.000,00</b>	
1.03.13.5.03.0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	100.000.000,00	
<b>1.04</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>130.000.000,00</b>	
<b>1.03.1.04.3.29.13.0000</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>	<b>130.000.000,00</b>	
<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>130.000.000,00</b>	
<b>1.04.02.1.01</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>130.000.000,00</b>	
1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	100.000.000,00	
1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	30.000.000,00	
<b>1.05</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>36.326.454.401,00</b>	
<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>17.412.285.811,00</b>	
<b>1.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>670.465.750,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>1.05.02.1.01</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>590.796.750,00</b>	
1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	20.000.000,00	
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5.000.000,00	
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	299.253.400,00	
1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	266.543.350,00	
<b>1.05.02.1.02</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>79.669.000,00</b>	
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	40.509.000,00	
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	39.160.000,00	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>16.741.820.061,00</b>	
<b>1.05.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>11.200.000,00</b>	
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.500.000,00	
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000,00	
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.700.000,00	
<b>1.05.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.143.541.361,00</b>	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.114.701.361,00	
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.340.000,00	
1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.500.000,00	
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4.000.000,00	
<b>1.05.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>13.535.000,00</b>	
1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.535.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>1.05.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>177.498.200,00</b>	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.496.200,00	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160.002.000,00	
<b>1.05.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4.520.000,00</b>	
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.520.000,00	
<b>1.05.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.743.925.000,00</b>	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.225.000,00	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.576.700.000,00	
<b>1.05.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>647.600.500,00</b>	
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.156.800,00	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	376.525.050,00	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.212.650,00	
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.706.000,00	
<b>1.05.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>18.914.168.590,00</b>	
<b>1.05.03</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>2.245.669.250,00</b>	
<b>1.05.03.1.01</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>	<b>247.968.890,00</b>	
1.05.03.1.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	247.968.890,00	
<b>1.05.03.1.02</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>1.315.239.950,00</b>	
1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	154.403.750,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	800.135.000,00	
1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	360.701.200,00	
<b>1.05.03.1.03</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>578.137.450,00</b>	
1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	511.837.000,00	
1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	66.300.450,00	
<b>1.05.03.1.04</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>104.322.960,00</b>	
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	104.322.960,00	
<b>1.05.04</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>52.243.000,00</b>	
<b>1.05.04.1.02</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>52.243.000,00</b>	
1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	52.243.000,00	
<b>1.05.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>16.616.256.340,00</b>	
<b>1.05.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>14.300.000,00</b>	
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.500.000,00	
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.100.000,00	
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.700.000,00	
<b>1.05.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>14.343.337.290,00</b>	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.318.891.290,00	
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.578.000,00	
1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.050.000,00	
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	11.818.000,00	
<b>1.05.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>17.400.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.400.000,00	
<b>1.05.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>184.294.200,00</b>	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.490.200,00	
1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.872.000,00	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.871.000,00	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.061.000,00	
<b>1.05.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.746.064.600,00</b>	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	699.496.600,00	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.046.568.000,00	
<b>1.05.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>310.860.250,00</b>	
1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.497.000,00	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184.553.450,00	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.401.800,00	
1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.408.000,00	
<b>1.06</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>	<b>109.760.872.333,00</b>	
<b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>88.243.156.133,00</b>	
<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>1.833.503.550,00</b>	
<b>1.06.02.1.02</b>	<b>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</b>	<b>1.833.503.550,00</b>	
1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	184.811.650,00	
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	288.280.550,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>34.504.136.650,00</b>	
<b>1.06.04.1.03</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti</b>	<b>31.001.571.650,00</b>	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	31.000.000.000,00	
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	500.000,00	
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	500.000,00	
<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>110.157.000,00</b>	
<b>1.06.05.1.02</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</b>	<b>66.392.000,00</b>	
1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	66.392.000,00	
<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>1.287.524.000,00</b>	
<b>1.06.06.1.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</b>	<b>1.287.524.000,00</b>	
1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	154.712.000,00	
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>50.128.048.933,00</b>	
<b>1.06.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>307.782.792,00</b>	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.301.668,00	
<b>1.06.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>57.170.000,00</b>	
1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.754.000,00	
<b>1.06.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>911.905.850,00</b>	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	165.120.400,00	
<b>1.06.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS</b>	<b>3.574.288.450,00</b>	
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>1.620.815.600,00</b>	
<b>1.06.04.1.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</b>	<b>1.620.815.600,00</b>	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	1.110.259.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	216.528.000,00	
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	3.439.000,00	
1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	150.000,00	
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	194.796.600,00	
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	94.843.000,00	
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	150.000,00	
1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	150.000,00	
1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	200.000,00	
1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	150.000,00	
1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	150.000,00	
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.953.472.850,00</b>	
<b>1.06.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.860.000,00</b>	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.860.000,00	
<b>1.06.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.183.000,00</b>	
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.183.000,00	
<b>1.06.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>33.619.550,00</b>	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.526.000,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.690.000,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.976.000,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	518.550,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	294.000,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	615.000,00	
<b>1.06.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.766.556.900,00</b>	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.252.900,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.588.704.000,00	
<b>1.06.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>136.253.400,00</b>	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.689.400,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.892.000,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.472.000,00	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.200.000,00	
<b>1.06.0.00.0.00.01.0002</b>	<b>BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA</b>	<b>1.720.862.500,00</b>	
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>842.926.500,00</b>	
<b>1.06.04.1.05</b>	<b>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti</b>	<b>842.926.500,00</b>	
1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	482.290.000,00	
1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	169.423.000,00	
1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	711.000,00	
1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	28.470.600,00	
1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	77.813.800,00	
1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	70.246.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	13.162.100,00	
1.06.04.1.05.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	200.000,00	
1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	210.000,00	
1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	200.000,00	
1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	200.000,00	
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>877.936.000,00</b>	
<b>1.06.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.734.000,00</b>	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.734.000,00	
<b>1.06.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.134.000,00</b>	
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.134.000,00	
<b>1.06.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>19.478.000,00</b>	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.595.000,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.718.000,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.002.000,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.899.000,00	
1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.764.000,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>1.06.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>751.878.000,00</b>	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.250.000,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	656.328.000,00	
<b>1.06.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>91.712.000,00</b>	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.855.000,00	
1.06.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.126.000,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.161.000,00	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.570.000,00	
<b>1.06.0.00.0.00.01.0003</b>	<b>BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS</b>	<b>5.561.559.650,00</b>	
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>3.144.567.750,00</b>	
<b>1.06.04.1.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</b>	<b>2.591.862.050,00</b>	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	1.867.776.000,00	
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	173.648.000,00	
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	13.749.000,00	
1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	2.290.000,00	
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	14.977.000,00	
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	57.925.000,00	
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	455.520.000,00	
1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	300.000,00	
1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4.777.050,00	
1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	300.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	300.000,00	
1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	300.000,00	
<b>1.06.04.1.04</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Pant</b>	<b>552.705.700,00</b>	
1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	342.018.000,00	
1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	58.983.000,00	
1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	17.895.600,00	
1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant	1.881.000,00	
1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	75.667.000,00	
1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	31.200.000,00	
1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	16.441.100,00	
1.06.04.1.04.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	600.000,00	
1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4.700.000,00	
1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	2.000.000,00	
1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Pant	1.320.000,00	
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>2.416.991.900,00</b>	
<b>1.06.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12.068.000,00</b>	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.068.000,00	
<b>1.06.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>14.350.000,00</b>	
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.350.000,00	
<b>1.06.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>33.310.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.349.000,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.755.000,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.247.000,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.895.000,00	
1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.764.000,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.300.000,00	
<b>1.06.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.165.666.600,00</b>	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	170.334.600,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.994.832.000,00	
<b>1.06.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>191.597.300,00</b>	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.711.400,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.332.000,00	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.553.900,00	
<b>1.06.0.00.0.00.01.0004</b>	<b>BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA</b>	<b>3.280.243.500,00</b>	
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>1.915.158.000,00</b>	
<b>1.06.04.1.05</b>	<b>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant</b>	<b>1.915.158.000,00</b>	
1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	675.636.000,00	
1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	194.936.000,00	
1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	191.536.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	55.039.000,00	
1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	633.471.000,00	
1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	116.920.000,00	
1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	39.170.000,00	
1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	8.450.000,00	
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.365.085.500,00</b>	
<b>1.06.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.776.000,00</b>	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.776.000,00	
<b>1.06.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.385.000,00</b>	
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.385.000,00	
<b>1.06.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>36.837.000,00</b>	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.306.000,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.416.000,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.595.000,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.920.000,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.600.000,00	
<b>1.06.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.079.356.000,00</b>	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.007.256.000,00	
<b>1.06.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>233.731.500,00</b>	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.314.500,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.417.000,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	160.000.000,00	
<b>1.06.0.00.0.00.01.0005</b>	<b>BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK</b>	<b>2.858.814.100,00</b>	
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>1.418.049.000,00</b>	
<b>1.06.04.1.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti</b>	<b>1.418.049.000,00</b>	
1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	225.000,00	
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	690.830.000,00	
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	235.918.000,00	
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	32.321.000,00	
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	71.800.000,00	
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	87.200.000,00	
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	374.000,00	
1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	815.000,00	
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	294.051.000,00	
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.215.000,00	
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2.437.500,00	
1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	637.500,00	
1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	225.000,00	
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.440.765.100,00</b>	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>1.06.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.626.800,00</b>	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.626.800,00	
<b>1.06.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>12.546.600,00</b>	
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.546.600,00	
<b>1.06.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>41.332.900,00</b>	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.260.000,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.048.200,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.676.800,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.619.900,00	
1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	528.000,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.200.000,00	
<b>1.06.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>970.692.000,00</b>	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.520.000,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	884.172.000,00	
<b>1.06.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>408.566.800,00</b>	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	201.253.800,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.136.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	171.017.000,00	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.160.000,00	
<b>1.06.0.00.0.00.01.0006</b>	<b>BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA</b>	<b>4.521.948.000,00</b>	
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>2.945.519.000,00</b>	
<b>1.06.04.1.03</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti</b>	<b>2.945.519.000,00</b>	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	2.133.744.000,00	
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	324.680.000,00	
1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	52.460.000,00	
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	86.280.000,00	
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	82.575.000,00	
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	224.640.000,00	
1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	7.000.000,00	
1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4.140.000,00	
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	30.000.000,00	
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.576.429.000,00</b>	
<b>1.06.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.415.000,00</b>	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.415.000,00	
<b>1.06.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.960.000,00</b>	
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.960.000,00	
<b>1.06.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>48.784.400,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.850.000,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.624.400,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.960.000,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.600.000,00	
1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	750.000,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000,00	
<b>1.06.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.367.931.000,00</b>	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.879.000,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.233.352.000,00	
<b>1.06.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>137.338.600,00</b>	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	103.381.600,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.957.000,00	
<b>1.06.2.22.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>88.243.156.133,00</b>	
<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>110.157.000,00</b>	
<b>1.06.05.1.01</b>	<b>Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal</b>	<b>43.765.000,00</b>	
1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	378.000,00	
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>50.128.048.933,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>1.06.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.213.766.500,00</b>	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	490.000,00	
<b>1.06.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>911.905.850,00</b>	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	462.956.450,00	
<b>1.06.02</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>1.833.503.550,00</b>	
<b>1.06.02.1.02</b>	<b>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</b>	<b>1.833.503.550,00</b>	
1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	1.360.411.350,00	
<b>1.06.03</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	<b>8.000.000,00</b>	
<b>1.06.03.1.01</b>	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal</b>	<b>8.000.000,00</b>	
1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	8.000.000,00	
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>34.504.136.650,00</b>	
<b>1.06.04.1.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</b>	<b>867.430.000,00</b>	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	523.397.000,00	
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	84.430.000,00	
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	19.364.000,00	
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	29.148.000,00	
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	60.000.000,00	
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	24.860.000,00	
1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	6.680.000,00	
1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	119.551.000,00	
<b>1.06.04.1.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti</b>	<b>274.551.900,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	147.480.000,00	
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	38.732.000,00	
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	10.056.000,00	
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	21.977.400,00	
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	31.200.000,00	
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	10.985.500,00	
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.173.000,00	
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	500.000,00	
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	600.000,00	
1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	11.848.000,00	
<b>1.06.04.1.03</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti</b>	<b>31.001.571.650,00</b>	
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	571.650,00	
<b>1.06.04.1.05</b>	<b>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti</b>	<b>2.360.583.100,00</b>	
1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	1.253.754.000,00	
1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	281.000.000,00	
1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	141.034.000,00	
1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	242.212.000,00	
1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	232.985.000,00	
1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	74.900.000,00	
1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	107.890.000,00	
1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	26.808.100,00	
<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>110.157.000,00</b>	
<b>1.06.05.1.01</b>	<b>Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal</b>	<b>43.765.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	43.387.000,00	
<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>1.287.524.000,00</b>	
<b>1.06.06.1.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</b>	<b>1.287.524.000,00</b>	
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	132.212.000,00	
1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	523.250.000,00	
1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	750.000,00	
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	476.600.000,00	
<b>1.06.07</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>371.786.000,00</b>	
<b>1.06.07.1.01</b>	<b>Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</b>	<b>371.786.000,00</b>	
1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	371.786.000,00	
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>50.128.048.933,00</b>	
<b>1.06.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>67.781.350,00</b>	
1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.996.400,00	
1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	22.835.000,00	
1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.949.950,00	
<b>1.06.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>45.523.277.641,00</b>	
1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45.458.221.291,00	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.551.200,00	
1.06.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.224.900,00	
1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.372.450,00	
1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	34.598.600,00	
1.06.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.309.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>1.06.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>26.390.600,00</b>	
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.390.600,00	
<b>1.06.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>19.974.200,00</b>	
1.06.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	19.974.200,00	
<b>1.06.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>307.782.792,00</b>	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.293.000,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.253.900,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.770.000,00	
1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.488.000,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.506.224,00	
1.06.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	33.170.000,00	
<b>1.06.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>57.170.000,00</b>	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	3.416.000,00	
<b>1.06.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.213.766.500,00</b>	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	466.800.500,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.746.476.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>1.06.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>911.905.850,00</b>	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	217.911.000,00	
1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.918.000,00	
<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>		
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>776.878.855.370,00</b>	
<b>2.18.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	
<b>2.22.08</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	
<b>2.22.08.5.09</b>	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>1.200.000.000,00</b>	
2.22.08.5.09.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	1.200.000.000,00	
<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>38.496.376.843,00</b>	
<b>2.07.3.32.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	<b>32.961.195.493,00</b>	
<b>2.07.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>77.118.500,00</b>	
<b>2.07.02.1.01</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>77.118.500,00</b>	
2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	77.118.500,00	
<b>2.07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>83.606.000,00</b>	
<b>2.07.03.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi</b>	<b>28.202.000,00</b>	
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	28.202.000,00	
<b>2.07.03.1.02</b>	<b>Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>55.404.000,00</b>	
2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	55.404.000,00	
<b>2.07.04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>487.673.000,00</b>	
<b>2.07.04.1.01</b>	<b>Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>259.133.000,00</b>	
2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja	34.080.000,00	
2.07.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	31.468.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	68.585.000,00	
2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	125.000.000,00	
<b>2.07.04.1.03</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>174.990.000,00</b>	
2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	37.740.000,00	
2.07.04.1.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	18.050.000,00	
2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	119.200.000,00	
<b>2.07.04.1.04</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi</b>	<b>53.550.000,00</b>	
2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	53.550.000,00	
<b>2.07.05</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>402.628.800,00</b>	
<b>2.07.05.1.02</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>163.373.000,00</b>	
2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	74.853.000,00	
2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	11.520.000,00	
2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	57.000.000,00	
2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	20.000.000,00	
<b>2.07.05.1.03</b>	<b>Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)</b>	<b>239.255.800,00</b>	
2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	120.207.200,00	
2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	119.048.600,00	
<b>2.07.06</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>	<b>300.000.000,00</b>	
<b>2.07.06.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	<b>300.000.000,00</b>	
2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	300.000.000,00	
<b>2.07.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>31.610.169.193,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>2.07.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>34.140.000,00</b>	
2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.145.000,00	
2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.005.000,00	
<b>2.07.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>27.811.901.847,00</b>	
2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.746.902.247,00	
2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.000.000,00	
2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.999.600,00	
2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000,00	
<b>2.07.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>30.497.400,00</b>	
2.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	
2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.497.400,00	
<b>2.07.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>16.499.000,00</b>	
2.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16.499.000,00	
<b>2.07.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>407.899.050,00</b>	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.996.000,00	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.232.000,00	
2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000,00	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.339.050,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.340.000,00	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.992.000,00	
2.07.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	80.000.000,00	
<b>2.07.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>26.150.000,00</b>	
2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.150.000,00	
<b>2.07.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.218.849.750,00</b>	
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	492.795.750,00	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.721.054.000,00	
<b>2.07.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.064.232.146,00</b>	
2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.338.000,00	
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	581.417.400,00	
2.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.426.000,00	
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.997.000,00	
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	372.407.746,00	
2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.646.000,00	
<b>2.07.3.32.0.00.02.0001</b>	<b>BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS</b>	<b>3.512.927.950,00</b>	
<b>2.07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>1.130.031.600,00</b>	
<b>2.07.03.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi</b>	<b>1.030.038.600,00</b>	
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1.000.038.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	30.000.400,00	
<b>2.07.03.1.04</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>99.993.000,00</b>	
2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	99.993.000,00	
<b>2.07.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>2.382.896.350,00</b>	
<b>2.07.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>124.958.550,00</b>	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.945.400,00	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.592.200,00	
2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.985.000,00	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.950,00	
2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.512.000,00	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.924.000,00	
<b>2.07.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.795.955.200,00</b>	
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	202.264.200,00	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.590.691.000,00	
<b>2.07.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>425.466.600,00</b>	
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	136.438.600,00	
2.07.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	19.680.000,00	
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.348.000,00	
<b>2.07.3.32.0.00.02.0002</b>	<b>BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA</b>	<b>2.022.253.400,00</b>	
<b>2.07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>253.985.000,00</b>	
<b>2.07.03.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi</b>	<b>253.985.000,00</b>	
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	253.985.000,00	
<b>2.07.06</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>	<b>704.506.700,00</b>	
<b>2.07.06.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	<b>704.506.700,00</b>	
2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	704.506.700,00	
<b>2.07.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.063.761.700,00</b>	
<b>2.07.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>15.000.000,00</b>	
2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.000.000,00	
<b>2.07.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>11.220.000,00</b>	
2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.220.000,00	
<b>2.07.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>61.195.700,00</b>	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.072.000,00	
2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.845.700,00	
2.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.324.000,00	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.890.000,00	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.064.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>2.07.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>24.000.000,00</b>	
2.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.230.000,00	
2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.770.000,00	
<b>2.07.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>668.793.000,00</b>	
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.135.000,00	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.146.000,00	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	545.512.000,00	
<b>2.07.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>283.553.000,00</b>	
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	201.079.000,00	
2.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.170.000,00	
2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.304.000,00	
<b>2.07.4.01.2.22.02.0000</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	<b>32.961.195.493,00</b>	
<b>2.07.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>34.140.000,00</b>	
2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.990.000,00	
<b>2.07.4.01.2.22.02.0001</b>	<b>BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS</b>	<b>3.512.927.950,00</b>	
<b>2.07.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>17.340.000,00</b>	
2.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.340.000,00	
<b>2.07.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>19.176.000,00</b>	
2.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.176.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>2.08</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>14.101.300.728,00</b>	
<b>2.08.2.14.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>14.101.300.728,00</b>	
<b>2.08.02</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>291.000.000,00</b>	
<b>2.08.02.1.01</b>	<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>	<b>40.500.000,00</b>	
2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	40.000.000,00	
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	500.000,00	
<b>2.08.02.1.02</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>	<b>200.000.000,00</b>	
2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	200.000.000,00	
<b>2.08.02.1.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>50.500.000,00</b>	
2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	50.000.000,00	
2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	500.000,00	
<b>2.08.03</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>717.500.000,00</b>	
<b>2.08.03.1.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.000.000,00</b>	
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	500.000,00	
2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	500.000,00	
<b>2.08.03.1.02</b>	<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>715.500.000,00</b>	
2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	715.000.000,00	
2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	500.000,00	
<b>2.08.03.1.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>1.000.000,00</b>	
2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	500.000,00	
2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>2.08.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>2.500.000,00</b>	
<b>2.08.04.1.01</b>	<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>1.000.000,00</b>	
2.08.04.1.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	500.000,00	
2.08.04.1.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	500.000,00	
<b>2.08.04.1.02</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>1.000.000,00</b>	
2.08.04.1.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	500.000,00	
2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	500.000,00	
<b>2.08.04.1.03</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>500.000,00</b>	
2.08.04.1.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	500.000,00	
<b>2.08.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>2.08.05.1.01</b>	<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>1.000.000,00</b>	
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	500.000,00	
2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	500.000,00	
<b>2.08.06</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>65.228.800,00</b>	
<b>2.08.06.1.01</b>	<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>	<b>1.000.000,00</b>	
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	500.000,00	
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	500.000,00	
<b>2.08.06.1.02</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>64.228.800,00</b>	
2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	4.000.000,00	
2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	500.000,00	
2.08.06.1.02.0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	59.728.800,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>2.08.07</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>2.500.000,00</b>	
<b>2.08.07.1.01</b>	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>500.000,00</b>	
2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	500.000,00	
<b>2.08.07.1.02</b>	<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>1.000.000,00</b>	
2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	500.000,00	
2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	500.000,00	
<b>2.08.07.1.03</b>	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.000.000,00</b>	
2.08.07.1.03.0007	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	500.000,00	
2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	500.000,00	
<b>2.08.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>13.021.571.928,00</b>	
<b>2.08.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>68.441.810,00</b>	
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.249.810,00	
2.08.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.205.000,00	
2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.987.000,00	
<b>2.08.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.536.739.168,00</b>	
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.485.018.568,00	
2.08.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.096.200,00	
2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.426.000,00	
2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	32.198.400,00	
<b>2.08.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>13.330.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.08.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.330.000,00	
<b>2.08.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>385.198.250,00</b>	
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54.353.300,00	
2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	
2.08.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.573.000,00	
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.865.000,00	
2.08.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.124.000,00	
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257.283.000,00	
2.08.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	999.950,00	
<b>2.08.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>545.853.000,00</b>	
2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	147.298.000,00	
2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	228.305.000,00	
2.08.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	170.250.000,00	
<b>2.08.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.077.365.700,00</b>	
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.118.000,00	
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	481.532.700,00	
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.589.715.000,00	
<b>2.08.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.394.644.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.296.000,00	
2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.700.000,00	
2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	859.227.700,00	
2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	87.514.000,00	
2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	313.906.300,00	
<b>2.09</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>469.904.300,00</b>	
<b>3.27.2.09.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>	<b>469.904.300,00</b>	
<b>2.09.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>358.280.000,00</b>	
<b>2.09.03.1.01</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>272.177.000,00</b>	
2.09.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	146.177.000,00	
2.09.03.1.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	100.972.000,00	
2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	25.028.000,00	
<b>2.09.03.1.04</b>	<b>Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi</b>	<b>86.103.000,00</b>	
2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	55.000.000,00	
2.09.03.1.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	31.103.000,00	
<b>2.09.04</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>20.000.000,00</b>	
<b>2.09.04.1.02</b>	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi</b>	<b>20.000.000,00</b>	
2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	20.000.000,00	
<b>2.09.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>91.624.300,00</b>	
<b>2.09.05.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>91.624.300,00</b>	
2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	28.441.700,00	
2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	16.958.300,00	
2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	36.624.300,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	9.600.000,00	
<b>2.10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>16.578.599.200,00</b>	
<b>1.03.2.10.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b>	<b>14.925.529.200,00</b>	
<b>2.10.03</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>	<b>10.312.700,00</b>	
<b>2.10.03.1.01</b>	<b>Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi</b>	<b>10.312.700,00</b>	
2.10.03.1.01.0002	Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	10.312.700,00	
<b>2.10.06</b>	<b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>	<b>21.031.500,00</b>	
<b>2.10.06.1.01</b>	<b>Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>21.031.500,00</b>	
2.10.06.1.01.0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	21.031.500,00	
<b>2.10.11</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b>	<b>14.894.185.000,00</b>	
<b>2.10.11.5.01</b>	<b>Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>	<b>13.068.894.000,00</b>	
2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	1.249.180.000,00	
2.10.11.5.01.0002	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	1.001.567.000,00	
2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	302.240.000,00	
2.10.11.5.01.0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	179.577.000,00	
2.10.11.5.01.0006	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	271.110.000,00	
2.10.11.5.01.0007	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	10.065.220.000,00	
<b>2.10.11.5.02</b>	<b>Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>	<b>1.825.291.000,00</b>	
2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	1.461.583.000,00	
2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	363.708.000,00	
<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>957.552.000,00</b>	
<b>2.10.11.5.01</b>	<b>Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>	<b>957.552.000,00</b>	
2.10.11.5.01.0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	957.552.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>3.27.1.03.2.10.02.0000</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>	<b>79.000.000,00</b>	
<b>2.10.11.5.02</b>	<b>Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>	<b>79.000.000,00</b>	
2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	79.000.000,00	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0002</b>	<b>BIRO HUKUM</b>	<b>321.518.000,00</b>	
2.10.11.5.02.0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	53.440.000,00	
2.10.11.5.02.0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	268.078.000,00	
<b>4.01.2.13.2.10.01.0001</b>	<b>BIRO TATA PEMERINTAHAN</b>	<b>295.000.000,00</b>	
<b>2.10.11.5.01</b>	<b>Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>	<b>295.000.000,00</b>	
2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	295.000.000,00	
<b>2.11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>68.386.740.650,00</b>	
<b>2.11.3.28.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>	<b>66.945.770.650,00</b>	
<b>2.11.02</b>	<b>PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>90.100.000,00</b>	
<b>2.11.02.1.01</b>	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</b>	<b>90.100.000,00</b>	
2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi	90.100.000,00	
<b>2.11.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>1.287.919.400,00</b>	
<b>2.11.03.1.01</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>1.180.838.400,00</b>	
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	220.869.000,00	
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	130.340.000,00	
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	829.629.400,00	
<b>2.11.03.1.02</b>	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>107.081.000,00</b>	
2.11.03.1.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	107.081.000,00	
<b>2.11.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>9.190.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>2.11.05.1.01</b>	<b>Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>9.190.000,00</b>	
2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	9.190.000,00	
<b>2.11.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>188.133.000,00</b>	
<b>2.11.06.1.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>188.133.000,00</b>	
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	84.098.000,00	
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	104.035.000,00	
<b>2.11.08</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>81.390.000,00</b>	
<b>2.11.08.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>81.390.000,00</b>	
2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	81.390.000,00	
<b>2.11.09</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>110.000.050,00</b>	
<b>2.11.09.1.01</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>110.000.050,00</b>	
2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	110.000.050,00	
<b>2.11.11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>13.273.504.948,00</b>	
<b>2.11.11.1.01</b>	<b>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>	<b>13.273.504.948,00</b>	
2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	12.956.679.568,00	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>51.905.533.252,00</b>	
<b>2.11.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>47.280.480.238,00</b>	
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.217.971.988,00	
<b>2.11.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>90.000.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	90.000.000,00	
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>416.785.500,00</b>	
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.209.000,00	
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.502.000,00	
2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.871.000,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.792.500,00	
2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.548.000,00	
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.863.000,00	
<b>2.11.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>19.780.000,00</b>	
2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.780.000,00	
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.716.560.214,00</b>	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.470.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	821.574.214,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.893.516.000,00	
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.313.927.300,00</b>	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.114.000,00	
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	626.401.800,00	
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	188.240.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	464.171.500,00	
<b>2.11.3.28.0.00.02.0001</b>	<b>BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA</b>	<b>1.440.970.000,00</b>	
<b>2.11.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>17.480.000,00</b>	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.480.000,00	
<b>2.11.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>15.000.000,00</b>	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000,00	
<b>2.11.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>117.736.000,00</b>	
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.776.000,00	
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.115.300,00	
2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.614.000,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.977.700,00	
2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.617.000,00	
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.636.000,00	
<b>2.11.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>664.453.000,00</b>	
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.299.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.015.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	485.139.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>2.11.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>626.301.000,00</b>	
2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	482.138.000,00	
2.11.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	15.909.000,00	
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.361.000,00	
2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	113.893.000,00	
<b>2.11.3.28.2.22.02.0000</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>	<b>66.945.770.650,00</b>	
<b>2.11.11</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>13.273.504.948,00</b>	
<b>2.11.11.1.01</b>	<b>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>	<b>13.273.504.948,00</b>	
2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	316.825.380,00	
<b>2.11.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>51.905.533.252,00</b>	
<b>2.11.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>68.000.000,00</b>	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.950.000,00	
2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.955.000,00	
2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.095.000,00	
<b>2.11.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>47.280.480.238,00</b>	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.508.700,00	
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.999.750,00	
2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	31.999.800,00	
<b>2.12</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>232.331.300,00</b>	
<b>2.13.2.12.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>232.331.300,00</b>	
<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>56.535.200,00</b>	
<b>2.12.02.1.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>31.734.400,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.12.02.1.02.0001	Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk	11.520.400,00	
2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	20.214.000,00	
<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>61.315.700,00</b>	
<b>2.12.03.1.01</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>36.455.700,00</b>	
2.12.03.1.01.0004	Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	36.455.700,00	
<b>2.12.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>64.385.900,00</b>	
<b>2.12.04.1.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	<b>64.385.900,00</b>	
2.12.04.1.02.0001	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60.025.500,00	
2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	4.360.400,00	
<b>2.12.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>50.094.500,00</b>	
<b>2.12.05.1.01</b>	<b>Penyediaan Profil Kependudukan</b>	<b>50.094.500,00</b>	
2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	50.094.500,00	
<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>61.315.700,00</b>	
<b>2.12.03.1.03</b>	<b>Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>24.860.000,00</b>	
2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	24.860.000,00	
<b>2.12.02</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>56.535.200,00</b>	
<b>2.12.02.1.01</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</b>	<b>24.800.800,00</b>	
2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	24.800.800,00	
<b>2.13</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>9.646.382.062,00</b>	
<b>2.13.04</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>41.777.750,00</b>	
<b>2.13.04.1.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>41.777.750,00</b>	
2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	41.777.750,00	
<b>2.13.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>9.604.604.312,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>2.13.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>26.468.000,00</b>	
2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.040.000,00	
2.13.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.428.000,00	
<b>2.13.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.238.844.412,00</b>	
2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.220.753.012,00	
2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.530.000,00	
2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	9.561.400,00	
<b>2.13.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>13.154.600,00</b>	
2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.154.600,00	
<b>2.13.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>609.816.400,00</b>	
2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.404.200,00	
2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.994.200,00	
2.13.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.356.000,00	
2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.424.000,00	
2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	533.638.000,00	
<b>2.13.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>79.170.000,00</b>	
2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.340.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.830.000,00	
<b>2.13.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>325.716.000,00</b>	
2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	307.800.000,00	
2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.916.000,00	
<b>2.13.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>311.434.900,00</b>	
2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.232.000,00	
2.13.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.596.900,00	
2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.750.000,00	
2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	151.200.000,00	
2.13.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.656.000,00	
<b>2.14</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>109.936.326,00</b>	
<b>2.08.2.14.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>109.936.326,00</b>	
<b>2.14.02</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>63.436.326,00</b>	
<b>2.14.02.1.01</b>	<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>63.436.326,00</b>	
2.14.02.1.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	62.436.326,00	
2.14.02.1.01.0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	500.000,00	
2.14.02.1.01.0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	500.000,00	
<b>2.14.03</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>4.500.000,00</b>	
<b>2.14.03.1.01</b>	<b>Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>4.000.000,00</b>	
2.14.03.1.01.0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	4.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>2.14.03.1.02</b>	<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>500.000,00</b>	
2.14.03.1.02.0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	500.000,00	
<b>2.14.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>42.000.000,00</b>	
<b>2.14.04.1.01</b>	<b>Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>42.000.000,00</b>	
2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	40.500.000,00	
2.14.04.1.01.0018	Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	500.000,00	
2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	500.000,00	
2.14.04.1.01.0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	500.000,00	
<b>2.15</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>115.965.546.896,00</b>	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	<b>111.747.736.346,00</b>	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>94.023.358.873,00</b>	
<b>2.15.02.1.01</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>	<b>293.133.000,00</b>	
2.15.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	293.133.000,00	
<b>2.15.02.1.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>	<b>2.233.132.100,00</b>	
2.15.02.1.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	585.493.100,00	
2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.647.639.000,00	
<b>2.15.02.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>	<b>2.628.589.500,00</b>	
2.15.02.1.05.0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	49.712.000,00	
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	301.820.000,00	
2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	28.100.000,00	
2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2.248.957.500,00	
<b>2.15.02.1.06</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</b>	<b>10.000.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	10.000.000,00	
<b>2.15.02.1.08</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>88.858.504.273,00</b>	
2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1.346.627.400,00	
2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	87.511.876.873,00	
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>17.724.377.473,00</b>	
<b>2.15.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>37.472.100,00</b>	
2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.848.500,00	
2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.623.900,00	
2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.700,00	
<b>2.15.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>14.950.483.345,00</b>	
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.886.283.345,00	
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37.690.000,00	
2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.010.000,00	
2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17.500.000,00	
<b>2.15.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2.954.600,00</b>	
2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.954.600,00	
<b>2.15.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>284.892.300,00</b>	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000,00	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.000.900,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.330.000,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.999.400,00	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.617.000,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.945.000,00	
<b>2.15.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>22.300.000,00</b>	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.300.000,00	
<b>2.15.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.301.024.000,00</b>	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	491.400.000,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	804.624.000,00	
<b>2.15.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.125.251.128,00</b>	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	558.968.300,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179.807.828,00	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	345.600.000,00	
2.15.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.875.000,00	
<b>2.15.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN</b>	<b>4.217.810.550,00</b>	
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>509.022.000,00</b>	
<b>2.15.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b>	<b>509.022.000,00</b>	
2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	140.000.000,00	
2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	369.022.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>3.708.788.550,00</b>	
<b>2.15.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>29.952.400,00</b>	
2.15.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.370.000,00	
2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.100.000,00	
2.15.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4.482.400,00	
<b>2.15.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1.970.750,00</b>	
2.15.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.970.750,00	
<b>2.15.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>96.617.000,00</b>	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.762.000,00	
2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.878.000,00	
2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.012.000,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.895.000,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.070.000,00	
<b>2.15.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.117.716.000,00</b>	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000,00	
2.15.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.196.000,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.861.520.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>2.15.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>462.532.400,00</b>	
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.828.400,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.084.000,00	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	282.620.000,00	
<b>2.16</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>14.329.781.543,00</b>	
<b>2.16.2.21.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>14.329.781.543,00</b>	
<b>2.16.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>1.605.289.200,00</b>	
<b>2.16.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>1.605.289.200,00</b>	
2.16.02.1.01.0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	813.208.000,00	
2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	710.863.200,00	
2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	43.526.000,00	
2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	37.692.000,00	
<b>2.16.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>334.077.100,00</b>	
<b>2.16.03.1.02</b>	<b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>334.077.100,00</b>	
2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	270.883.900,00	
2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	63.193.200,00	
<b>2.16.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>12.390.415.243,00</b>	
<b>2.16.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.200.000,00</b>	
2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.500.000,00	
2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.000.000,00	
2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.700.000,00	
<b>2.16.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.798.227.443,00</b>	
2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.764.950.493,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.277.000,00	
2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	
2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3.999.950,00	
<b>2.16.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>213.446.800,00</b>	
2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.957.000,00	
2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.963.000,00	
2.16.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.701.000,00	
2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.199.000,00	
2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.626.800,00	
<b>2.16.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>996.164.000,00</b>	
2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	289.200.000,00	
2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	706.964.000,00	
<b>2.16.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>367.377.000,00</b>	
2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.686.000,00	
2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.679.000,00	
2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	170.796.000,00	
2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.216.000,00	
<b>2.17</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>10.390.876.513,00</b>	
<b>2.17.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>	<b>10.390.876.513,00</b>	
<b>2.17.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>8.000.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.17.02.1.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>8.000.000,00</b>	
2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.000.000,00	
<b>2.17.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>10.000.000,00</b>	
2.17.03.1.01	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>10.000.000,00</b>	
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	10.000.000,00	
<b>2.17.04</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>2.500.000,00</b>	
2.17.04.1.01	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>2.500.000,00</b>	
2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	2.500.000,00	
<b>2.17.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>33.300.000,00</b>	
2.17.05.1.01	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>33.300.000,00</b>	
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	33.300.000,00	
<b>2.17.06</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>22.100.000,00</b>	
2.17.06.1.01	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>22.100.000,00</b>	
2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	22.100.000,00	
<b>2.17.07</b>	<b>PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>85.985.000,00</b>	
2.17.07.1.01	<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>85.985.000,00</b>	
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	51.591.000,00	
<b>2.17.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>66.999.000,00</b>	
2.17.08.1.01	<b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>	<b>66.999.000,00</b>	
2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	44.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	22.000.000,00	
2.17.08.1.01.0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	999.000,00	
<b>2.17.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>10.161.992.513,00</b>	
<b>2.17.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.323.011.963,00</b>	
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.292.506.063,00	
2.17.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.540.000,00	
2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.276.250,00	
<b>2.17.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>13.200.000,00</b>	
2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.200.000,00	
<b>2.17.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>182.111.700,00</b>	
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.290.000,00	
2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	
2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.200.000,00	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.799.700,00	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.822.000,00	
<b>2.17.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>20.830.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.520.000,00	
2.17.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.310.000,00	
<b>2.17.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.283.958.450,00</b>	
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	683.750,00	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	452.159.500,00	
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	831.115.200,00	
<b>2.17.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>317.242.400,00</b>	
2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.347.900,00	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.161.500,00	
2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.616.000,00	
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.633.000,00	
2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.484.000,00	
<b>2.17.07</b>	<b>PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>85.985.000,00</b>	
<b>2.17.07.1.01</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>85.985.000,00</b>	
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	34.394.000,00	
<b>2.17.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>10.161.992.513,00</b>	
<b>2.17.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>21.638.000,00</b>	
2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.250.000,00	
2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.908.000,00	
2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.480.000,00	
<b>2.17.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.323.011.963,00</b>	
2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	8.689.650,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>	<b>11.592.269.842,00</b>	
<b>2.18.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	<b>11.592.269.842,00</b>	
<b>2.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>14.425.000,00</b>	
<b>2.18.02.1.02</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</b>	<b>14.425.000,00</b>	
2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	14.425.000,00	
<b>2.18.03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>29.310.000,00</b>	
<b>2.18.03.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>29.310.000,00</b>	
2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	29.310.000,00	
<b>2.18.04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>245.235.000,00</b>	
<b>2.18.04.1.02</b>	<b>Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>245.235.000,00</b>	
2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	32.819.000,00	
2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	203.758.000,00	
2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	8.658.000,00	
<b>2.18.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>48.550.000,00</b>	
<b>2.18.05.1.01</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>48.550.000,00</b>	
2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	36.546.000,00	
2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	7.804.000,00	
2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	4.200.000,00	
<b>2.18.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>66.611.900,00</b>	
<b>2.18.06.1.01</b>	<b>Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>66.611.900,00</b>	
2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	66.611.900,00	
<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>11.188.137.942,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>2.18.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>16.819.000,00</b>	
2.18.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.270.000,00	
<b>2.18.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.562.996.892,00</b>	
2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.545.142.892,00	
<b>2.18.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>422.267.300,00</b>	
2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.764.000,00	
2.18.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	61.116.000,00	
<b>2.18.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>23.800.000,00</b>	
2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.600.000,00	
2.18.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.200.000,00	
<b>2.18.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>366.359.750,00</b>	
2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	157.641.750,00	
2.18.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	8.026.000,00	
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.625.000,00	
<b>2.18.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>16.819.000,00</b>	
2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.869.000,00	
2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.680.000,00	
<b>2.18.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.562.996.892,00</b>	
2.18.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.345.000,00	
2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.509.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>2.18.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.515.000,00</b>	
2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.515.000,00	
<b>2.18.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>422.267.300,00</b>	
2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.337.300,00	
2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.248.400,00	
2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.143.600,00	
2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.344.000,00	
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	82.760.000,00	
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.554.000,00	
<b>2.18.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>785.380.000,00</b>	
2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	
2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.320.000,00	
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	628.560.000,00	
<b>2.18.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>366.359.750,00</b>	
2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.039.000,00	
2.18.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.498.000,00	
2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.530.000,00	
<b>2.19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	<b>65.828.995.500,00</b>	
<b>1.01.2.19.0.00.03.0002</b>	<b>BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>	<b>65.828.995.500,00</b>	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>2.19.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>2.671.029.300,00</b>	
<b>2.19.02.1.01</b>	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi</b>	<b>2.421.029.300,00</b>	
2.19.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	1.548.562.600,00	
2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	261.573.200,00	
2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	300.000.000,00	
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	310.893.500,00	
<b>2.19.02.1.02</b>	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>250.000.000,00</b>	
2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	250.000.000,00	
<b>2.19.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>51.711.191.000,00</b>	
<b>2.19.03.1.02</b>	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</b>	<b>10.816.191.000,00</b>	
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	8.349.253.000,00	
2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	264.162.000,00	
2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	2.202.776.000,00	
<b>2.19.03.1.03</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional</b>	<b>20.100.000.000,00</b>	
2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	20.100.000.000,00	
<b>2.19.03.1.04</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>20.795.000.000,00</b>	
2.19.03.1.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	20.795.000.000,00	
<b>2.19.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	
<b>2.19.04.1.01</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	
2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	1.500.000.000,00	
<b>2.19.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>9.946.775.200,00</b>	
<b>2.19.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.680.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.680.000,00	
<b>2.19.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>18.750.000,00</b>	
2.19.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.750.000,00	
<b>2.19.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>164.354.200,00</b>	
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.519.200,00	
2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.155.000,00	
2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.020.000,00	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.825.000,00	
2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.760.000,00	
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.075.000,00	
<b>2.19.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>45.278.000,00</b>	
2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.278.000,00	
<b>2.19.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.257.182.700,00</b>	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	715.066.700,00	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.542.116.000,00	
<b>2.19.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.447.530.300,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121.600.300,00	
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.291.330.000,00	
2.19.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.600.000,00	
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>	<b>231.096.250,00</b>	
<b>5.01.2.20.5.05.01.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH</b>	<b>231.096.250,00</b>	
<b>2.20.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>231.096.250,00</b>	
<b>2.20.02.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>	<b>231.096.250,00</b>	
2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	231.096.250,00	
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>837.465.500,00</b>	
<b>2.16.2.21.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>837.465.500,00</b>	
<b>2.21.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>837.465.500,00</b>	
<b>2.21.02.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>837.465.500,00</b>	
2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	173.574.300,00	
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	663.891.200,00	
<b>2.22</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>	<b>776.878.855.370,00</b>	
<b>1.01.2.19.0.00.03.0000</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>	<b>39.802.467.700,00</b>	
<b>2.22.08</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>39.802.467.700,00</b>	
<b>2.22.08.5.10</b>	<b>Pendidikan Berbasis Budaya</b>	<b>39.802.467.700,00</b>	
2.22.08.5.10.0001	Pembinaan Muatan Lokal	34.240.592.700,00	
2.22.08.5.10.0002	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	1.878.875.000,00	
2.22.08.5.10.0004	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	3.683.000.000,00	
<b>1.02.2.22.1.03.01.0000</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	<b>464.450.000,00</b>	
<b>2.22.08.5.08</b>	<b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>	<b>464.450.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.22.08.5.08.0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	464.450.000,00	
<b>1.03.1.04.3.29.13.0000</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>	<b>29.350.000.000,00</b>	
<b>2.22.08.5.06</b>	<b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>	<b>16.800.000.000,00</b>	
2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	16.800.000.000,00	
<b>2.22.08.5.08</b>	<b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>	<b>12.550.000.000,00</b>	
2.22.08.5.08.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman	12.550.000.000,00	
<b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	<b>25.231.658.860,00</b>	
<b>2.22.08.5.06</b>	<b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>	<b>3.626.128.500,00</b>	
2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	3.626.128.500,00	
<b>2.22.08.5.09</b>	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>21.605.530.360,00</b>	
2.22.08.5.09.0016	Pembinaan Jagawarga	11.882.193.800,00	
2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	9.723.336.560,00	
<b>1.05.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	<b>1.260.190.000,00</b>	
<b>2.22.08.5.06</b>	<b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>	<b>1.260.190.000,00</b>	
2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	1.260.190.000,00	
<b>1.06.2.22.4.01.01.0000</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>4.485.001.700,00</b>	
<b>2.22.08.5.09</b>	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>4.485.001.700,00</b>	
2.22.08.5.09.0023	Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	4.485.001.700,00	
<b>2.07.4.01.2.22.02.0000</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	<b>12.087.314.000,00</b>	
2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	6.164.563.000,00	
2.22.08.5.09.0022	Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	5.922.751.000,00	
<b>2.07.4.01.2.22.02.0001</b>	<b>BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS</b>	<b>961.115.000,00</b>	
2.22.08.5.09.0017	Pengembangan Kewirausahaan Desa	961.115.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>2.08.2.14.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>7.013.719.501,00</b>	
2.22.08.5.09.0019	Pengembangan Ekonomi Perempuan	5.607.791.151,00	
2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	1.405.928.350,00	
<b>2.11.3.28.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>	<b>1.553.972.100,00</b>	
<b>2.22.08.5.08</b>	<b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>	<b>1.363.008.100,00</b>	
2.22.08.5.08.0006	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	1.363.008.100,00	
<b>2.22.08.5.09</b>	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>190.964.000,00</b>	
2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	190.964.000,00	
<b>2.13.2.12.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>4.468.212.000,00</b>	
2.22.08.5.09.0017	Pengembangan Kewirausahaan Desa	400.000.000,00	
2.22.08.5.09.0020	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	4.068.212.000,00	
<b>2.16.2.21.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>33.616.480.700,00</b>	
<b>2.22.08.5.06</b>	<b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>	<b>33.616.480.700,00</b>	
2.22.08.5.06.0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	33.616.480.700,00	
<b>2.17.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>	<b>74.028.194.843,00</b>	
2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	11.662.000.000,00	
<b>2.22.08.5.04</b>	<b>Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya</b>	<b>22.163.088.843,00</b>	
2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	22.163.088.843,00	
<b>2.22.08.5.08</b>	<b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>	<b>21.040.500.000,00</b>	
2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif	21.040.500.000,00	
<b>2.22.08.5.09</b>	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>19.162.606.000,00</b>	
2.22.08.5.09.0017	Pengembangan Kewirausahaan Desa	19.162.606.000,00	
<b>2.22.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KEBUDAYAAN</b>	<b>394.443.910.710,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>2.22.08.5.01</b>	<b>Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman</b>	<b>14.650.200.000,00</b>	
2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	3.500.000.000,00	
2.22.08.5.01.0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	6.100.000.000,00	
2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	5.050.200.000,00	
<b>2.22.08.5.04</b>	<b>Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya</b>	<b>25.403.102.444,00</b>	
2.22.08.5.04.0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	14.430.000.000,00	
2.22.08.5.04.0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	5.000.000.000,00	
2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	5.973.102.444,00	
<b>2.22.08.5.06</b>	<b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>	<b>13.231.642.550,00</b>	
2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	958.422.550,00	
2.22.08.5.06.0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	12.273.220.000,00	
<b>2.22.08.5.07</b>	<b>Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan</b>	<b>5.891.442.000,00</b>	
2.22.08.5.07.0001	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	714.442.000,00	
2.22.08.5.07.0002	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	450.000.000,00	
2.22.08.5.07.0003	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	4.727.000.000,00	
<b>2.22.08.5.09</b>	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>305.410.479.200,00</b>	
2.22.08.5.09.0001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	19.000.000.000,00	
2.22.08.5.09.0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	5.625.000.000,00	
2.22.08.5.09.0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	1.982.091.200,00	
2.22.08.5.09.0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan	2.200.000.000,00	
2.22.08.5.09.0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta	4.500.000.000,00	
2.22.08.5.09.0006	Gelar Budaya Yogyakarta	7.550.000.000,00	
2.22.08.5.09.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	5.823.388.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.22.08.5.09.0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	2.800.000.000,00	
2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	6.600.000.000,00	
2.22.08.5.09.0010	Selendang Sutera	2.200.000.000,00	
2.22.08.5.09.0011	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	7.530.000.000,00	
2.22.08.5.09.0014	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	237.000.000.000,00	
2.22.08.5.09.0015	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	2.600.000.000,00	
<b>2.22.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>29.857.044.516,00</b>	
<b>2.22.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2.831.800,00</b>	
2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	975.000,00	
2.22.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.040.000,00	
2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	816.800,00	
<b>2.22.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>27.401.135.716,00</b>	
2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.272.909.716,00	
2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.002.000,00	
2.22.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.245.900,00	
2.22.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	27.978.100,00	
<b>2.22.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>36.145.800,00</b>	
2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36.145.800,00	
<b>2.22.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>116.173.200,00</b>	
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.432.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.395.200,00	
2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.958.000,00	
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.343.000,00	
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.045.000,00	
<b>2.22.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.796.156.000,00</b>	
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	618.000.000,00	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.176.156.000,00	
<b>2.22.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>504.602.000,00</b>	
2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.419.000,00	
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	360.256.000,00	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.255.000,00	
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.480.000,00	
2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.192.000,00	
<b>2.22.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO</b>	<b>25.204.605.400,00</b>	
<b>2.22.08</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>20.893.771.000,00</b>	
<b>2.22.08.5.03</b>	<b>Penguatan Museum Sonobudoyo</b>	<b>20.893.771.000,00</b>	
2.22.08.5.03.0001	Pengelolaan Museum Sonobudoyo	5.693.771.000,00	
2.22.08.5.03.0002	Pengembangan Museum Sonobudoyo	15.200.000.000,00	
<b>2.22.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>4.310.834.400,00</b>	
<b>2.22.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12.040.800,00</b>	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.040.800,00	
<b>2.22.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>20.490.800,00</b>	
2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.490.800,00	
<b>2.22.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>201.286.000,00</b>	
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.382.000,00	
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.442.000,00	
2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.568.000,00	
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.040.000,00	
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.090.000,00	
2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.764.000,00	
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.000.000,00	
<b>2.22.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.978.458.800,00</b>	
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.629.661.200,00	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.347.797.600,00	
<b>2.22.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>98.558.000,00</b>	
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.521.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.837.000,00	
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.200.000,00	
<b>2.22.0.00.0.00.01.0002</b>	<b>TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA</b>	<b>21.173.419.700,00</b>	
<b>2.22.08</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>19.284.333.000,00</b>	
<b>2.22.08.5.05</b>	<b>Pengelolaan Taman Budaya</b>	<b>19.284.333.000,00</b>	
2.22.08.5.05.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	19.284.333.000,00	
<b>2.22.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.889.086.700,00</b>	
<b>2.22.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.865.800,00</b>	
2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.865.800,00	
<b>2.22.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>20.465.000,00</b>	
2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.465.000,00	
<b>2.22.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>52.890.900,00</b>	
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.862.000,00	
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.537.900,00	
2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.424.000,00	
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.769.000,00	
2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.764.000,00	
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.534.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>2.22.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.706.390.000,00</b>	
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	311.030.000,00	
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.393.860.000,00	
<b>2.22.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>99.475.000,00</b>	
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.322.000,00	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.598.000,00	
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.555.000,00	
<b>2.23.2.24.2.22.02.0000</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>	<b>13.278.000.400,00</b>	
<b>2.22.08</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>	<b>13.278.000.400,00</b>	
<b>2.22.08.5.02</b>	<b>Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten</b>	<b>13.278.000.400,00</b>	
2.22.08.5.02.0002	Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	7.864.000.400,00	
2.22.08.5.02.0003	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	5.414.000.000,00	
<b>3.25.2.22.1.03.01.0000</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>20.161.047.900,00</b>	
<b>2.22.08.5.06</b>	<b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>	<b>10.500.000.000,00</b>	
2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	10.500.000.000,00	
<b>2.22.08.5.08</b>	<b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>	<b>9.661.047.900,00</b>	
2.22.08.5.08.0005	Pengembangan Budaya Bahari	9.661.047.900,00	
<b>3.26.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>	<b>25.098.560.500,00</b>	
<b>2.22.08.5.04</b>	<b>Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya</b>	<b>1.600.000.000,00</b>	
2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	1.600.000.000,00	
<b>2.22.08.5.06</b>	<b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>	<b>762.560.500,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	762.560.500,00	
<b>2.22.08.5.08</b>	<b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>	<b>18.184.000.000,00</b>	
2.22.08.5.08.0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	18.184.000.000,00	
<b>2.22.08.5.09</b>	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>4.552.000.000,00</b>	
2.22.08.5.09.0018	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	4.552.000.000,00	
<b>3.27.1.03.2.10.02.0000</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>	<b>7.765.063.800,00</b>	
<b>2.22.08.5.08</b>	<b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>	<b>4.265.063.800,00</b>	
2.22.08.5.08.0001	Pengembangan Lumbung Mataraman	4.265.063.800,00	
<b>2.22.08.5.06</b>	<b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	
2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	3.500.000.000,00	
<b>3.31.3.30.4.01.02.0000</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	<b>20.515.998.256,00</b>	
2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	1.000.000.000,00	
<b>2.22.08.5.08</b>	<b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>	<b>19.515.998.256,00</b>	
2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif	19.515.998.256,00	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0003</b>	<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>2.22.08.5.09</b>	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>50.000.000,00</b>	
2.22.08.5.09.0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	50.000.000,00	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0004</b>	<b>BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>262.893.500,00</b>	
2.22.08.5.09.0001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	262.893.500,00	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0007</b>	<b>BIRO UMUM DAN PROTOKOL</b>	<b>1.818.865.000,00</b>	
<b>2.22.08.5.06</b>	<b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>	<b>625.000.000,00</b>	
2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	625.000.000,00	
<b>2.22.08.5.09</b>	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>1.193.865.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.22.08.5.09.0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	1.193.865.000,00	
<b>4.01.1.03.2.22.01.0005</b>	<b>BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	
<b>2.22.08.5.04</b>	<b>Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	
2.22.08.5.04.0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	2.000.000.000,00	
<b>5.06.5.07.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PENGHUBUNG DAERAH</b>	<b>5.653.713.800,00</b>	
<b>2.22.08.5.08</b>	<b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>	<b>1.318.385.000,00</b>	
2.22.08.5.08.0003	Pengembangan Industri Kreatif	1.318.385.000,00	
<b>2.22.08.5.09</b>	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>4.024.128.800,00</b>	
2.22.08.5.09.0012	Gelar Seni Budaya Daerah	4.024.128.800,00	
<b>2.22.08.5.06</b>	<b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>	<b>311.200.000,00</b>	
2.22.08.5.06.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	311.200.000,00	
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>3.930.000.000,00</b>	
<b>2.22.08.5.09</b>	<b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>	<b>3.930.000.000,00</b>	
2.22.08.5.09.0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	3.930.000.000,00	
<b>2.23</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	<b>21.349.632.968,00</b>	
<b>2.23.2.24.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>	<b>19.063.785.968,00</b>	
<b>2.23.02</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>603.812.700,00</b>	
<b>2.23.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>321.248.000,00</b>	
2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	24.000.000,00	
2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	43.855.000,00	
2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	1.225.000,00	
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	156.895.000,00	
2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	3.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>2.23.02.1.02</b>	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>282.564.700,00</b>	
2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	180.595.400,00	
2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	1.575.000,00	
2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	100.394.300,00	
<b>2.23.03</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>30.161.700,00</b>	
<b>2.23.03.1.01</b>	<b>Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi</b>	<b>19.687.000,00</b>	
2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	19.687.000,00	
<b>2.23.03.1.02</b>	<b>Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah</b>	<b>9.144.700,00</b>	
2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	6.891.000,00	
2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	2.253.700,00	
<b>2.23.03.1.04</b>	<b>Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>1.330.000,00</b>	
2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	1.330.000,00	
<b>2.23.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>18.429.811.568,00</b>	
<b>2.23.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>8.270.000,00</b>	
2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.035.000,00	
2.23.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.955.000,00	
2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.280.000,00	
<b>2.23.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>15.375.118.968,00</b>	
2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.355.702.068,00	
2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.174.000,00	
2.23.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.360.700,00	
2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4.882.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>2.23.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>22.606.000,00</b>	
2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.606.000,00	
<b>2.23.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>900.000,00</b>	
2.23.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	900.000,00	
<b>2.23.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>70.948.600,00</b>	
2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.100.400,00	
2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.747.200,00	
2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	922.000,00	
2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.391.000,00	
2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.788.000,00	
<b>2.23.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>8.260.000,00</b>	
2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.260.000,00	
<b>2.23.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.794.895.000,00</b>	
2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	
2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.277.100.000,00	
2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.517.295.000,00	
<b>2.23.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>148.813.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.718.000,00	
2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.465.000,00	
2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	
2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.630.000,00	
<b>2.23.2.24.0.00.02.0001</b>	<b>BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>2.285.847.000,00</b>	
<b>2.23.02</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>665.341.450,00</b>	
<b>2.23.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>665.341.450,00</b>	
2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	537.289.800,00	
2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	128.051.650,00	
<b>2.23.03</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>9.928.000,00</b>	
<b>2.23.03.1.03</b>	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi</b>	<b>9.928.000,00</b>	
2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	4.520.000,00	
2.23.03.1.03.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5.408.000,00	
<b>2.23.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.610.577.550,00</b>	
<b>2.23.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.391.000,00</b>	
2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.391.000,00	
<b>2.23.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>15.018.500,00</b>	
2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.018.500,00	
<b>2.23.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>23.066.500,00</b>	
2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.983.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.815.500,00	
2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.853.000,00	
2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	815.000,00	
2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.600.000,00	
<b>2.23.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.214.900.000,00</b>	
2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	
2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.200.000.000,00	
2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.400.000,00	
<b>2.23.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>346.201.550,00</b>	
2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.071.550,00	
2.23.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	4.678.000,00	
2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.478.000,00	
2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	137.840.000,00	
2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.134.000,00	
<b>2.23.2.24.2.22.02.0000</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>	<b>19.063.785.968,00</b>	
<b>2.23.02</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>603.812.700,00</b>	
<b>2.23.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>321.248.000,00</b>	
2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	92.273.000,00	
<b>2.24</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>	<b>371.399.500,00</b>	
<b>2.24.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>371.399.500,00</b>	
<b>2.24.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</b>	<b>230.789.950,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis	42.030.000,00	
2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	13.000.050,00	
<b>2.24.02.1.02</b>	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi</b>	<b>65.219.750,00</b>	
2.24.02.1.02.0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	65.219.750,00	
<b>2.24.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi</b>	<b>75.389.800,00</b>	
2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	43.479.000,00	
<b>2.24.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</b>	<b>230.789.950,00</b>	
2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	175.759.900,00	
<b>2.24.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi</b>	<b>75.389.800,00</b>	
2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	31.910.800,00	
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		
<b>3.25</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>29.421.589.638,00</b>	
<b>3.25.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>22.515.916.638,00</b>	
<b>3.25.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>50.931.000,00</b>	
<b>3.25.03.1.09</b>	<b>Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>	<b>24.065.000,00</b>	
3.25.03.1.09.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	24.065.000,00	
<b>3.25.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>95.600.000,00</b>	
<b>3.25.04.1.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>10.000.000,00</b>	
3.25.04.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	10.000.000,00	
<b>3.25.04.1.06</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>	<b>85.600.000,00</b>	
3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	85.600.000,00	
<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>113.968.000,00</b>	
<b>3.25.05.1.01</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	<b>103.803.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	5.515.000,00	
<b>3.25.05.1.02</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>10.165.000,00</b>	
3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	4.995.000,00	
<b>3.25.06</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>226.330.400,00</b>	
<b>3.25.06.1.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>15.532.000,00</b>	
3.25.06.1.01.0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	15.532.000,00	
<b>3.25.06.1.02</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	<b>202.945.400,00</b>	
3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	99.900.000,00	
3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	103.045.400,00	
<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>22.009.207.238,00</b>	
<b>3.25.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>18.613.759.138,00</b>	
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17.688.000,00	
<b>3.25.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>321.253.400,00</b>	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.169.000,00	
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>897.861.800,00</b>	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	647.265.500,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.617.000,00	
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.975.000,00	
<b>3.25.0.00.0.00.01.0001</b>	<b>BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>4.727.109.500,00</b>	
<b>3.25.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>2.796.400.000,00</b>	
<b>3.25.04.1.05</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	<b>46.400.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	46.400.000,00	
<b>3.25.04.1.06</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>	<b>2.750.000.000,00</b>	
3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.750.000.000,00	
<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.930.709.500,00</b>	
<b>3.25.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16.820.000,00</b>	
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.820.000,00	
3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.000.000,00	
<b>3.25.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>13.530.000,00</b>	
3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	330.000,00	
3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.200.000,00	
<b>3.25.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>69.677.600,00</b>	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.294.600,00	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.771.000,00	
3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.383.000,00	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	800.000,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.900.000,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.029.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.500.000,00	
<b>3.25.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.650.524.900,00</b>	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	604.960.900,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.044.564.000,00	
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>180.157.000,00</b>	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.738.000,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.979.000,00	
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.440.000,00	
<b>3.25.0.00.0.00.01.0002</b>	<b>PELABUHAN PERIKANAN PANTAI</b>	<b>2.178.563.500,00</b>	
<b>3.25.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>47.540.000,00</b>	
<b>3.25.03.1.06</b>	<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	<b>47.540.000,00</b>	
3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	47.540.000,00	
<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>2.131.023.500,00</b>	
<b>3.25.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.255.500,00</b>	
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.260.000,00	
3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.500,00	
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4.995.000,00	
<b>3.25.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>15.000.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000,00	
<b>3.25.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>74.860.400,00</b>	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.561.000,00	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.678.000,00	
3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.072.000,00	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400.000,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.993.400,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.556.000,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.600.000,00	
<b>3.25.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.847.562.000,00</b>	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	536.050.000,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.309.512.000,00	
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>180.345.600,00</b>	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99.053.600,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.436.000,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.856.000,00	
<b>3.25.2.22.1.03.01.0000</b>	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>22.515.916.638,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>3.25.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>19.880.000,00</b>	
<b>3.25.02.1.01</b>	<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>19.880.000,00</b>	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	15.000.000,00	
3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4.880.000,00	
<b>3.25.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>50.931.000,00</b>	
<b>3.25.03.1.03</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>	<b>26.866.000,00</b>	
3.25.03.1.03.0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	26.866.000,00	
<b>3.25.05</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>113.968.000,00</b>	
<b>3.25.05.1.01</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	<b>103.803.000,00</b>	
3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	98.288.000,00	
<b>3.25.05.1.02</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>10.165.000,00</b>	
3.25.05.1.02.0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	5.170.000,00	
<b>3.25.06</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>226.330.400,00</b>	
<b>3.25.06.1.03</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>7.853.000,00</b>	
3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	7.853.000,00	
<b>3.25.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>22.009.207.238,00</b>	
<b>3.25.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>39.621.200,00</b>	
3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.060.000,00	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.578.000,00	
3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.578.000,00	
3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.305.200,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.100.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>3.25.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>18.613.759.138,00</b>	
3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.575.817.138,00	
3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.400.000,00	
3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.854.000,00	
<b>3.25.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>13.200.000,00</b>	
3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.200.000,00	
<b>3.25.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>321.253.400,00</b>	
3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.996.000,00	
3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.539.000,00	
3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.857.000,00	
3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.541.000,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.831.400,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.320.000,00	
<b>3.25.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.123.511.700,00</b>	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	793.347.700,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.324.164.000,00	
<b>3.25.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>897.861.800,00</b>	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.004.300,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000,00	
<b>3.26</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	<b>14.222.565.298,00</b>	
<b>3.26.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>DINAS PARIWISATA</b>	<b>14.222.565.298,00</b>	
<b>3.26.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>456.468.100,00</b>	
<b>3.26.02.1.03</b>	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</b>	<b>350.000.000,00</b>	
3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	200.000.000,00	
3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	150.000.000,00	
<b>3.26.02.1.04</b>	<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>106.468.100,00</b>	
3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	84.072.400,00	
3.26.02.1.04.0013	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	22.395.700,00	
<b>3.26.03</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>273.999.750,00</b>	
<b>3.26.03.1.01</b>	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>	<b>273.999.750,00</b>	
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	273.999.750,00	
<b>3.26.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>226.495.800,00</b>	
<b>3.26.04.1.02</b>	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	<b>174.999.850,00</b>	
3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	40.000.000,00	
3.26.04.1.02.0016	Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	134.999.850,00	
<b>3.26.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>149.999.700,00</b>	
<b>3.26.05.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b>	<b>50.000.000,00</b>	
3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50.000.000,00	
<b>3.26.05.1.02</b>	<b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>	<b>99.999.700,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	99.999.700,00	
<b>3.26.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>13.115.601.948,00</b>	
<b>3.26.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>36.599.850,00</b>	
3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.000.000,00	
3.26.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000,00	
3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.599.850,00	
<b>3.26.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.749.033.255,00</b>	
3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.715.268.405,00	
3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.840.000,00	
3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.999.850,00	
3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17.925.000,00	
<b>3.26.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>42.144.943,00</b>	
3.26.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.544.943,00	
3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.600.000,00	
<b>3.26.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>200.981.100,00</b>	
3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.098.000,00	
3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00	
3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.993.000,00	
3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.528.000,00	
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.875.000,00	
3.26.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.487.000,00	
<b>3.26.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>13.100.000,00</b>	
3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.140.000,00	
3.26.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.960.000,00	
<b>3.26.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.511.880.000,00</b>	
3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000,00	
3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	403.700.000,00	
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.104.780.000,00	
<b>3.26.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>561.862.800,00</b>	
3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.996.000,00	
3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	231.942.800,00	
3.26.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	18.080.000,00	
3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.774.000,00	
3.26.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	158.760.000,00	
3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.310.000,00	
<b>3.26.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>226.495.800,00</b>	
<b>3.26.04.1.01</b>	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</b>	<b>51.495.950,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.26.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	51.495.950,00	
<b>3.27</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>62.273.013.892,00</b>	
<b>3.27.2.09.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>	<b>54.626.085.478,00</b>	
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>238.088.000,00</b>	
<b>3.27.02.1.01</b>	<b>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>	<b>138.088.000,00</b>	
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	300.000,00	
3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	137.788.000,00	
<b>3.27.02.1.04</b>	<b>Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</b>	<b>100.000.000,00</b>	
3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	100.000.000,00	
<b>3.27.03</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>16.708.000,00</b>	
<b>3.27.03.1.01</b>	<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>	<b>16.708.000,00</b>	
3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	16.408.000,00	
3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	300.000,00	
<b>3.27.04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>694.101.900,00</b>	
<b>3.27.04.1.01</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>60.611.400,00</b>	
3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	60.611.400,00	
<b>3.27.04.1.02</b>	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi</b>	<b>627.600.500,00</b>	
3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	621.490.000,00	
3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	6.110.500,00	
<b>3.27.04.1.05</b>	<b>Kesejahteraan Hewan</b>	<b>5.890.000,00</b>	
3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	5.890.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>3.27.05</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>100.000.000,00</b>	
<b>3.27.05.1.01</b>	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</b>	<b>100.000.000,00</b>	
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100.000.000,00	
<b>3.27.07</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>2.523.999.000,00</b>	
<b>3.27.07.1.01</b>	<b>Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>36.000.000,00</b>	
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	36.000.000,00	
<b>3.27.07.1.02</b>	<b>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>2.487.999.000,00</b>	
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2.472.159.000,00	
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	15.840.000,00	
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>51.053.188.578,00</b>	
<b>3.27.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>55.039.500,00</b>	
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.843.500,00	
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.201.000,00	
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.995.000,00	
<b>3.27.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>46.182.124.228,00</b>	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	46.151.784.228,00	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.340.000,00	
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16.000.000,00	
<b>3.27.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>63.600.000,00</b>	
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	63.600.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>3.27.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>10.316.600,00</b>	
3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.316.600,00	
<b>3.27.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>109.136.350,00</b>	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.885.800,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.141.400,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.229.150,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.916.000,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.964.000,00	
<b>3.27.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>22.950.000,00</b>	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.950.000,00	
<b>3.27.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.783.555.000,00</b>	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	969.207.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.813.748.000,00	
<b>3.27.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>826.466.900,00</b>	
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.082.000,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	594.830.900,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.978.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.064.000,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.512.000,00	
<b>3.27.2.09.0.00.02.0001</b>	<b>BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN</b>	<b>3.101.819.014,00</b>	
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>1.716.337.814,00</b>	
<b>3.27.02.1.02</b>	<b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>	<b>1.716.337.814,00</b>	
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	85.837.950,00	
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	50.023.000,00	
3.27.02.1.02.0007	Perbanyakkan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	451.458.924,00	
3.27.02.1.02.0012	Perbanyakkan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	129.007.500,00	
3.27.02.1.02.0013	Perbanyakkan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	1.000.010.440,00	
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.385.481.200,00</b>	
<b>3.27.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.400.000,00</b>	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.400.000,00	
<b>3.27.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.320.000,00</b>	
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.320.000,00	
<b>3.27.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>92.937.600,00</b>	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.073.400,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.594.200,00	
3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.818.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.385.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.667.000,00	
<b>3.27.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>931.973.500,00</b>	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	235.485.500,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	695.688.000,00	
<b>3.27.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>341.850.100,00</b>	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.105.100,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.633.000,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.112.000,00	
<b>3.27.2.09.0.00.02.0002</b>	<b>BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN</b>	<b>4.545.109.400,00</b>	
<b>3.27.02</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>3.300.000.000,00</b>	
<b>3.27.02.1.04</b>	<b>Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</b>	<b>3.300.000.000,00</b>	
3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3.300.000.000,00	
<b>3.27.04</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>548.354.600,00</b>	
<b>3.27.04.1.03</b>	<b>Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan</b>	<b>548.354.600,00</b>	
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	548.354.600,00	
<b>3.27.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>696.754.800,00</b>	
<b>3.27.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.400.000,00</b>	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.400.000,00	
<b>3.27.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>13.200.000,00</b>	
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.200.000,00	
<b>3.27.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>76.339.400,00</b>	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.757.400,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	
3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.854.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.592.000,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.136.000,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	
<b>3.27.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4.470.000,00</b>	
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.470.000,00	
<b>3.27.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>306.254.900,00</b>	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.638.900,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	146.616.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>3.27.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>288.090.500,00</b>	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	229.251.500,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.525.000,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.314.000,00	
<b>3.28</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>6.916.098.727,00</b>	
<b>2.11.3.28.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>	<b>2.135.632.002,00</b>	
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>1.380.256.202,00</b>	
<b>3.28.03.1.04</b>	<b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>	<b>546.857.102,00</b>	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	33.183.500,00	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	271.150.000,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	144.568.750,00	
3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug	97.954.852,00	
<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	<b>416.749.800,00</b>	
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	20.549.250,00	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	396.200.550,00	
<b>3.28.03.1.07</b>	<b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>	<b>134.252.200,00</b>	
3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	92.150.600,00	
3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	42.101.600,00	
<b>3.28.03.1.09</b>	<b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>	<b>282.397.100,00</b>	
3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	23.017.300,00	
3.28.03.1.09.0003	Sertifikasi Mutu Benih	17.884.000,00	
3.28.03.1.09.0004	Sertifikasi Mutu Bibit	14.732.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	17.413.000,00	
3.28.03.1.09.0009	Pengelolaan Sumber Benih	209.350.800,00	
<b>3.28.04</b>	<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	<b>613.165.800,00</b>	
<b>3.28.04.1.01</b>	<b>Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi</b>	<b>189.899.200,00</b>	
3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	20.751.600,00	
3.28.04.1.01.0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	99.447.700,00	
3.28.04.1.01.0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	69.699.900,00	
<b>3.28.04.1.03</b>	<b>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</b>	<b>423.266.600,00</b>	
3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	345.344.850,00	
3.28.04.1.03.0009	Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah	77.921.750,00	
<b>3.28.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>142.210.000,00</b>	
<b>3.28.05.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	<b>142.210.000,00</b>	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	93.847.000,00	
3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	48.363.000,00	
<b>2.11.3.28.0.00.02.0001</b>	<b>BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA</b>	<b>4.780.466.725,00</b>	
<b>3.28.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>4.780.466.725,00</b>	
<b>3.28.03.1.02</b>	<b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>	<b>254.726.000,00</b>	
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	254.726.000,00	
<b>3.28.03.1.03</b>	<b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>	<b>3.860.072.660,00</b>	
3.28.03.1.03.0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	423.811.000,00	
3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	3.436.261.660,00	
<b>3.28.03.1.05</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>	<b>665.668.065,00</b>	
3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	665.668.065,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>3.29</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>	<b>271.723.000,00</b>	
<b>1.03.1.04.3.29.13.0000</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>	<b>271.723.000,00</b>	
<b>3.29.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>	<b>70.000.000,00</b>	
<b>3.29.02.1.01</b>	<b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>40.000.000,00</b>	
3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	40.000.000,00	
<b>3.29.02.1.03</b>	<b>Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>30.000.000,00</b>	
3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	5.000.000,00	
3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	25.000.000,00	
<b>3.29.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	<b>70.000.000,00</b>	
<b>3.29.03.1.01</b>	<b>Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</b>	<b>10.000.000,00</b>	
3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	10.000.000,00	
<b>3.29.03.1.03</b>	<b>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</b>	<b>25.000.000,00</b>	
3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	10.000.000,00	
3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	15.000.000,00	
<b>3.29.03.1.04</b>	<b>Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</b>	<b>30.000.000,00</b>	
3.29.03.1.04.0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	30.000.000,00	
<b>3.29.03.1.07</b>	<b>Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	<b>5.000.000,00</b>	
3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000,00	
<b>3.29.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN</b>	<b>86.723.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>3.29.05.1.07</b>	<b>Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi</b>	<b>86.723.000,00</b>	
3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	10.000.000,00	
3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	76.723.000,00	
<b>3.29.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>45.000.000,00</b>	
<b>3.29.06.1.02</b>	<b>Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</b>	<b>45.000.000,00</b>	
3.29.06.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	30.000.000,00	
3.29.06.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	15.000.000,00	
<b>3.30</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	<b>614.000.500,00</b>	
<b>3.31.3.30.1.03.02.0000</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	<b>614.000.500,00</b>	
<b>3.30.02</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>30.000.000,00</b>	
<b>3.30.02.1.04</b>	<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</b>	<b>30.000.000,00</b>	
3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	30.000.000,00	
<b>3.30.04</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>114.000.000,00</b>	
<b>3.30.04.1.02</b>	<b>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b>	<b>114.000.000,00</b>	
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	5.000.000,00	
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	109.000.000,00	
<b>3.30.05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>50.000.000,00</b>	
<b>3.30.05.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi</b>	<b>50.000.000,00</b>	
3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	50.000.000,00	
<b>3.30.06</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>210.000.500,00</b>	
<b>3.30.06.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>200.000.500,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.30.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	200.000.500,00	
<b>3.30.06.1.03</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10.000.000,00</b>	
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	10.000.000,00	
<b>3.30.07</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>210.000.000,00</b>	
<b>3.30.07.1.02</b>	<b>Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>210.000.000,00</b>	
3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	210.000.000,00	
<b>3.31</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>	<b>20.302.315.034,00</b>	
<b>3.31.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>18.291.051.134,00</b>	
<b>3.31.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>58.052.900,00</b>	
3.31.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	58.052.900,00	
<b>3.31.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>135.252.000,00</b>	
3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	
3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.000.000,00	
3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.000.000,00	
3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.500.000,00	
3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.764.000,00	
<b>3.31.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>88.236.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.31.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.636.000,00	
<b>3.31.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>367.013.300,00</b>	
3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.096.000,00	
3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242.395.300,00	
3.31.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.712.000,00	
3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.888.000,00	
3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.000.000,00	
3.31.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.922.000,00	
<b>3.31.3.30.0.00.02.0001</b>	<b>BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA</b>	<b>1.879.806.700,00</b>	
<b>3.31.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.240.000,00</b>	
3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.240.000,00	
<b>3.31.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.320.000,00</b>	
3.31.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.320.000,00	
<b>3.31.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.584.556.000,00</b>	
3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	658.900.000,00	
<b>3.31.3.30.1.03.02.0000</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	<b>18.422.508.334,00</b>	
<b>3.31.03</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>10.000.000,00</b>	
<b>3.31.03.1.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</b>	<b>10.000.000,00</b>	
3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	10.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>3.31.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>18.291.051.134,00</b>	
<b>3.31.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>30.500.000,00</b>	
3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	
3.31.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.500.000,00	
3.31.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	
<b>3.31.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16.134.293.534,00</b>	
3.31.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.062.237.534,00	
3.31.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.056.000,00	
<b>3.31.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>135.252.000,00</b>	
3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.988.000,00	
3.31.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.000.000,00	
<b>3.31.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>88.236.000,00</b>	
3.31.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.600.000,00	
<b>3.31.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.477.703.400,00</b>	
3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	345.599.400,00	
3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.132.104.000,00	
<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>109.999.950,00</b>	
<b>3.31.02.1.01</b>	<b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	<b>109.999.950,00</b>	
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	39.999.950,00	
3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	70.000.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>3.31.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>11.457.250,00</b>	
<b>3.31.04.1.01</b>	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>	<b>11.457.250,00</b>	
3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	11.457.250,00	
<b>3.31.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>18.291.051.134,00</b>	
<b>3.31.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16.134.293.534,00</b>	
3.31.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000,00	
3.31.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000,00	
<b>3.31.3.30.4.01.02.0001</b>	<b>BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA</b>	<b>1.879.806.700,00</b>	
<b>3.31.02</b>	<b>PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>199.675.000,00</b>	
<b>3.31.02.1.01</b>	<b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	<b>199.675.000,00</b>	
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	199.675.000,00	
<b>3.31.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.680.131.700,00</b>	
<b>3.31.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>24.730.400,00</b>	
3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.920.400,00	
3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	325.000,00	
3.31.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.281.000,00	
3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.325.000,00	
3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.115.000,00	
3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.764.000,00	
3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>3.31.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.584.556.000,00</b>	
3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	925.656.000,00	
<b>3.31.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>51.285.300,00</b>	
3.31.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.327.300,00	
3.31.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.578.000,00	
3.31.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.380.000,00	
<b>3.32</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>	<b>240.000.000,00</b>	
<b>2.07.3.32.0.00.02.0000</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>	<b>240.000.000,00</b>	
<b>3.32.03</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>240.000.000,00</b>	
<b>3.32.03.1.01</b>	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>240.000.000,00</b>	
3.32.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	70.000.000,00	
3.32.03.1.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	170.000.000,00	
<b>4</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>4.01</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>131.696.631.493,00</b>	
<b>1.01.2.19.0.00.03.0000</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>	<b>200.000.000,00</b>	
<b>4.01.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>200.000.000,00</b>	
<b>4.01.10.5.02</b>	<b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>	<b>200.000.000,00</b>	
4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	200.000.000,00	
<b>1.06.2.22.4.01.01.0000</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>100.000.000,00</b>	
4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	100.000.000,00	
<b>2.07.4.01.2.22.02.0001</b>	<b>BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS</b>	<b>114.898.100,00</b>	
4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	114.898.100,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.13.2.12.0.00.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.815.024.700,00	
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.086.828.700,00	
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	246.003.950,00	
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	246.003.950,00	
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	3.840.824.750,00	
4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3.840.824.750,00	
4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1.728.196.000,00	
4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	1.728.196.000,00	
4.01.10.5.01.0010	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1.728.196.000,00	
3.31.3.30.4.01.02.0001	BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	200.425.000,00	
4.01.10.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	200.425.000,00	
4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	200.425.000,00	
4.01.0.00.0.00.01.0001	BIRO TATA PEMERINTAHAN	830.982.150,00	
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	403.421.600,00	
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	120.024.000,00	
4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	94.482.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	427.560.550,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.051.700,00	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.960.900,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.154.850,00	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.538.000,00	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3.996.950,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>218.880.000,00</b>	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.297.000,00	
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>167.129.000,00</b>	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.166.000,00	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0002</b>	<b>BIRO HUKUM</b>	<b>3.691.507.772,00</b>	
<b>4.01.05</b>	<b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>	<b>2.443.780.872,00</b>	
<b>4.01.05.1.01</b>	<b>Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan</b>	<b>469.816.800,00</b>	
4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	185.201.000,00	
4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	25.745.000,00	
4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	147.480.000,00	
4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	111.390.800,00	
<b>4.01.05.1.02</b>	<b>Fasilitasi Bantuan Hukum</b>	<b>1.973.964.072,00</b>	
4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	554.064.000,00	
4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	1.419.900.072,00	
<b>4.01.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>463.074.000,00</b>	
<b>4.01.10.5.01</b>	<b>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan</b>	<b>463.074.000,00</b>	
4.01.10.5.01.0007	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	205.184.000,00	
4.01.10.5.01.0009	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	257.890.000,00	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>784.652.900,00</b>	
<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.765.800,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.245.800,00	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0003</b>	<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>3.930.623.950,00</b>	
<b>4.01.04</b>	<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>3.511.656.400,00</b>	
<b>4.01.04.1.01</b>	<b>Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</b>	<b>3.102.429.000,00</b>	
4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	225.000,00	
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	3.102.204.000,00	
<b>4.01.04.1.02</b>	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>	<b>352.584.900,00</b>	
4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	163.263.500,00	
4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	189.321.400,00	
<b>4.01.04.1.03</b>	<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b>	<b>56.642.500,00</b>	
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	56.642.500,00	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>418.967.550,00</b>	
<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10.666.600,00</b>	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.459.000,00	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.385.600,00	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.822.000,00	
<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.778.000,00</b>	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.663.000,00	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.713.000,00	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.402.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>4.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>12.425.000,00</b>	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.425.000,00	
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>208.003.950,00</b>	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.872.000,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.788.900,00	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.316.000,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.090.000,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.764.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.173.050,00	
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.900.000,00</b>	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.900.000,00	
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>165.194.000,00</b>	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.592.000,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	96.054.000,00	
4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.340.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.448.000,00	
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.760.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.0.00.0.00.01.0004	<b>BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>499.098.250,00</b>	
4.01.06	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>243.350.500,00</b>	
4.01.06.1.01	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</b>	<b>221.585.100,00</b>	
4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	155.980.100,00	
4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	65.605.000,00	
4.01.06.1.02	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</b>	<b>19.507.900,00</b>	
4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	19.507.900,00	
4.01.06.1.03	<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>	<b>2.257.500,00</b>	
4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	2.257.500,00	
4.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>255.747.750,00</b>	
4.01.01.1.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12.430.800,00</b>	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.940.000,00	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.570.000,00	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.920.800,00	
4.01.01.1.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.055.000,00</b>	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.780.000,00	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.853.000,00	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3.422.000,00	
4.01.01.1.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>7.800.000,00</b>	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.800.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>95.814.400,00</b>	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.220.000,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.329.200,00	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.617.200,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.720.000,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.868.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.060.000,00	
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.600.000,00</b>	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.900.000,00	
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>126.047.550,00</b>	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.139.200,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.386.350,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.418.000,00	
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.104.000,00	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0005</b>	<b>BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>875.960.900,00</b>	
<b>4.01.08</b>	<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>606.920.000,00</b>	
<b>4.01.08.1.01</b>	<b>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>50.000.000,00</b>	
4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	50.000.000,00	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>269.040.900,00</b>	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10.802.700,00</b>	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.221.400,00	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.878.600,00	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.702.700,00	
<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.941.200,00</b>	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.799.000,00	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.542.200,00	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.600.000,00	
<b>4.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.951.000,00</b>	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.951.000,00	
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>131.169.000,00</b>	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.391.000,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.515.400,00	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.550.000,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.482.600,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.230.000,00	
<b>4.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>6.000.000,00</b>	
4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>500.000,00</b>	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>101.677.000,00</b>	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.385.000,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.318.000,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.514.000,00	
4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.460.000,00	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0006</b>	<b>BIRO ORGANISASI</b>	<b>2.095.738.550,00</b>	
<b>4.01.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>1.701.174.000,00</b>	
<b>4.01.10.5.01</b>	<b>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan</b>	<b>714.842.000,00</b>	
4.01.10.5.01.0001	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	220.688.000,00	
4.01.10.5.01.0004	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	34.404.000,00	
4.01.10.5.01.0006	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	281.250.000,00	
4.01.10.5.01.0008	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	178.500.000,00	
<b>4.01.10.5.02</b>	<b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>	<b>986.332.000,00</b>	
4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	986.332.000,00	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>394.564.550,00</b>	
<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5.332.900,00</b>	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.165.000,00	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.468.000,00	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.699.900,00	
<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>14.493.750,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.493.800,00	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.000.000,00	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.999.950,00	
<b>4.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>11.348.000,00</b>	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.348.000,00	
<b>4.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>49.425.000,00</b>	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.425.000,00	
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>162.495.600,00</b>	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.727.400,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.487.600,00	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.916.000,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.952.600,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.812.000,00	
4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	600.000,00	
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>11.700.000,00</b>	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.700.000,00	
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>139.769.300,00</b>	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.205.300,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.966.000,00	
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.598.000,00	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0007</b>	<b>BIRO UMUM DAN PROTOKOL</b>	<b>17.270.989.560,00</b>	
<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12.117.000,00</b>	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.993.000,00	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.549.000,00	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.575.000,00	
<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.920.500,00</b>	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.015.000,00	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	555.500,00	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.350.000,00	
<b>4.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>70.597.000,00</b>	
4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.500.000,00	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60.097.000,00	
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.609.488.420,00</b>	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120.222.000,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	189.388.900,00	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	181.891.270,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	144.591.250,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	47.004.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	768.659.000,00	
4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	157.732.000,00	
<b>4.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>148.630.000,00</b>	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112.830.000,00	
4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.800.000,00	
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.990.193.000,00</b>	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.950.000,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.103.828.000,00	
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128.759.000,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.749.656.000,00	
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.397.264.590,00</b>	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	554.866.000,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.367.218.590,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	260.880.000,00	
4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.085.800.000,00	
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	128.500.000,00	
<b>4.01.01.1.13</b>	<b>Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>997.691.200,00</b>	
4.01.01.1.13.0002	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	33.086.000,00	
4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	964.605.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>4.01.01.1.14</b>	<b>Fasilitasi Keprotokolan</b>	<b>5.034.087.850,00</b>	
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	2.836.211.300,00	
4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.484.558.000,00	
4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	713.318.550,00	
<b>4.01.0.00.0.00.01.0009</b>	<b>BIRO PENGADAAN BARANG/JASA</b>	<b>411.833.700,00</b>	
<b>4.01.07</b>	<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	<b>150.751.000,00</b>	
<b>4.01.07.1.01</b>	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>93.177.000,00</b>	
4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	93.177.000,00	
<b>4.01.07.1.02</b>	<b>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>	<b>27.587.000,00</b>	
4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	27.587.000,00	
<b>4.01.07.1.03</b>	<b>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>29.987.000,00</b>	
4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	29.987.000,00	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>261.082.700,00</b>	
<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10.654.000,00</b>	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.678.000,00	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.616.000,00	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.360.000,00	
<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.819.000,00</b>	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.560.000,00	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.970.000,00	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.289.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>4.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>8.924.000,00</b>	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.924.000,00	
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>151.110.400,00</b>	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.434.000,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.465.400,00	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.040.000,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.460.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.711.000,00	
<b>4.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>15.600.000,00</b>	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.600.000,00	
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>600.000,00</b>	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>65.375.300,00</b>	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.808.500,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.988.800,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.088.000,00	
4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.490.000,00	
<b>4.01.0.00.0.00.02.0000</b>	<b>PANIRADYA KAISTIMEWAN</b>	<b>27.491.567.847,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>4.01.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>18.432.577.500,00</b>	
<b>4.01.10.5.03</b>	<b>Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara</b>	<b>985.702.000,00</b>	
4.01.10.5.03.0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	529.568.000,00	
4.01.10.5.03.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	456.134.000,00	
<b>4.01.10.5.04</b>	<b>Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>	<b>1.632.353.000,00</b>	
4.01.10.5.04.0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	1.008.353.000,00	
4.01.10.5.04.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	624.000.000,00	
<b>4.01.10.5.05</b>	<b>Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang</b>	<b>3.308.620.000,00</b>	
4.01.10.5.05.0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	740.190.000,00	
4.01.10.5.05.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	586.430.000,00	
4.01.10.5.05.0003	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	822.000.000,00	
4.01.10.5.05.0004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	1.160.000.000,00	
<b>4.01.10.5.06</b>	<b>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</b>	<b>2.373.902.500,00</b>	
4.01.10.5.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	1.191.902.500,00	
4.01.10.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	1.182.000.000,00	
<b>4.01.10.5.07</b>	<b>Sarana dan Prasarana Keistimewaan</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	
4.01.10.5.07.0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	1.500.000.000,00	
<b>4.01.10.5.08</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Parampara Praja</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	
4.01.10.5.08.0001	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	1.000.000.000,00	
<b>4.01.10.5.09</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan</b>	<b>7.632.000.000,00</b>	
4.01.10.5.09.0001	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	7.632.000.000,00	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>9.058.990.347,00</b>	
<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12.442.000,00</b>	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.750.000,00	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.499.000,00	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.193.000,00	
<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.213.865.547,00</b>	
4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.198.166.097,00	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.908.000,00	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.015.000,00	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.776.450,00	
<b>4.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>11.543.500,00</b>	
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.543.500,00	
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>125.022.000,00</b>	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.412.000,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.065.900,00	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.950.000,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.462.100,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.532.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.600.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>333.720.000,00</b>	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.400.000,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	310.320.000,00	
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>362.397.300,00</b>	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.286.000,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	289.497.300,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.614.000,00	
<b>4.01.1.03.2.22.01.0005</b>	<b>BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN</b>	<b>875.960.900,00</b>	
<b>4.01.08</b>	<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>606.920.000,00</b>	
<b>4.01.08.1.02</b>	<b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>556.920.000,00</b>	
4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	556.920.000,00	
<b>4.01.2.10.2.22.01.0002</b>	<b>BIRO HUKUM</b>	<b>3.691.507.772,00</b>	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>784.652.900,00</b>	
<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5.469.000,00</b>	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.169.000,00	
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	900.000,00	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.400.000,00	
<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.765.800,00</b>	
4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	689.000,00	
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1.831.000,00	
<b>4.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.737.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.737.000,00	
<b>4.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>42.441.000,00</b>	
4.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.941.000,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39.500.000,00	
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>389.446.300,00</b>	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.230.000,00	
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.232.200,00	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.793.000,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.925.000,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.976.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	271.290.100,00	
<b>4.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>69.370.000,00</b>	
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	12.700.000,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.120.000,00	
4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.550.000,00	
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.819.000,00</b>	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	919.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.900.000,00	
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>254.604.800,00</b>	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.978.000,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.180.800,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.326.000,00	
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.120.000,00	
<b>4.01.2.12.2.22.01.0001</b>	<b>BIRO TATA PEMERINTAHAN</b>	<b>830.982.150,00</b>	
<b>4.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>	<b>403.421.600,00</b>	
<b>4.01.03.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</b>	<b>120.024.000,00</b>	
4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	25.542.000,00	
<b>4.01.03.1.02</b>	<b>Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>	<b>78.820.600,00</b>	
4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	78.820.600,00	
<b>4.01.03.1.03</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>204.577.000,00</b>	
4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	204.577.000,00	
<b>4.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>427.560.550,00</b>	
<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12.051.700,00</b>	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.694.800,00	
<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>14.154.850,00</b>	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.619.900,00	
<b>4.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.845.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.845.000,00	
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>218.880.000,00</b>	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.918.000,00	
4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.987.000,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.952.000,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.500.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.226.000,00	
<b>4.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.500.000,00</b>	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	
<b>4.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>167.129.000,00</b>	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.228.000,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.735.000,00	
<b>4.01.2.13.2.10.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>65.130.367.414,00</b>	
<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>58.867.687.498,00</b>	
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.415.500,00	
<b>4.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.494.675.000,00</b>	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.494.675.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>4.01.01.1.11</b>	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>3.795.153.916,00</b>	
4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	236.653.916,00	
4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	157.500.000,00	
4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60.000.000,00	
4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.341.000.000,00	
<b>4.01.01.1.12</b>	<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>972.851.000,00</b>	
4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	774.967.000,00	
4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	134.000.000,00	
4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	63.884.000,00	
<b>4.01.2.13.2.10.01.0001</b>	<b>BIRO TATA PEMERINTAHAN</b>	<b>830.982.150,00</b>	
<b>4.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12.051.700,00</b>	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.396.000,00	
<b>4.01.2.22.2.10.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	<b>65.130.367.414,00</b>	
<b>4.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>58.867.687.498,00</b>	
4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.853.271.998,00	
<b>5.03.4.01.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>997.828.600,00</b>	
<b>4.01.10</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>997.828.600,00</b>	
<b>4.01.10.5.02</b>	<b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>	<b>997.828.600,00</b>	
4.01.10.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	187.411.000,00	
4.01.10.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	810.417.600,00	
<b>5.04.4.01.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>2.039.785.000,00</b>	
4.01.10.5.02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	2.039.785.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>4.02</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>328.851.987.629,00</b>	
<b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>	<b>328.851.987.629,00</b>	
<b>4.02.02</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>64.922.297.752,00</b>	
<b>4.02.02.1.01</b>	<b>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>	<b>13.995.301.356,00</b>	
4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.617.247.000,00	
4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	4.450.715.000,00	
4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	964.167.856,00	
4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	3.413.647.500,00	
4.02.02.1.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	3.549.524.000,00	
<b>4.02.02.1.02</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>2.272.578.000,00</b>	
4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	474.728.000,00	
4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	83.351.000,00	
4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	528.227.000,00	
4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	475.557.000,00	
4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	37.460.000,00	
4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	673.255.000,00	
<b>4.02.02.1.03</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>4.605.027.000,00</b>	
4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.608.252.000,00	
4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	998.925.000,00	
4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	998.925.000,00	
4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	998.925.000,00	
<b>4.02.02.1.04</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>10.926.621.196,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	4.067.636.200,00	
4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.420.617.000,00	
4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	781.420.000,00	
4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4.357.693.796,00	
4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	299.254.200,00	
<b>4.02.02.1.05</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>7.471.945.400,00</b>	
4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	281.192.400,00	
4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	7.190.753.000,00	
<b>4.02.02.1.06</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>409.532.400,00</b>	
4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	409.532.400,00	
<b>4.02.02.1.08</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>25.241.292.400,00</b>	
4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14.347.067.500,00	
4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	15.265.400,00	
4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.845.593.700,00	
4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	9.033.365.800,00	
<b>4.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>263.929.689.877,00</b>	
<b>4.02.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>38.131.200,00</b>	
4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.125.000,00	
4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.619.000,00	
4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.387.200,00	
<b>4.02.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.515.078.400,00</b>	
4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.427.403.100,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.518.000,00	
4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.607.500,00	
4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	60.549.800,00	
<b>4.02.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>20.890.000,00</b>	
4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.890.000,00	
<b>4.02.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>17.869.000,00</b>	
4.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	11.505.000,00	
4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.364.000,00	
<b>4.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.221.077.600,00</b>	
4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.668.000,00	
4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	185.901.600,00	
4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	221.831.000,00	
4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	109.940.000,00	
4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	662.737.000,00	
<b>4.02.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>198.479.253.000,00</b>	
4.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	878.913.000,00	
4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	600.340.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	197.000.000.000,00	
<b>4.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.576.353.264,00</b>	
4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.182.563.500,00	
4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.393.789.764,00	
<b>4.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.790.273.700,00</b>	
4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	541.002.100,00	
4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	813.017.600,00	
4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	307.380.000,00	
4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	128.874.000,00	
<b>4.02.01.1.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>43.584.943.509,00</b>	
4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	42.752.741.509,00	
4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	532.978.000,00	
4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	299.224.000,00	
<b>4.02.01.1.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>3.685.820.204,00</b>	
4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	2.769.567.204,00	
4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	916.253.000,00	
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>5.01</b>	<b>PERENCANAAN</b>	<b>22.283.511.646,00</b>	
<b>5.01.2.20.5.05.01.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH</b>	<b>22.283.511.646,00</b>	
<b>5.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>2.163.976.535,00</b>	
<b>5.01.02.1.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>938.891.400,00</b>	
5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	88.239.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	850.651.600,00	
<b>5.01.02.1.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>1.225.085.135,00</b>	
5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.196.187.135,00	
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	28.898.000,00	
<b>5.01.03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>724.311.600,00</b>	
<b>5.01.03.1.01</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>555.935.000,00</b>	
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	83.986.000,00	
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	471.949.000,00	
<b>5.01.03.1.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>84.545.000,00</b>	
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	84.545.000,00	
<b>5.01.03.1.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>83.831.600,00</b>	
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	83.831.600,00	
<b>5.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>19.395.223.511,00</b>	
<b>5.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>38.654.500,00</b>	
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.892.000,00	
5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.990.000,00	
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.772.500,00	
<b>5.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16.571.919.586,00</b>	
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.530.196.986,00	
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11.914.600,00	
5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.435.500,00	
5.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	21.372.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>5.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>12.539.950,00</b>	
5.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.539.950,00	
<b>5.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>65.583.950,00</b>	
5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	65.583.950,00	
<b>5.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>883.916.425,00</b>	
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.457.800,00	
5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.000.700,00	
5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.632.000,00	
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.824.750,00	
5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.508.000,00	
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	660.993.850,00	
5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.499.325,00	
<b>5.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>678.951.000,00</b>	
5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	151.820.000,00	
5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.551.000,00	
5.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	436.580.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>5.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>575.890.900,00</b>	
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.425.000,00	
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.897.900,00	
5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.968.000,00	
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	468.600.000,00	
<b>5.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>567.767.200,00</b>	
5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.568.000,00	
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	226.370.400,00	
5.01.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	10.150.000,00	
5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	11.168.000,00	
5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.927.000,00	
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	197.219.800,00	
5.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.364.000,00	
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>	<b>1.149.134.838.528,00</b>	
<b>5.02.0.00.0.00.04.0000</b>	<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET</b>	<b>1.133.499.725.678,00</b>	
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>1.032.728.487.406,00</b>	
<b>5.02.02.1.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>2.339.205.500,00</b>	
5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	39.231.000,00	
5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	33.626.000,00	
5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	728.866.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.432.875.750,00	
5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	94.981.750,00	
5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	9.625.000,00	
<b>5.02.02.1.02</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>17.723.300,00</b>	
5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	5.000.000,00	
5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	5.000.000,00	
5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5.000.000,00	
5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2.723.300,00	
<b>5.02.02.1.03</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>74.766.000,00</b>	
5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	15.990.000,00	
5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	58.776.000,00	
<b>5.02.02.1.04</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>259.144.500,00</b>	
5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	8.422.600,00	
5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	17.326.100,00	
5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	51.502.000,00	
5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3.524.600,00	
5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4.639.000,00	
5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	53.305.300,00	
5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	8.974.900,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	111.450.000,00	
<b>5.02.02.1.05</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>1.030.037.648.106,00</b>	
5.02.02.1.05.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	827.423.000,00	
5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	593.814.094.446,00	
5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	15.000.000.000,00	
5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	420.396.130.660,00	
<b>5.02.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>2.805.994.900,00</b>	
<b>5.02.03.1.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>2.805.994.900,00</b>	
5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	331.813.000,00	
5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	82.581.600,00	
5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	246.917.000,00	
5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.456.990.800,00	
5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	207.079.500,00	
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	480.613.000,00	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.184.727.350,00</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>3.184.727.350,00</b>	
5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	2.716.454.400,00	
5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	37.171.000,00	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	336.282.000,00	
5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	57.670.000,00	
5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	37.149.950,00	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>94.780.516.022,00</b>	
<b>5.02.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9.593.500,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.994.400,00	
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.998.600,00	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.600.500,00	
<b>5.02.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>91.930.340.122,00</b>	
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	91.903.020.622,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.320.000,00	
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.999.800,00	
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.999.700,00	
<b>5.02.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>34.100.000,00</b>	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	34.100.000,00	
<b>5.02.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>6.233.000,00</b>	
5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.233.000,00	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>631.515.200,00</b>	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.558.600,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128.478.600,00	
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.769.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.365.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.380.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	333.958.000,00	
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	101.006.000,00	
<b>5.02.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>148.690.000,00</b>	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.690.000,00	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.644.477.000,00</b>	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.250.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	918.880.000,00	
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.760.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	626.587.000,00	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>375.567.200,00</b>	
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.726.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.007.200,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.834.000,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000,00	
<b>5.02.0.00.0.00.04.0001</b>	<b>KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA</b>	<b>2.226.503.700,00</b>	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>206.671.000,00</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>206.671.000,00</b>	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	42.214.500,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	164.456.500,00	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>2.019.832.700,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>5.02.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.740.000,00</b>	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.740.000,00	
<b>5.02.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.820.000,00</b>	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.820.000,00	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>54.511.200,00</b>	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.643.000,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.699.500,00	
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.799.000,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.788.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.781.700,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.800.000,00	
<b>5.02.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>58.970.000,00</b>	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.970.000,00	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.403.684.000,00</b>	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	445.501.000,00	
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.051.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	925.632.000,00	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>482.107.500,00</b>	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.994.500,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	164.880.000,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.000.000,00	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	173.233.000,00	
<b>5.02.0.00.0.00.04.0002</b>	<b>KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL</b>	<b>4.273.461.400,00</b>	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>596.571.000,00</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>596.571.000,00</b>	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	75.840.000,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	520.731.000,00	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>3.676.890.400,00</b>	
<b>5.02.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.740.000,00</b>	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.740.000,00	
<b>5.02.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.820.000,00</b>	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.820.000,00	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>123.772.500,00</b>	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.060.000,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.816.000,00	
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.512.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.715.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.641.500,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.528.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.500.000,00	
<b>5.02.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>48.900.000,00</b>	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.900.000,00	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.694.603.600,00</b>	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	776.176.600,00	
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.258.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.793.169.000,00	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>789.054.300,00</b>	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	165.729.300,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	321.230.000,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	152.095.000,00	
<b>5.02.0.00.0.00.04.0003</b>	<b>KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL</b>	<b>2.267.388.700,00</b>	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>393.845.500,00</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>393.845.500,00</b>	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	55.261.000,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	338.584.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1.873.543.200,00</b>	
<b>5.02.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.740.000,00</b>	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.740.000,00	
<b>5.02.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.820.000,00</b>	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.820.000,00	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>45.310.000,00</b>	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.885.000,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.898.000,00	
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.950.000,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.100.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.793.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.764.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.920.000,00	
<b>5.02.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>65.400.000,00</b>	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.400.000,00	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.163.184.200,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.638.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	442.441.200,00	
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.650.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	679.455.000,00	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>579.089.000,00</b>	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	246.393.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	225.096.000,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.500.000,00	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.100.000,00	
<b>5.02.0.00.0.00.04.0004</b>	<b>KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO</b>	<b>2.502.806.250,00</b>	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>363.894.250,00</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>363.894.250,00</b>	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	68.502.650,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	295.391.600,00	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>2.138.912.000,00</b>	
<b>5.02.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.740.000,00</b>	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.740.000,00	
<b>5.02.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.820.000,00</b>	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.820.000,00	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>69.178.600,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.842.000,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.211.000,00	
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.611.600,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.804.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.982.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.528.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.200.000,00	
<b>5.02.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>53.100.000,00</b>	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.000.000,00	
5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.100.000,00	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.517.210.400,00</b>	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	960.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	626.951.400,00	
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.270.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	836.029.000,00	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>478.863.000,00</b>	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	162.252.300,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	153.493.000,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.861.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.256.000,00	
<b>5.02.0.00.0.00.04.0005</b>	<b>KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN</b>	<b>4.364.952.800,00</b>	
<b>5.02.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>763.151.600,00</b>	
<b>5.02.04.1.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>763.151.600,00</b>	
5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	37.379.900,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	725.771.700,00	
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>3.601.801.200,00</b>	
<b>5.02.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.740.000,00</b>	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.740.000,00	
<b>5.02.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>10.820.000,00</b>	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.820.000,00	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>66.332.900,00</b>	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.612.000,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.712.900,00	
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.185.000,00	
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.079.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.404.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.340.000,00	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>5.02.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>24.755.000,00</b>	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.755.000,00	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.689.074.400,00</b>	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	700.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	980.608.400,00	
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	69.850.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.637.916.000,00	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>801.078.900,00</b>	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.835.900,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	381.906.000,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	71.824.000,00	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	208.513.000,00	
<b>5.03</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>	<b>25.250.045.001,00</b>	
<b>5.03.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>25.250.045.001,00</b>	
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>2.977.443.700,00</b>	
<b>5.03.02.1.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>268.082.700,00</b>	
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	165.994.000,00	
<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>22.272.601.301,00</b>	
<b>5.03.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>15.675.308.701,00</b>	
5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.651.346.951,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>5.03.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.722.026.000,00</b>	
5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	2.532.680.000,00	
<b>5.03.02</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>2.977.443.700,00</b>	
<b>5.03.02.1.01</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>522.484.900,00</b>	
5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	7.432.200,00	
5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	240.833.000,00	
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	117.932.800,00	
5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	122.513.500,00	
5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	33.773.400,00	
<b>5.03.02.1.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>979.609.200,00</b>	
5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	47.168.200,00	
5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	71.155.000,00	
5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	861.286.000,00	
<b>5.03.02.1.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>1.207.266.900,00</b>	
5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	349.064.800,00	
5.03.02.1.03.0003	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	29.662.400,00	
5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	205.898.200,00	
5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	594.129.400,00	
5.03.02.1.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	5.576.450,00	
5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	22.935.650,00	
<b>5.03.02.1.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>268.082.700,00</b>	
5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	24.022.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	20.368.000,00	
5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	45.107.350,00	
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12.591.350,00	
<b>5.03.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>22.272.601.301,00</b>	
<b>5.03.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9.085.000,00</b>	
5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	
5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.385.000,00	
5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.700.000,00	
<b>5.03.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>15.675.308.701,00</b>	
5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17.766.200,00	
5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.195.550,00	
5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4.000.000,00	
<b>5.03.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>20.681.000,00</b>	
5.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.681.000,00	
<b>5.03.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>355.072.650,00</b>	
5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.367.000,00	
5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.899.800,00	
5.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.490.000,00	
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.468.850,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.352.000,00	
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274.495.000,00	
<b>5.03.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.722.026.000,00</b>	
5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	979.346.000,00	
5.03.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	210.000.000,00	
<b>5.03.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.088.507.150,00</b>	
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.032.650,00	
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	841.210.500,00	
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.230.264.000,00	
<b>5.03.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>401.920.800,00</b>	
5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.894.000,00	
5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	194.343.800,00	
5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.283.000,00	
5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82.400.000,00	
<b>5.04</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>23.239.700.145,00</b>	
<b>5.04.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>23.239.700.145,00</b>	
<b>5.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>8.720.717.750,00</b>	
<b>5.04.02.1.01</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>116.073.500,00</b>	
5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	42.773.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	73.300.500,00	
<b>5.04.02.1.02</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>8.604.644.250,00</b>	
5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	282.351.800,00	
5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	71.104.500,00	
5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	38.852.400,00	
5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	8.212.335.550,00	
<b>5.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>14.518.982.395,00</b>	
<b>5.04.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.024.000,00</b>	
5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.385.800,00	
5.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.958.000,00	
5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.680.200,00	
<b>5.04.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.701.523.855,00</b>	
5.04.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.330.000,00	
5.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.800.000,00	
5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4.000.000,00	
<b>5.04.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>13.293.000,00</b>	
5.04.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.293.000,00	
<b>5.04.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>12.360.000,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.04.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.860.000,00	
5.04.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.500.000,00	
<b>5.04.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>181.660.500,00</b>	
5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.980.000,00	
5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.579.700,00	
5.04.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.760.800,00	
5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	14.231.000,00	
5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.725.000,00	
5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60.384.000,00	
<b>5.04.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>77.730.000,00</b>	
5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.730.000,00	
<b>5.04.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.789.998.440,00</b>	
5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.820.000,00	
5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	449.215.440,00	
5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.337.963.000,00	
<b>5.04.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>727.392.600,00</b>	
5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.358.000,00	
5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185.835.600,00	
5.04.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	11.428.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	303.550.000,00	
5.04.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	202.221.000,00	
<b>5.04.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>10.701.523.855,00</b>	
5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.678.393.855,00	
<b>5.05</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>198.982.900,00</b>	
<b>5.01.2.20.5.05.01.0000</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH</b>	<b>198.982.900,00</b>	
<b>5.05.02</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>198.982.900,00</b>	
<b>5.05.02.1.02</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>42.909.100,00</b>	
5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	42.909.100,00	
<b>5.05.02.1.04</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>156.073.800,00</b>	
5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	156.073.800,00	
<b>5.07</b>	<b>PENGELOLAAN PENGHUBUNG</b>	<b>7.655.776.395,00</b>	
<b>5.06.5.07.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN PENGHUBUNG DAERAH</b>	<b>7.655.776.395,00</b>	
<b>5.07.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>	<b>185.308.600,00</b>	
<b>5.07.02.1.01</b>	<b>Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</b>	<b>185.308.600,00</b>	
5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	113.985.600,00	
5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	71.323.000,00	
<b>5.07.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>7.470.467.795,00</b>	
<b>5.07.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12.150.000,00</b>	
5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.250.000,00	
5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.120.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.470.000,00	
5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.310.000,00	
<b>5.07.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.480.594.519,00</b>	
5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.466.653.519,00	
5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.596.000,00	
5.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	705.000,00	
5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.640.000,00	
<b>5.07.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>13.236.000,00</b>	
5.07.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.236.000,00	
<b>5.07.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>128.621.600,00</b>	
5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.190.800,00	
5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.615.000,00	
5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.616.800,00	
5.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.343.000,00	
5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72.856.000,00	
<b>5.07.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>40.840.000,00</b>	



URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.840.000,00	
<b>5.07.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.438.565.676,00</b>	
5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.600.000,00	
5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	308.531.500,00	
5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.118.434.176,00	
<b>5.07.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>356.460.000,00</b>	
5.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.860.000,00	
5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.600.000,00	
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>		
<b>6.01</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>27.251.720.750,00</b>	
<b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	<b>27.251.720.750,00</b>	
<b>6.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>5.964.975.500,00</b>	
<b>6.01.02.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>5.196.282.900,00</b>	
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	424.767.000,00	
6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	3.195.695.900,00	
6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	861.578.750,00	
6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	216.164.600,00	
6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	471.971.150,00	
6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	17.730.000,00	
6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8.375.500,00	
<b>6.01.02.1.02</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>768.692.600,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	16.818.600,00	
6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	751.874.000,00	
<b>6.01.03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>326.060.150,00</b>	
<b>6.01.03.1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>27.272.900,00</b>	
6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	325.000,00	
6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	26.947.900,00	
<b>6.01.03.1.02</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>298.787.250,00</b>	
6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	1.505.000,00	
6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2.400.000,00	
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	292.182.250,00	
6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2.700.000,00	
<b>6.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>20.960.685.100,00</b>	
<b>6.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>6.949.400,00</b>	
6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.697.000,00	
6.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.960.000,00	
6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.292.400,00	
<b>6.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>17.525.857.870,00</b>	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.514.904.470,00	
6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.936.000,00	
6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3.017.400,00	
<b>6.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>14.299.400,00</b>	
6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.299.400,00	
<b>6.01.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>287.858.200,00</b>	
6.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	650.000,00	
6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	287.208.200,00	
<b>6.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>385.728.000,00</b>	
6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.260.000,00	
6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.676.000,00	
6.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	38.241.000,00	
6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.548.000,00	
6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235.003.000,00	
6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	90.000.000,00	
<b>6.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>14.800.000,00</b>	
6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.800.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>6.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.748.817.600,00</b>	
6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.440.000,00	
6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	344.339.600,00	
6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.160.000,00	
6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.372.878.000,00	
<b>6.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>976.374.630,00</b>	
6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.376.000,00	
6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	355.779.600,00	
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	254.534.850,00	
6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	142.350.000,00	
6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	186.334.180,00	
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>		
<b>8.01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>27.372.714.723,00</b>	
<b>8.01.0.00.0.00.01.0000</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>27.372.714.723,00</b>	
<b>8.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>2.867.486.800,00</b>	
<b>8.01.02.1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>2.867.486.800,00</b>	
8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100.755.000,00	
8.01.02.1.01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	55.895.000,00	
8.01.02.1.01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	337.208.100,00	
8.01.02.1.01.0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	395.511.000,00	
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	1.978.117.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
<b>8.01.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	<b>11.230.614.500,00</b>	
<b>8.01.03.1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>11.230.614.500,00</b>	
8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	11.061.766.500,00	
8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	168.848.000,00	
<b>8.01.04</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>198.812.400,00</b>	
<b>8.01.04.1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>198.812.400,00</b>	
8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	33.219.000,00	
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	90.909.000,00	
8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	74.684.400,00	
<b>8.01.05</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>626.589.800,00</b>	
<b>8.01.05.1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>626.589.800,00</b>	
8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	51.297.000,00	
8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	198.639.900,00	
8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	376.652.900,00	
<b>8.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>2.316.190.600,00</b>	
<b>8.01.06.1.01</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>2.316.190.600,00</b>	
8.01.06.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5.058.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	618.159.000,00	
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1.692.972.800,00	
<b>8.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>10.133.020.623,00</b>	
<b>8.01.01.1.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>15.200.000,00</b>	
8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.500.000,00	
8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.000.000,00	
8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.700.000,00	
<b>8.01.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.933.098.115,00</b>	
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.909.003.115,00	
8.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.095.000,00	
8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.000.000,00	
8.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4.000.000,00	
<b>8.01.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>12.050.000,00</b>	
8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.050.000,00	
<b>8.01.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>387.839.400,00</b>	
8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.492.000,00	
8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.665.400,00	
8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.860.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.396.000,00	
8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	281.426.000,00	
<b>8.01.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>40.200.000,00</b>	
8.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.200.000,00	
<b>8.01.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.214.348.000,00</b>	
8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	229.640.000,00	
8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.464.000,00	
8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	917.244.000,00	
<b>8.01.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.530.285.108,00</b>	
8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.561.000,00	
8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	192.327.000,00	
8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.601.000,00	
8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.191.796.108,00	

## **BAB IV KONDISI DAN KEBIJAKAN ANGGARAN PEMBIAYAAN**

### **4.1 Kondisi Umum Pembiayaan**

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dan selisih antara penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut pembiayaan neto.

Kondisi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 berupa Defisit APBD, yaitu terdapat selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Berdasarkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 bahwa pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp189.958.000.000, jika dibandingkan Pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2024 yang dianggarkan sebesar Rp155.008.734.967 mengalami kenaikan sebesar Rp34.949.265.033 atau bertambah sebesar 22,55%.

#### **4.1.1 Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp298.000.000.000 jika dibandingkan Penerimaan Pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2024 yang dianggarkan sebesar Rp457.508.734.967 mengalami penurunan sebesar Rp159.508.734.967 atau berkurang sebesar 34,86%.

Penerimaan Pembiayaan tersebut berasal dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direncanakan sebesar Rp293.000.000.000; dan
- b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah direncanakan sebesar Rp5.000.000.000.

#### **4.1.2 Pengeluaran Pembiayaan**

Pada tahun 2025 pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal, dan pemberian pinjaman. Penyertaan modal diberikan kepada BUMD dengan prioritas untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, bertumbuh dan berkembang.

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp108.042.000.000, jika dibandingkan Pengeluaran Pembiayaan pada APBD



Tahun Anggaran 2024 yang dianggarkan sebesar Rp302.500.000.000 mengalami penurunan sebesar Rp194.458.000.000 atau turun sebesar 64,28%.

Pengeluaran Pembiayaan tersebut berasal dari:

- c. Penyertaan Modal Daerah direncanakan sebesar Rp105.542.000.000; dan
- d. Pemberian Pinjaman Daerah direncanakan sebesar Rp2.500.000.000.

**Tabel IV-1 Alokasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025**

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)
<b>6</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>189.958.000.000</b>
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>298.000.000.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	293.000.000.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.000.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>298.000.000.000</b>
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>108.042.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	105.542.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>108.042.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>189.958.000.000</b>

#### 4.2 Permasalahan Utama Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2025, anggaran Pembiayaan lebih diarahkan pada pemanfaatan sisa perhitungan dan penerimaan pemberian pinjaman daerah sebagai bagian pemenuhan kebutuhan belanja daerah. Permasalahan utama Pembiayaan Daerah tahun 2025 dapat diinventarisasi sebagai berikut:

1. Untuk menutup defisit, Pemda DIY mengandalkan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, yang jika tidak cermat dalam penghitungannya akan mengakibatkan adanya kegiatan yang tidak bisa didanai.
2. Pada pengeluaran pembiayaan, Pemda DIY masih berkewajiban memenuhi modal inti Bank BPD DIY sesuai dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 14 Tahun 2018.

#### 4.3 Kebijakan Umum Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan

transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan DIY berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Besaran penerimaan dari SiLPA tersebut dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024, serta perkiraan realisasi pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, hasil dari penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada tahun 2025 pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal dan pemberian pinjaman daerah. Penyertaan modal diberikan kepada BUMD dengan prioritas untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, bertumbuh dan berkembang.

Penyertaan modal daerah pada tahun 2025 diberikan kepada PT. Bank BPD DIY dan PT. Asuransi Bangun Askrida. Penambahan setoran modal pada PT. Bank BPD DIY didasarkan atas Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 14 Tahun 2018.

Pengeluaran pembiayaan untuk pemberian pinjaman diberikan kepada BUKP dengan bentuk dana bergulir kepada masyarakat. BUKP merupakan lembaga perkreditan milik Pemerintah Daerah yang menyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat, dan mudah guna mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat.

## BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan tema RKPD DIY Tahun 2025 **“Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”** dapat dirumuskan Prioritas Daerah DIY sebagai berikut.

1. Penurunan tingkat kemiskinan;
2. Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak;
3. Peningkatan kualitas SDM Yogyakarta;
4. Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah);
5. Penguatan *Good-governance* pada berbagai tingkatan; dan
6. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram.

Keenam (6) rumusan Prioritas Pembangunan DIY tahun 2025 tersebut, diselaraskan dengan Sasaran Pembangunan DIY tahun 2025 yang tercantum dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 sebagai berikut.

**Tabel V-1 Penyelarasan Prioritas Daerah Tahun 2025 dengan Sasaran RPJMD DIY Tahun 2022-2027**

No.	Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Base-line	Target Tahun
					2022	2025
1.	<i>“Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan”</i>	Penurunan tingkat kemiskinan	1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	11,49	9,66
2.		Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB	5,15	5,3-5,8
				Pendapatan Perkapita (Rp juta)	28,00	31,51
				TPT	4,06	3,56-3,26
				Inflasi	6,49	2-4
3.	Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	IPM	80,64	81,68	
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,98	
4.	Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	2.1.1) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	39,88	40,13	
5.	Penguatan <i>Good-governance</i> pada berbagai tingkatan	3.1.1) Meningkatnya <i>Good Governance</i>	Opini BPK	WTP	WTP	
			SAKIP	AA	AA	

No.	Tema Pembangunan	Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Base-line	Target Tahun
					2022	2025
				Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi	Tinggi
6.		Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	80,38	83,74
			4.1.2) Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	121,93	108,7

Sumber: RKPD Tahun 2025

Prioritas pembangunan daerah DIY Tahun 2025 selanjutnya diselaraskan dengan Prioritas Nasional yang tercantum dalam Rancangan RKP Tahun 2025 sebagai berikut.

**Tabel V-2 Penyelarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah**

No.	Prioritas Nasional	No.	Sasaran Pembangunan	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1	Indeks Demokrasi Indonesia	PD 5 Penguatan <i>good-governance</i> pada berbagai tingkatan	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi digital, Ekonomi Digital, dan Ekonomi Biru	1	Asia Power Index ( <i>Military Capability</i> )	PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
		2	Asia Power Index Diplomatic Influence		
		3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Tempat Tinggalnya		
		4	Prevelensi Ketidakcukupan Pangan (PoU)		
		5	Indeks Ketahanan Energi		
		6	Kapasitas tampungan air (m3/kapita)		
		7	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)		
		8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)		
		9	Indeks Daya Saing Global		
		10	Indeks Ekonomi Hijau		
		11	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer		
		12	Timbulan Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)		
		13	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		
		14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		

No.	Prioritas Nasional	No.	Sasaran Pembangunan	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda				
		15	Presentase Penurunan Emisi GRK - Tahunan (%) - Kumulatif (%)						
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	1	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Pendapatan Per Kapita (Rp juta)				
		2	Rasio Kewirausahaan (%)						
		3	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)						
		4	Rasio PDB Pariwisata (%)						
		5	Devisa Pariwisata (miliar USD)						
		6	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)						
		7	Aset Perbankan/PDB (%)						
		8	Aset Dana Pensiun/PDB (%)						
		9	Aset Asuransi/PDB (%)						
		10	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)						
		11	Total Kredit/PDB (%)						
		12	Inklusi Keuangan (%)						
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1	Hasil Pembelajaran a. Rata-rata nilai PISA i Membaca ii Matematika iii Sains b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun) c. Harapan lama sekolah (tahun)	PD 3 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	IPM				
		2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)						
		3	Presentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)						
		4	Tingkat Penguasaan Iptek: a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) b. Peringkat Indeks Inovasi Global	5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	TPT		
								6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
								7	Usia Harapan Hidup (tahun)
		8	Kesehatan Ibu dan Anak a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b. Prevelensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	9	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	PD 3 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	IPM		
								10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)
								11	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)
								12	Indek Ketimpangan Gender (IKG)

No.	Prioritas Nasional	No.	Sasaran Pembangunan	Prioritas DIY	Indikator Sasaran Pemda
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri	1	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB
		2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)		
		3	Ekspor Barang dan Jasa (%PDB)		
		4	Biaya Logistik (%PDB)		
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1	Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	PD 1 Penurunan tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan
		2	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)		
		3	Persentase panyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)		
		4	Proporsi kontribusi PDRB wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	PD 4 Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY
		5	Persentase desa mandiri (%)		
		6	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)		
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	1	<i>Return on Asset (ROA) BUMN (%)</i>	PD 5 Penguatan <i>good-governance</i> pada berbagai tingkatan	Opini BPK
		2	Indeks Integritas Nasional		
		3	Indeks Materi Hukum		
		4	Indeks Pelayanan Publik		
		5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		SAKIP
		6	Indeks Persepsi Korupsi		
		7	Indeks Pembangunan Hukum		
		8	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)		
		9	Tingkat Inflasi (%)	PD 2 Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak	Inflasi
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	PD 3 Peningkatan Kualitas SDM Yogyakarta	Indeks Pembangunan Kebudayaan
		2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		
		3	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	PD 6 Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY

Sumber: RKPD Tahun 2025

Selain penyelarasan pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dan Rancangan RKP Tahun 2025, RKPD DIY Tahun 2025 juga diselaraskan dengan hasil pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2025,

Pemutakhiran Indikator Makro, dan Rancangan RKP 2025. Dalam pembahasan tersebut, disepakati 31 target indikator sebagai berikut.

**Tabel V-3 Penyelarasan Indikator Target Daerah dengan hasil Rakortekrenbang**

No	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Target RKP 2025	Kesepakatan Target DIY 2025
1.	Kontribusi PDRB Provinsi	%	-	0,86
2.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.425	0,23-0,22
3.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	30,1-30,2	33,4 - 34,7
4.	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	%	N/A	5,65
5.	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	21,0-21,6	7
6.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	6,1	7,4
7.	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	1,356	1,025
8.	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	Indeks	-	11,47
9.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	19,9-20,0	11,89 - 12,00
10.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	-	10,37
11.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Ribu Orang	-	237,59
12.	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	%	7,92	0,07
13.	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Indeks	-	96,64
14.	Indeks Integritas Nasional	Indeks	74.52	81,37
15.	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	81,69-85,23	87,31 - 90,57
16.	PDRB per kapita	Rp Juta	81.96 - 82.08	52,58 - 53,79
17.	Tingkat Kemiskinan	%	6,0 – 7,0	10,00 – 10,50
18.	Rasio Gini	Indeks	0,379-0,382	0,443 - 0,447
19.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	22	26
20.	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,56	0,70
21.	Penurunan intensitas emisi GRK	%	38,6	62,14
22.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,30-5,60	5,3 - 5,8
23.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,50-5,00	3,12 - 3,51
24.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	56,30	67
25.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,68	4,64
26.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,00	4,3
27.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,5	2,8
28.	Tingkat Inflasi	%	1,5 – 3,5	3,1-3,8

No	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Target RKP 2025	Kesepakatan Target DIY 2025
29.	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	%	7,21	9,06
30.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	70,29	76,17
31.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	%	43,19	37,5

Sumber: RKPD Tahun 2025

Melalui penyelarasan agenda pembangunan nasional dan prioritas daerah tersebut, ditetapkan target tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2025 yang digambarkan dalam Indikator Kinerja Utama dan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel V-4 Penetapan Indikator Kinerja Utama DIY**

Indikator Kinerja Utama	Baseline	Target	
	2022	2024	2025
IGI ( <i>Inclusive Growth Index</i> )	6,24	6,42	6,52
Indeks Kebahagiaan	72,27	73,41	73,98
Angka Kemiskinan	11,49	10,16	10,00-10,50
Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	5,15	5,1-5,6	5,3-5,8
Pendapatan Perkapita (Rp juta)	28,07	30,23	31,51
TPT	4,06	3,45-3,8	3,12-3,51
Inflasi	6,49	2-4	3,1-3,8
IPM	80,64	81,36	81,68
Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,78	74,98
Indeks Williamson	0,450	0,441	0,438
Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	39,88	40,09	40,13
Indeks Reformasi Birokrasi	A (82,58)	A (83,18)	A (83,78)
Opini BPK	WTP	WTP	WTP
SAKIP	AA	AA	AA
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi (81,51)	Tinggi (81,66)	Tinggi (87,31-90,57)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sedang (63,36)	Sedang (63,71)	Sedang (64,19)
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	80,38	82,62	83,74
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	121,93	113,11	108,7

Sumber: RKPD Tahun 2025



## BAB VI PENUTUP

Mencermati hal-hal yang sudah tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang APBD Tahun Anggaran 2025 baik permasalahan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan, koreksi dan pencermatan dari semua pihak akan banyak mewarnai pembahasan berikutnya. Hal-hal yang sudah direncanakan tentunya masih memerlukan beberapa pencermatan, dan semoga dari hasil pencermatan tersebut segera dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Agustus 2024

